



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berupa saldo anggaran lebih tahun anggaran berjalan, penggeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan rencana pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan adanya tambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendasari

amanat peraturan perundang-undangan dan perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya kegiatan lanjutan Tahun 2018, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banyumas menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juli 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sebagaimana ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri tersebut, perubahan RKPD dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan di Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan ketidaksesuaian RKPD Kabupaten Banyumas dengan perkembangan keadaan. Hal ini terutama dikarenakan perubahan target kinerja pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, serta penggeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Melalui perubahan RKPD pencapaian target dan sasaran pembangunan disesuaikan dengan perkembangan keadaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Banyumas. Perubahan RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD juga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2018;

2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 meliputi upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran dan pembangunan infrastruktur.
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
4. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

Bab I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan latar belakang perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018, dasar hukum perubahan RKPD, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, serta sistematika perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Triwulan II

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang mempengaruhi prioritas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah pasca triwulan II.

- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah; Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018 pasca triwulan II; dan Kebijakan serta Strategi Pembangunan Kabupaten Banyumas.
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- Bab VI Penutup

BAB II EVALUASI TRIWULAN II

2.1. Kondisi Umum Daerah

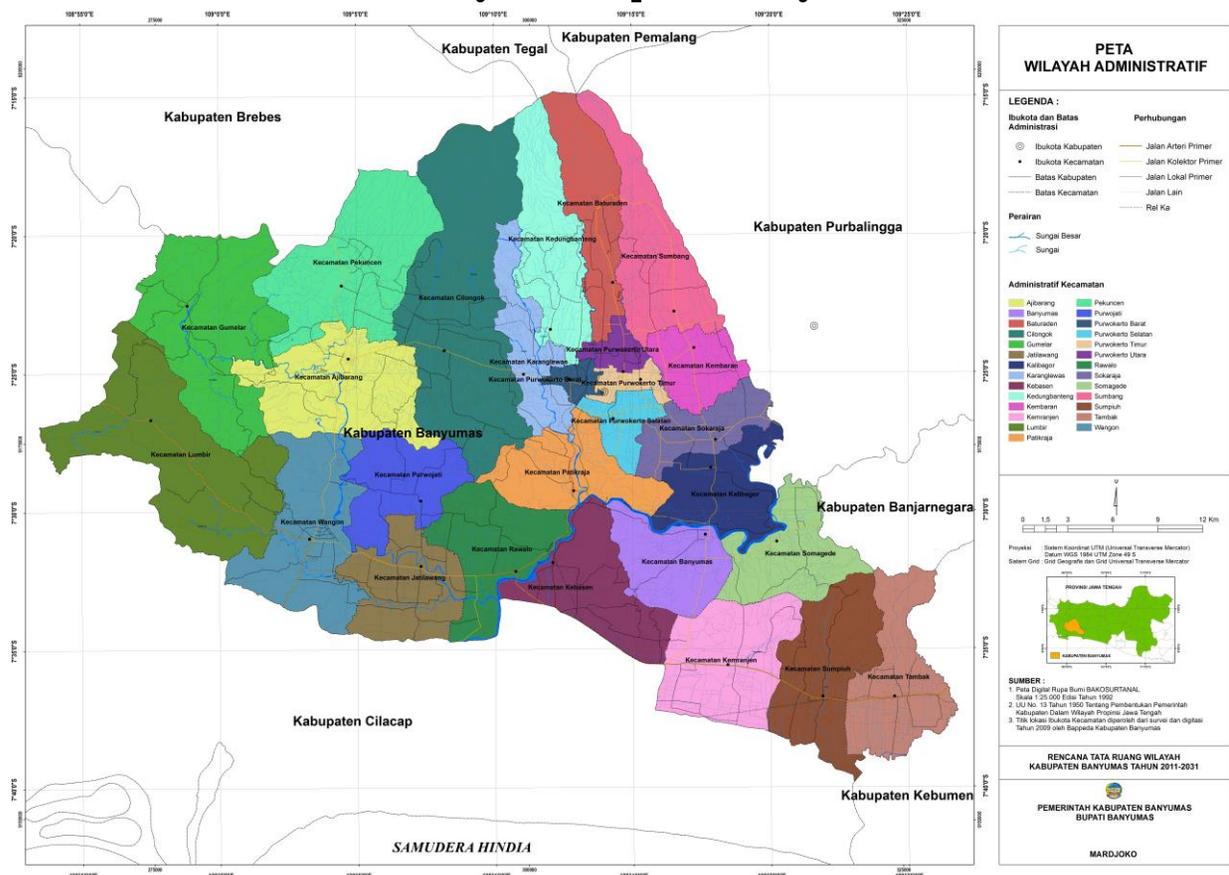
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759 ha. Secara administratif Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan. Wilayah Kabupaten Banyumas dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

**Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas**



2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17"BT – 109°27'15"BT dan di antara 7°15'05"LS – 7°37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah dari Jawa Barat pada lintas Selatan menuju Yogyakarta, Cilacap dan daerah Pegunungan Dieng atau sebaliknya, serta dari Jawa Barat lintas Utara melalui Kabupaten Tegal menuju Cilacap, daerah Pegunungan Dieng dan Yogyakarta atau sebaliknya.

2.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dataran dengan ketinggian > 0 – 250 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 95.335,47 ha atau 71,81% dari luas wilayah, meliputi perkotaan Purwokerto, Kecamatan Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, sebagian Kecamatan Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kebasen, Patikraja, Rawalo, Purwojati, Jatilawang, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Gumelar, sebagian Pekuncen, sebagian Cilongok, sebagian Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
- b. Dataran dengan ketinggian >250 - 500 meter dpl seluas kurang lebih 19.918,27 ha atau 15,00% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Gumelar, sebagian kecil Kecamatan Lumbir, sebagian kecil Kecamatan Wangon, sebagian kecil Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil Kecamatan Purwojati, sebagian kecil Kecamatan Jatilawang, sebagian kecil Kecamatan Kebasen, sebagian kecil Kecamatan Banyumas, sebagian kecil Kecamatan Kemranjen, sebagian Kecamatan Somagede, sebagian Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian Kecamatan Tambak.
- c. Dataran dengan ketinggian >500 – 1500 meter dpl seluas kurang lebih 13.511,18 ha atau 10,18% dari luas wilayah, meliputi sebagian

Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian kecil Kecamatan Somagede, sebagian kecil Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian kecil Kecamatan Tambak.

- d. Dataran dengan ketinggian >1500 – 2500 meter dpl seluas kurang lebih 3.578,76 ha atau 2,70% dari luas wilayah, meliputi sebagian kecil Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
- e. Dataran dengan ketinggian >2500 – 3500 meter dpl seluas kurang lebih 411,93 ha atau 0,31% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
- f. Dataran dengan ketinggian >3000 – 3900 meter dpl seluas kurang lebih 3,39 ha atau 0,003% dari luas wilayah, meliputi puncak Gunung Slamet yang ada di Kecamatan Baturaden dan Sumbang.

Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0° – 2° meliputi areal seluas kurang lebih 43.876,9 ha atau 33,05 % dari luas wilayah, meliputi wilayah bagian tengah dan selatan
- b. Kemiringan 2° – 15° meliputi areal seluas kurang lebih 21.294,5 ha atau 16,04 % dari luas wilayah, meliputi sekitar Gunung Slamet.
- c. Kemiringan 15° – 40° meliputi areal seluas kurang lebih 35.141,3 ha atau 26,47 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.
- d. Kemiringan $> 40^{\circ}$ meliputi areal seluas kurang lebih 32.446,3 ha atau 24,44 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.

Ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Banyumas membentuk relief bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Lebih dari 45% wilayah Kabupaten Banyumas adalah daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan. Dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet, sedangkan dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Selatan wilayah Kabupaten Banyumas membentang Perbukitan Serayu.

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut-Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan.

Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur.

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Potensi bahan galian yang telah dilakukan inventarisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
1	Andesit	169.090.173,0 9	Kec. Baturaden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karang lewas, Kedungbanteng, Sumbang, Patikraja, dan Cilongok
2	Andesit Homblande	180.451,65	Kec. Kedungbanteng
3	Batu Tempel Adesit	150.536,67	Kec. Kedungbanteng dan Pekuncen
4	Diorit	3.5900,00	Kec. Ajibarang & Purwojati

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
5	Granodiorit	11.566,978	Kec. Kedungbanteng
6	Basalt	21.511.646,08	Kec. Somagede, banyumas, Kebasen, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Tambak, Kemranjen, Ajibarang, dan Rawalo
7	Batu Gamping	483.192.403,5 3	Kec. Ajibarang & Gumelar
8	Phospat	362.900,25	Kec. Ajibarang & Gumelar
9	Kaolin	2.400.000	Kec. Lumbir, Cilongok, Kalibagor, dan Gumelar
10	Pasir	11.597.363,54	S. Serayu, Logawa, Klawing, dan Tajum
11	Trass	560.000	Kec. Kedungbanteng dan Lumbir
12	Sirtu	5.846.340,57	S. Serayu, Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut
13	Tanah Liat	45.487.328	Seluruh Kabupaten Banyumas
14	Tanah Urug	481.347,28	Seluruh Kabupaten Banyumas
15	Batu Pasir		Kec. Gumelar; Patikraja
16	Oker		Kec. Kedungbanteng
17	Kalsit		Kec. Akibarang dan Gumelar
18	Emas	9,6	Kec. Gumelar, Lumbir, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Kebasen, Rawalo, banyumas, Sumpiuh, Tambak dan Somagede.

Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- a. Potensi air bawah tanah tinggi. Berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda). Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km. Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
- b. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang. Berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
- c. Potensi air bawah tanah sedang. Berada pada kelulusan sedang, air tanah berada pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik.
- d. Potensi air bawah tanah sedang. Berada pada kelulusan sedang, air tanah berada pada alluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
- e. Potensi air bawah tanah rendah. Berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada alluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan bauan tersier).
- f. Potensi air bawah tanah langka. Berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m³/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m³/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m³/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m³/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh

seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara bulanan $26,3^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum tercatat $24,4^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $30,9^{\circ}\text{C}$. Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 rata-rata sebesar 4.601 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis wilayah yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 8.134 mm/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 5.835 mm/tahun, Stasiun Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon Sumbang 5.746 mm/tahun. Adapun curah hujan minimum 3.189 mm/tahun di Stasiun Bendung Tajum, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang

Daerah yang mempunyai hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 307 hari hujan/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 245 hari hujan/tahun, Stasiun Bendung Kedung Kancil, Bogangin, Sumpiuh 225 hari hujan/tahun. Adapun hari hujan minimum 172 hari hujan/tahun di Stasiun UPT Banyumas, Sudagaran, Banyumas

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas
Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013 – 2017

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554	NA
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528	NA
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026	NA
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205	NA
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	NA

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2013-2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017 Diolah

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Sedangkan penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glempang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;
- 2) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Paningkaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;

- 3) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
- 4) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
- 5) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;
- 6) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;
- 7) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
- 8) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
- 9) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
- 10) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
- 11) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;
- 12) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendep;
- 13) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
- 14) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
- 15) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpenapen, Ketanda dan Bogangin;
- 16) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
- 17) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

c. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja,

Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

d. Wilayah Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturaden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemitug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kotaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.

2.1.1.9. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2017 sebesar 2.040.878 jiwa yang terdiri dari 1.029.453 laki-laki dan 1.011.425 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata, hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Cilongok sebanyak 138,978 jiwa, terdiri dari 70.353 laki-laki dan 68.625 perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 43,515 jiwa, terdiri dari 22.012 laki-laki dan 21.503 perempuan.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laki-laki	802.316	809.984	817.383	1.019.451	1.029.453
2.	Perempuan	803.263	810.934	818.526	1.001.611	1.011.425
3.	Total	1.605.579	1.620.918	1.635.909	2.021.062	2.040.878
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,96	0,92	23,54	23,54	5,14

Sumber : Dindukcapil Kab. Banyumas Tahun 2017

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi yang didiami oleh 2.040.878 jiwa , maka rata – rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.522,24 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu sebanyak 8.075,92 jiwa/km² , dan terendah terdapat di Kecamatan Lumbir yakni sebanyak 575.01 jiwa/km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1.	Lumbir	102,66	59,031	575.01
2.	Wangon	60,78	99,430	1,635.90
3.	Jatilawang	48,16	85,829	1,782.16
4.	Rawalo	49,64	64,343	1,296.19
5.	Kebasen	54,00	78,059	1,446,00
6.	Kemranjen	60,71	85,808	1,413.41
7.	Sumpluh	60,01	69,157	1,152.42
8.	Tambak	52,03	58,853	1,131.14
9.	Somagede	40,11	43,560	1,086.01
10.	Kalibagor	35,73	63,270	1,770.78
11.	Banyumas	38,09	61,202	1,606.77
12.	Patikraja	43,23	67,078	1,551.65
13.	Purwojati	37,86	43,515	1,149.37
14.	Ajibarang	66,5	116,171	1,746.93
15.	Gumelar	93,95	62,155	661.58
16.	Pekuncen	92,7	88,104	950.42
17.	Cilongok	105,34	138,978	1,319.33
18.	Karanglewas	32,5	72,348	2,226.09
19.	Kedungbanteng	60,22	100,841	1,674.54
20.	Baturaden	45,53	90,339	1,984.16
21.	Sumbang	53,42	102,046	1,910.26

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
22.	Kembaran	25,92	59,527	2,296.57
23.	Sokaraja	29,92	67,271	2,248.36
24.	Purwokerto Selatan	13,75	84,765	6,164.73
25.	Purwokerto Barat	7,4	59,747	8,073.92
26.	Purwokerto Timur	8,42	65,799	7,814.61
27.	Purwokerto Utara	9,01	53,652	5,954.72
Jumlah Total		1.327,59	2,040,878	1,522.24

Sumber : *Dindukcapil Kab. Banyumas Tahun 2017*

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang berbeda mencerminkan adanya perbedaan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan penduduk. Pada wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi akan membutuhkan infrastruktur lebih banyak dibanding wilayah yang kepadatannya rendah. Demikian juga akan berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan, dengan konsekuensi pengurangan intensitas dan densitas flora dan fauna. Permasalahan kependudukan yang banyak dihadapi adalah pada wilayah perkotaan.

2.1.1.10. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Sedangkan asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Tabel 2.5.
Potensi Pengembangan Wilayah

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.
	b. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
5	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
6	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
7	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
8	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumbrir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
9	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
10	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Pekuncen, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar, Lumbrir, Wangon, Purwojati, Jatilawang,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
11	Kawasan peruntukan industri	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
12	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto – Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto – Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Cilacap.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar 42,02 trilyun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 33,05 trilyun rupiah dengan produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku sebesar

25.455.170 rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 20.023.353 rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, selama tiga tahun terakhir kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Di Kabupaten Banyumas sektor industri pengolahan sudah menjadi sektor andalan dalam pembentukan PDRB dimana pada tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian adalah merupakan sektor andalan. Pada tahun 2016 sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 13,76 persen, sektor industri pengolahan sebesar 24,48 persen dan sektor perdagangan sebesar 15,44 persen.

Sektor yang dalam tiga tahun terakhir kontribusinya cenderung selalu naik adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2016 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 6,05 persen (2015 =6,12 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2016 sebagian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan riil ini dapat diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.6.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Banyumas
Menurut Sektor ADHB Tahun 2013-2016 (%)

Lapangan Usaha		Tahun			
		2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,88	14,29	14,21	13,76
B	Pertambangan dan Penggalian	5,21	5,42	5,72	5,56
C	Industri Pengolahan	22,16	23,38	24,19	24,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	12,15	12,11	12,05	12,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,22	15,42	15,77	15,44
H	Transportasi dan Pergudangan	3,43	3,56	3,64	3,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11	3,18	3,24	3,41
J	Informasi dan Komunikasi	4,61	4,42	4,17	4,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	3,17	3,14	3,26
L, M	Real Estate	2,10	2,19	2,19	2,19
N	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,29	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,43	3,31	3,35	3,26

Lapangan Usaha		Tahun			
		2013	2014	2015	2016
P	Jasa Pendidikan	5,33	5,37	5,23	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,97	0,95	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,70	1,75	1,69	1,74
PDRB		100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2017

Di sisi lain, perubahan PDRB Kabupaten Banyumas didukung oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2016 adalah pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,26 persen, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,37 persen, kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 9,23 persen. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas menurut sektor ADHK 2010. Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas
Menurut Sektor ADHK 2010
Tahun 2013-2016 (%)

Lapangan Usaha		Tahun			
		2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	-0,52	5,84	2,85
B	Pertambangan dan Penggalian	6,49	4,21	2,12	4,04
C	Industri Pengolahan	11,54	11,11	8,63	5,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,24	5,22	2,07	7,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,96	1,21	1,61	2,08
F	Konstruksi	2,80	3,67	6,02	11,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,87	3,40	3,35	4,65
H	Transportasi dan Pergudangan	9,34	8,12	6,84	5,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,33	8,78	8,76	9,37
J	Informasi dan Komunikasi	7,03	8,86	6,89	9,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	3,99	4,82	9,37
L	Real Estate	11,31	9,71	7,71	6,49
M,N	Jasa Perusahaan	17,45	5,63	9,69	7,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	1,41	8,14	1,34
P	Jasa Pendidikan	9,98	7,78	6,61	5,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,75	8,86	4,51	8,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,02	7,85	3,35	7,44
PDRB		6,97	5,67	6,12	6,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan pada periode Tahun 2013 - 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dari sejumlah Rp 29.367.687,40 Juta pada Tahun 2013 menjadi Rp 33.051.046,65 Juta pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp. 3.683.359,25 Juta.

Tabel 2.8.
 Nilai PDRB Tahun 2013-2016 Atas Dasar Harga Konstan
 Kabupaten Banyumas (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.923.570,34	3.903.344,58	4.131.290,79	4.249.221,60
B Pertambangan dan Penggalian	1.536.092,63	1.600.762,13	1.634.698,29	1.700.817,83
C Industri Pengolahan	5.959.582,53	6.621.418,09	7.192.718,61	7.582.323,83
D Pengadaan Listrik dan Gas	31.169,42	32.795,03	33.474,99	35.872,59
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.057,54	27.384,19	27.824,60	28.402,85
F Konstruksi	3.401.804,88	3.526.715,48	3.739.023,76	4.160.014,82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.919.741,72	5.087.139,81	5.267.271,25	5.501.759,40
H Transportasi dan Pergudangan	1.046.028,69	1.130.987,74	1.203.063,06	1.280.498,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899.305,15	978.307,73	1.064.036,79	1.163.709,71
J Informasi dan Komunikasi	1.538.591,24	1.674.917,93	1.790.319,78	1.955.654,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi	852.065,97	886.102,01	928.274,94	1.015.806,79
L Real Estate	645.625,35	708.345,33	762.958,76	812.442,90
M,N Jasa Perusahaan	77.519,37	81.881,35	89.818,27	96.142,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	923.773,27	936.828,98	1.013.086,86	1.026.711,75
P Jasa Pendidikan	1.263.549,46	1.361.872,42	1.451.892,19	1.536.214,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	249.435,22	271.535,18	283.774,73	308.792,32
R,S,T,U Jasa lainnya	498.225,68	537.349,42	555.350,63	596.660,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.793.138,47	29.367.687,40	31.164.876,40	33.051.046,65

Sumber: BPS Banyumas, 2017

Nilai PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku pada periode Tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sejumlah Rp. 31.369.317,74 Juta menjadi Rp. 42.016.940,50 Juta atau meningkat sebesar Rp. 10.647.622,76 Juta , Secara rinci dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.9.
Nilai PDRB Tahun 2013-2016 Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Banyumas (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108,832,110	107,793,380	113,826,299	116,250,931
B	Pertambangan dan Pengalihan	14,594,164	15,566,648	16,040,765	19,044,524
C	Industri Pengolahan	254,694,118	271,526,773	284,575,766	296,227,398
D	Pengadaan Listrik dan Gas	813,604	866,488,30	887,584	954,806
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	549,040	567,980	577,261	589,805
F	Konstruksi	73,465,919	76,681,876	81,286,113	86,875,267
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105,825,306	110,899,193	115,299,085	121,181,123
H	Transportasi dan Pergudangan	22,760,150	24,868,280	26,807,881	28,592,166
I	Jasa Keuangan dan Asuransi	899.305,15	978.307,73	1.064.036,79	1.163.709,71
J	Real Estate	1.538.591,24	1.674.917,93	1.790.319,78	1.955.654,89
K	Jasa Perusahaan	852.065,97	886.102,01	928.774,94	1.015.806,79
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	645.625,35	708.345,33	762.958,76	812.442,90
M, N	Jasa Pendidikan	77.519,37	81.881,35	89.818,27	96.142,12
O	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	923.773,27	936.828,98	1.013.086,86	1.026.711,75
P	Jasa lainnya	1.263.549,46	1.361.872,42	1.451.892,19	1.536.214,41
Q	Jasa Keuangan dan Asuransi	249.435,22	271.535,18	283.774,73	308.792,32
R,S,T ,U	Real Estate	498.225,68	537.349,42	555.350,63	596.660,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		27.793.138,47	29.367.687,40	31.164.876,40	33.051.046,65

Sumber : BPS Banyumas 2017

Nilai PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku pada periode Tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sejumlah Rp, 31.369.317,74 Juta menjadi Rp, 42.016.940,50 Juta atau meningkat sebesar Rp 10.647.622,76 Juta , Secara rinci dapat dilihat tabel berikut

Tabel 2.10.
Nilai PDRB Tahun 2013-2016 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Banyumas

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun (<i>Juta Rupiah</i>)			
		2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.668.080,91	4.991.336,59	5.514.200,36	5.781.295,07
B	Pertambangan dan Penggalian	1.633.848,37	1.892.243,11	2.219.751,28	2.334.799,82
C	Industri Pengolahan	6.951.195,68	8.164.876,50	9.385.315,40	10.286.686,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29.006,75	30.567,73	32.906,92	38.579,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.915,33	28.885,82	30.280,04	31.522,72
F	Konstruksi	3.811.031,23	4.228.131,51	4.674.249,11	5.258.224,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.400.556,81	5.734.774,45	6.118.040,09	6.489.419,46
H	Transportasi dan Pergudangan	1.075.864,03	1.242.788,59	1.411.764,12	1.500.768,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	975.992,79	1.111.201,34	1.256.063,81	1.431.064,68
J	Informasi dan Komunikasi	1.447.287,52	1.544.328,88	1.618.350,79	1.769.627,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.019.971,00	1.108.157,74	1.217.463,38	1.370.744,42
L	Real Estate	660.194,57	763.107,62	851.097,64	918.643,59
M,N	Jasa Perusahaan	89.683,97	97.169,09	111.968,85	123.437,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.075.722,53	1.157.690,40	1.300.430,47	1.370.867,96
P	Jasa Pendidikan	1.671.446,69	1.875.673,84	2.030.067,55	2.174.242,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	298.954,02	339.649,88	370.498,81	404.315,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	532.565,56	612.791,60	656.340,74	732.701,73
Produk Domestik Regional Bruto		31.369.317,74	34.923.374,71	38.798.789,35	42.016.940,50

Sumber : BPS 2017

Perkembangan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor industri pengolahan, Selama kurun waktu 4 tahun tersebut, sektor ini selalu mengalami peningkatan kontribusi

yang positif terhadap PDRB Kabupaten Banyumas kecuali sektor pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menunjukkan penurunan kontribusi dari Tahun 2013-2016.

PDRB per kapita Kabupaten Banyumas ADHK dan ADHB dalam kurun waktu tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2013 PDRB per kapita ADHK sebesar 17.310.353 rupiah, meningkat menjadi 20.023.353 rupiah di tahun 2016 dan ADHB 21.547.370 rupiah meningkat menjadi 25.455.170 rupiah di tahun 2016.

2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Banyumas 3,91% lebih tinggi dari Inflasi di Jawa Tengah sebesar 3,35% dan lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 2,66%.

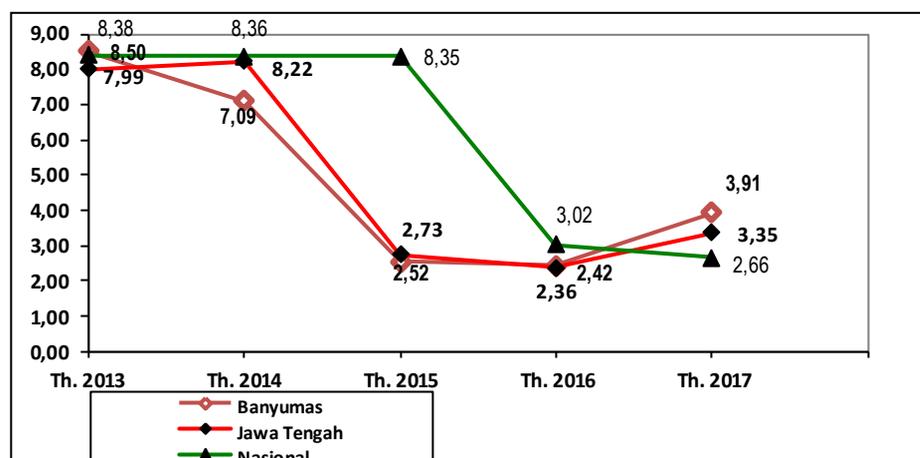
Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Laju Inflasi Tahun 2013 - 2017

No.	Variabel	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kabupaten Banyumas	%	8,50	7,09	2,52	2,42	3,91
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	7,99	8,22	2,73	2,36	3,35
3.	Nasional	%	8,38	8,36	3,35	3,02	2,66

Sumber : BPS Kab. Banyumas, 2017.

Gambar 2.2.
Laju Inflasi Tahun 2013 - 2017



Relatif rendahnya inflasi tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Banyumas dalam mengendalikan inflasi melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

2.1.2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013 – 2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 17.05 %, berdasarkan posisi relatifnya masih berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 % dan Nasional sebesar 10,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih kategori tinggi.

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2017

No	Persentase Penduduk Miskin	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Banyumas	%	18,44	17, 45	17,52	17,23	17,05
2.	Prov. Jawa Tengah	%	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01
3.	Nasional	%	11,47	10,96	11,13	10,07	10,12

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.3.

Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional (tahun 2013 – 2017)

Sedangkan Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten se Barlingmascakeb Tahun 2013 -2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13.

Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Barlingmascakeb
Tahun 2013 2017

Wilayah Jateng	Kemiskinan Kab. / Kota				
	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAWA TENGAH	14.44	13.58	13.58	13.27	13.01
Kabupaten Cilacap	15.24	14.21	14.39	14.12	13.94
Kabupaten Banyumas	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05
Kabupaten Purbalingga	20.53	19.75	19.70	18.98	18.8
Kabupaten Banjarnegara	18.71	17.77	18.37	17.46	17.21
Kabupaten Kebumen	21.32	20.50	20.44	19.86	19.6

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Dibandingkan dengan kabupaten di Barlingmascakeb, persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada Tahun 2017 menempati peringkat ke-3 tertinggi dari 5 kabupaten di Barlingmascakeb.

Posisi relative tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten sekitarnya terlihat masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap (13,94%), Akan tetapi angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga (18,80 %) dan Kab. Kebumen (19,60%). Sementara itu perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 - 2017



Dengan melihat pada grafik di atas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir masih fluktuatif. Ini dapat dilihat dari garis trendline yang menurun, namun di tahun 2015 ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014, dan menurun kembali di tahun 2016 dan tahun 2017.

1. Jumlah Penduduk Miskin.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang termasuk pada kategori memiliki pendapatan berada di bawah garis kemiskinan. Jika dilihat dari posisi relatifnya, jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebesar 283.200 jiwa, termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Cilacap sebesar 240.200 jiwa, Purbalingga sebesar 171.900 jiwa dan Banjarnegara sebesar 156,800 jiwa.

Sementara itu berdasarkan perkembangan pada tahun terakhir (2013-2017), jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 296.800 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 283.475, meningkat tahun 2015 sebesar 285.900, menurun tahun 2016 283.900 menurun di tahun 2017 sebesar 283.200 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

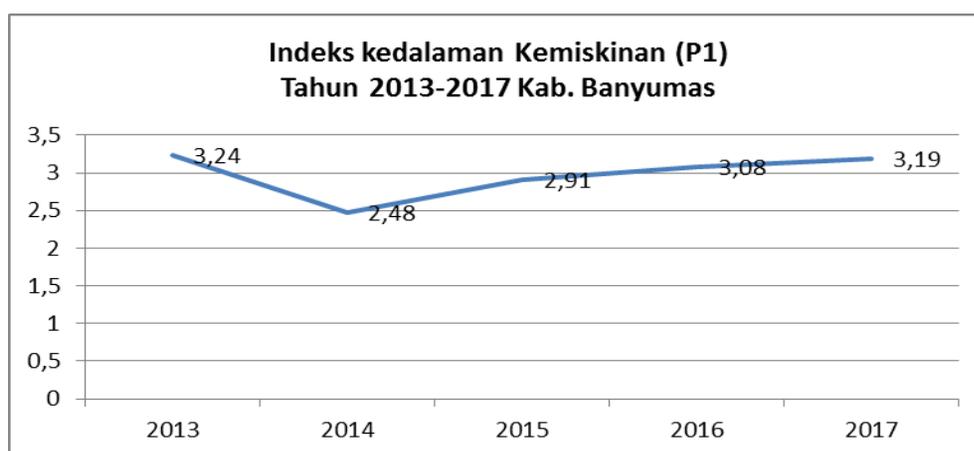
Gambar 2.5.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017



2. Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. P1 Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 3,19, dilihat berdasarkan posisi relatifnya maka angka tersebut berada lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.21 dan Nasional sebesar 1.79. Perkembangan Indek Kedalaman Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2017 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.6.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017



Tabel 2.14.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab./Kota di Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2017

Wilayah Jateng	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAWA TENGAH	2.37	2.09	2.44	2.37	2.21
Nasional	1.79	1.75	1.84	1,74	1,79
Kabupaten Cilacap	2.06	2.37	2.71	2.58	1.98
Kabupaten Banyumas	3.24	2.48	2.91	3.08	3.19
Kabupaten Purbalingga	3.20	3.26	3.37	3.85	2.79
Kabupaten Banjarnegara	2.91	2.88	3.51	3.03	3.25
Kabupaten Kebumen	3.57	2.78	4.08	3.78	3.62

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Berdasarkan perkembangan pada periode 2013 - 2017, P1 Kabupaten Banyumas fluktuatif yaitu dari tahun 2013 sebesar 3,24. Turun di tahun 2014 sebesar 2,48 dan naik ditahun 2015 sebesar 2,91 di naik ditahun 2016 sebesar 3,08 dan naik tahun 2017 sebesar 3,19.

Capaian P1 pada tahun 2014 merupakan angka terendah selama kurun waktu 2013-2019. Dengan masih tingginya perkembangan P1 di Kabupaten Banyumas, menunjukkan pendapatan penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan relatif banyak karena masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, atau keluar dari garis kemiskinan.

3. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. P2 Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 0,85 dilihat berdasarkan posisi relatifnya maka angka capaian tersebut berada lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,57.

Tabel 2.15.

Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. di Barlingmascakeb
Tahun 2013 – 2017

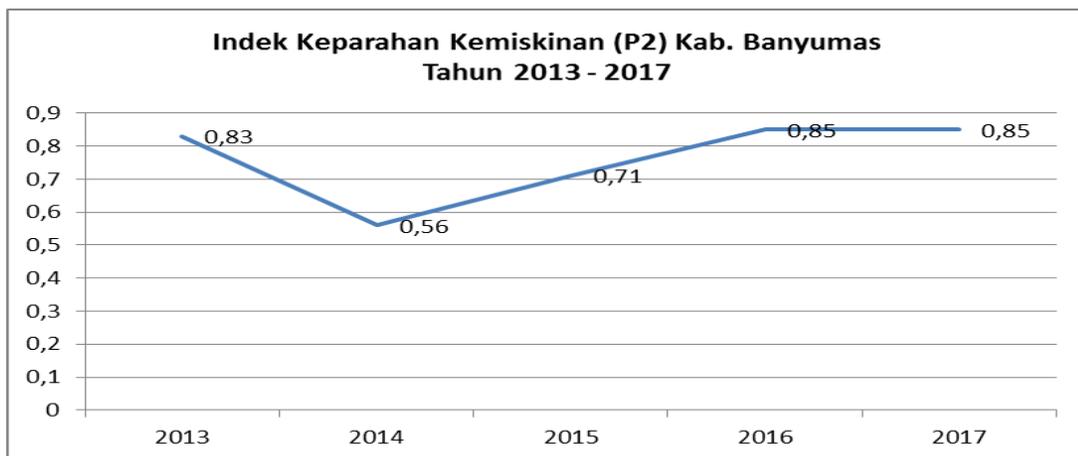
Wilayah Jateng	Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAWA TENGAH	0.59	0.51	0.65	0.63	0.57
Nasional	0.45	0.61	0.76	0.70	0.42
Kabupaten Cilacap	0.83	0.56	0.71	0.85	0.85

Wilayah Jateng	Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Banyumas	0.73	0.80	0.85	1.20	0.68
Kabupaten Purbalingga	0.77	0.73	0.93	0.80	0.84

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Sementara itu perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2013-2017) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.7.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017



4. Garis Kemiskinan

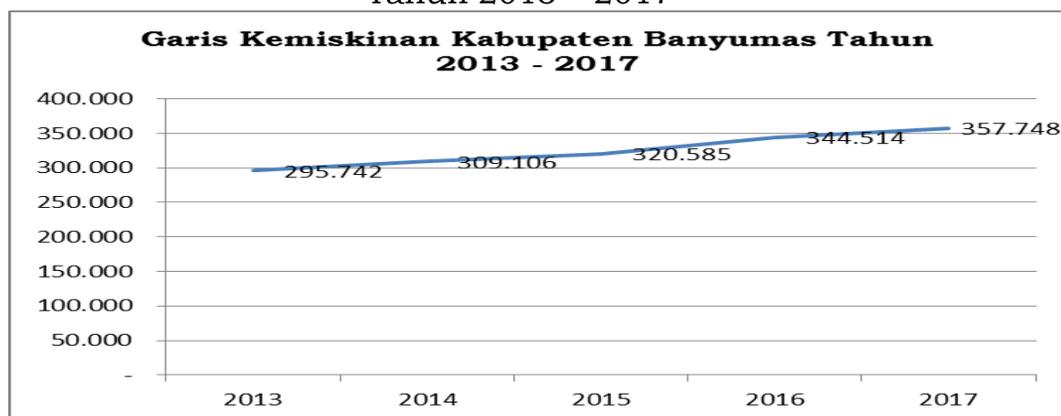
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten di Barlingmascakeb tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16.
Garis Kemiskinan Kabupaten di Barlingmascakeb
Tahun 2013 – 2017

Wilayah Jateng	Tahun				
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAWA TENGAH	261.881	281.570	297.851	317.348	333.224
Kabupaten Cilacap	256.615	265.714	273.828	292.525	307.041
Kabupaten Banyumas	295.742	309.106	320.585	344.514	357.748
Kabupaten Purbalingga	265.262	275.022	283.366	301.862	313.343
Kabupaten Banjarnegara	221.056	229.718	236.399	252.328	264.387
Kabupaten Kebumen	267.763	277.280	292.177	313.881	325.819

Berdasarkan grafik di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar Rp 357.748 berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 333.224. Garis kemiskinan Kabupaten Banyumas termasuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Banyumas paling tinggi dibanding kabupaten sekitarnya. Adapun perkembangan garis kemiskinan dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.8.
Garis Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017



2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 94,80%. Namun di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 94,41% dan tahun 2015 meningkat menjadi 94,74% dan meningkat di tahun 2016 menjadi 99,32% dan di tahun 2017 99,32%. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk Kabupaten Banyumas yang belum melek huruf adalah kelompok umur usia lanjut sehingga meskipun angka melek huruf belum mencapai 100%, namun angka tersebut cukup optimal.

2.1.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 adalah 7,39 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas adalah baru

pada tingkat tamatan SD. Hal ini konsisten dengan masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan menengah.

2.1.2.2.3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Jawa Tengah cenderung meningkat dari sebesar 11,89 (2013) menjadi 12,45 (2016).

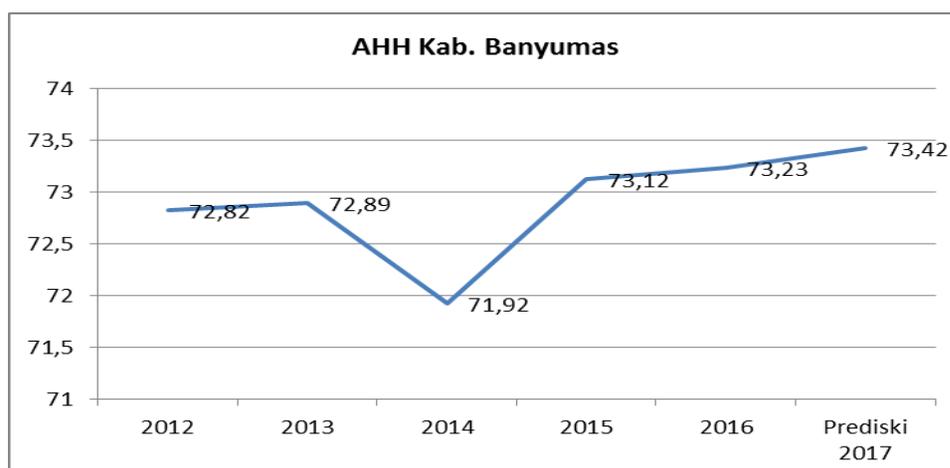
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013- 2016 meningkat dari 6,80 tahun menjadi 7,15 tahun.

2.1.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life / Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari hasil Susenas 2016 angka harapan hidupnya sebesar 73,23 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan (75,36) lebih tinggi dibanding laki-laki (70,97), hal ini sesuai dengan analisis pada gambar piramida penduduk sebelumnya, yakni pada kelompok lanjut usia penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Semakin tinggi usia harapan hidup mencirikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Sedangkan Prediksi tahun 2017 berdasarkan kajian dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Banyumas 73,42. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.9.
 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyumas
 Tahun 2012 – 2017



Sedangkan Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten di Barlingmascakeb sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17.
 Angka Harapan Hidup Kabupaten /Kota seJawa Tengah
 Tahun 2012-2017

Wilayah Jateng	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)				
	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAWA TENGAH	73.09	73.28	73.88	73.96	74.02
Kabupaten Cilacap	72.65	72.75	72.80	73	73.11
Kabupaten Banyumas	72.82	72.89	72.92	73.12	73.23
Kabupaten Purbalingga	72.69	72.76	72.80	72.81	72.86
Kabupaten Banjarnegara	73.25	73.34	73.39	73.59	73.69
Kabupaten Kebumen	72.49	72.61	72.67	72.77	72.87

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

2.1.2.2.5. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan keadaan pada tahun 2016 mempunyai harapan sekitar 12,58 tahun.

2.1.2.2.6.Kesehatan

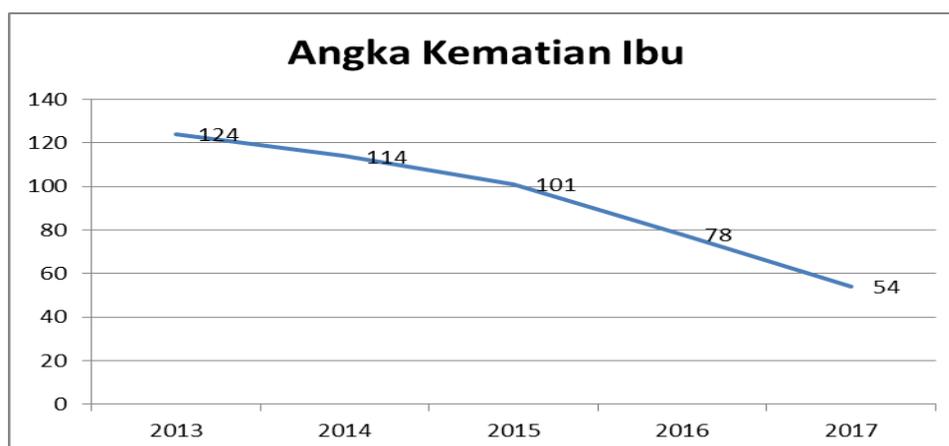
Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif.

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian sebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukan keadaan Sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu tahun 2017 (54/100.000 kh) menurun dibandingkan tahun 2013 (124/100.000 kh). Namun demikian upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian, dikarenakan beberapa kasus kematian ibu hamil masih dapat dicegah antara lain pada kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolisme. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2013 s.d. 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.10.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017



Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care) , pertolongan persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas.

Penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 (Kunjungan Pertama pada Trimester 1) dan K4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1	96,4	100,6	95,7	97,6	100
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4	91,9	95,8	89,4	91,2	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas

Guna memenuhi amanat SDGs serta mengetahui kinerja pencapaian gizi, dapat ditunjukkan pada indikator Angka Kematian Bayi

(AKB) dan Kasus Gizi Buruk. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

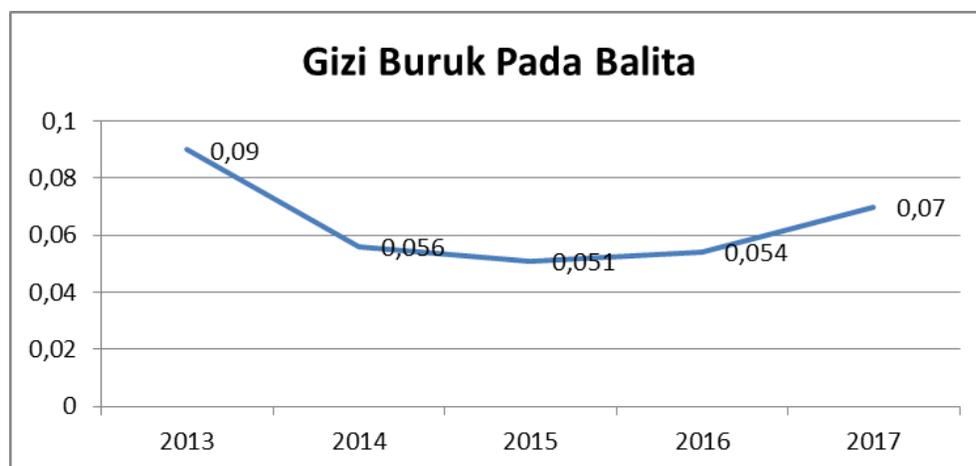
No	Tahun	Capaian	
		Per 1.000 kh	Kasus
1	2013	12,34	348
2	2014	8,96	260
3	2015	8,43	243
4	2016	8,49	239
5	2017	8,43	218

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

AKB merupakan gambaran kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Upaya yang telah ditempuh antara lain melalui peningkatan pendampingan kelas ibu dan balita serta optimalisasi peran Posyandu.

Selain intervensi gizi terhadap bayi, maka perhatian perlu diberikan pada Prosentase gizi buruk pada Balita . Di Kabupaten Banyumas prosentase gizi buruk dari tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuatif, sebagaimana gambar berikut

Gambar 2.11.
Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas

Sedangkan terkait dengan kondisi stunting di Kabupaten Banyumas, merupakan percotohan penanganan stunting di tingkakan

nasional dan provinsi, karena kasus stunting di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi.

Pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan balita usia 0-23 bulan, kondisi tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat dan aman yang antara lain ditunjukkan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi serta pola asuh orang tua terhadap balita, namun Pemerintah provinsi telah melakukan upaya penanggulangan masalah balita stunting terintegrasi dalam kegiatan perbaikan gizi pada masa kehamilan, penerapan ASI Eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI pada balita

Tabel 2.20.
Prosentase Kasus Stunting Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	CAPAIAN	
		Status Gizi Balita 0-59 bulan	Status Gizi Baduta 0-23 bulan
1	2013	19,84	16
2	2014	17,47	5,7
3	2015	15,19	5,1
4	2016	13	4,48
5	2017	13	4,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap kebutuhan ASI Eksklusif. Tabel 2.26 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.21.
Cakupan (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Tahun 2013-2017

Tahun	Cakupan (%) ASI
2013	55,8
2014	42,9
2015	50,4
2016	50,16
2017	26,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Pemberian ASI Eksklusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

Hal-hal lain yang masih perlu perhatian pada upaya pembangunan kesehatan yaitu masih cukup tingginya angka kematian dan kesakitan meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Untuk mengetahui perkembangan angka kesakitan salah satunya ditunjukkan melalui kondisi penyakit baik menular maupun tidak menular. Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.22.
Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2013	27,7	0,74	69,05	92,7	215	101
2014	10,5	1,9	70,05	98,96	202	107
2015	13,6	0,4	71,58	94	251	125
2016	49	1,6	70,02	96	287	163
2017*	49	1,6	70,1	96	231	125

Sumber: Dinas Kesehatan Kab, Banyumas

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah : TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Angka kesakitan DBD (IR DBD) di Jawa Tengah. Kondisi capaian DBD mengalami meningkat pada Tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2013 hal ini menunjukkan upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan , namun tidak demikian dengan HIV/AIDS pada Tahun 2017 mengalami penurunan penemuan kasus dibanding tahun 2013, namun masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang.

Sedangkan untuk kondisi penyakit tidak menular ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2017

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2014	NA	NA
2015	1,4	7,6
2016	1,4	7,7
2017*	2,9	12,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifitas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Kanker. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan hanya sekitar 30% cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan dan biasanya datang ke pelayanan kesehatan dalam stadium yang lanjut, dan selebihnya tidak menyadari jika dirinya menderita PTM

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program *Open Defacation Free (ODF)* atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bansos. Di kabupaten Banyumas yang merupakan Kecamatan ODF adalah Kecamatan Somagede, Lumbir, dan Wangon.

Angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli sebagai komponen IPM Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.24.
Komponen IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2016 dan 2017

No.	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		Pendidikan				Paritas Daya Beli (000)	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			
		2016	2017*	2016	2017*	2016	2017*	2016	2017*
1	Banyumas	73,23	73,42	7,39	13,21	7,39	7,52	10554	10737
2	Banjarnegara	73,69	73,98	6,26	12,22	6,26	6,36	7930	8649
3	Purbalingga	72,86	74,03	6,86	12,46	6,86	6,94	8938	9757
4	Cilacap	73,11	73,41	6,90	13,14	6,90	6,91	9677	9757
5	Kebumen	72,87	74,00	7,05	13,93	7,05	7,09	8276	8429
	Jawa Tengah	74,02	74,05	7,15	12,51	7,15	7,16	10153	10247

*Ket : * Angka Sementara*

Sumber: BPS - Bappeda Prov. Jateng Tahun 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari lima aspek yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan (5K) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

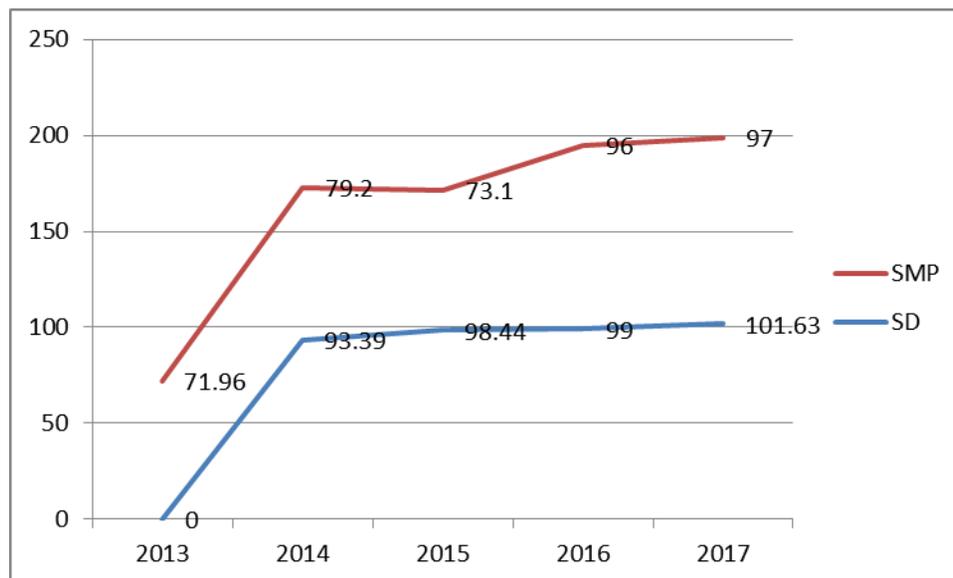
Capaian APS Pendidikan usia 7-12 tahun(SD/MI) dan APS pendidikan usia 13-15 Tahun (SMP/MTs) cenderung meningkat dan berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan antara lain telah memadai jumlah SD/MTs Capaian APS Kabupaten Banyumas dengan perbandingan Provinsi Jawa Tengah bisa digambarkan pada table dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.25.
APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

Provinsi/ Kabupaten	SD					SMP				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Banyumas	91.45	93.39	98.44	99	101,63	71.96	79.2	73.1	96	97

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Gambar 2.12.
Grafik APS Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017



b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Banyumas pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari 74,90% di tahun 2013 mencapai 77,23%. dimana lebih rendah dari target kinerja indikator pada tahun tersebut sebesar 81,32%. Pada jenjang pendidikan dasar APK SD/MI/Paket A telah mencapai 101,91% dimana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 106,03% dan APK SMP/MTs/Paket B cenderung mengalami kenaikan dari 96,26% menjadi 103,05%. Capaian Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.26.

Capaian Indikator Keterjangkauan Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK PAUD/TK	74,90	75,80	75,90	76,05	77,23
	APK SD/MI/Paket A (%)	106,03	101,47	108,63	101,81	101,91
	APK SMP/MTs/Paket B (%)	96,26	97,93	97,14	101,90	103,05

Nilai APK SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2017 melebihi 100 %. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan SD/MI dan SMP?MTs mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD/MI/Paket A Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat yaitu sebesar 91,16 mencapai 92,67 pada tahun 2016 namun menurun menjadi 92,57% di tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD di Kabupaten Banyumas hampir semuanya bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas cenderung meningkat dari tahun 2013 sebesar 70,73% menjadi 76,23% di tahun 2017.

Capaian Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.27.

Capaian Indikator Keterjangkauan Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	S Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2015	2016	2017
1	APM SD/MI/Paket A (%)	91,16	91,18	91,70	92,67	92,57
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	70,73	71,00	72,87	75,83	76,23

ber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas

d. Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana Sekolah adalah persentase ruang kelas kondisi bangunan untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu : 1) persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik, 2) Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik. Capaian indikator tersebut pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI sebesar 81,68% dimana kondisi cenderung meningkat dari 65,90 untuk tahun 2013, ruang kelas SMP/MTs sebesar 97,79%, juga cenderung meningkat dari capaian sebesar 93,36 pada tahun 2013. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28.

Capaian Indikator Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian Tahun Capaian Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ruang Kelas SD/MI Kondisi bangunan baik (%)	65,90	72,75	78,46	78,67	81,68
2	Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi bangunan baik (%)	93,36	87,81	97,51	97,57	97,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2017

e. Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs per kelas rata-rata di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 cenderung tidak ada perubahan atau nilainya sama, untuk Murid SD/MI dan SMP/MTs rata-rata 18

murid per 1 guru. Perkembangan kondisi Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29.

Capaian Indikator Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	19	18	18	18	18
2.	SMP/MTs	18	18	18	18	18

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

f. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,0004% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,0020% untuk jenjang SMP/MTs.

Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%. Angka Putus yang cukup tinggi dan cenderung meningkat memerlukan perhatian khusus agar mereka yang putus sekolah dapat kembali sekolah, mengikuti pendidikan non formal, atau bekerja, sehingga tidak membebani angka pengangguran. Perkembangan kondisi Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30.

Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APS SD/MI (%)	0,06	0,07	0,003	0,0003	0,0004
2.	APS SMP/MTs (%)	0,36	0,24	0,17	0,0015	0,0020

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

g. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 mencapai hampir semuanya 100%, Capaian indicator Angka Kelulusan bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 2.31.

Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
1.	Angka Kelulusan (AL)					
	AL SD/MI (%)	100	100	97,07	100,00	100,00
	AL SMP/MTs (%)	93,33	98,01	97,67	99,99	99,99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

h. Angka Melanjutkan

Prosentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan untuk SD/MI ke SMP/MTs dari 100% di tahun 2013 menjadi 104,39% di tahun 2017 sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 79,41% di tahun 2013 menjadi 92,47% di tahun 2017.

Tabel 2.32.

Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	102,18	104,39
	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	79,41	76,90	92,19	104,51	92,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

i. Kualitas Pendidik Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

Kualitas guru di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 51,77%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 94,48 %. Walaupun kualifikasi guru cenderung meningkat tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.

Capaian Indikator Kualitas Pendidik Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
1.	TK (Guru PAUD) (%)	23,42	29,51	29,51	48,19	51,77
2.	SD,SMP (Guru Dikdas) (%)	72,31	79,55	86,59	96.40	94,48

umber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Kinerja makro urusan kesehatan pada fokus pelayanan wajib antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, (Perawat, Bidan, Nutrision) cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan *universal child immunization*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas.

Rasio posyandu per satuan balita tahun 2017 naik dari tahun 2016 pada Posyandu Pratama, dan Posyandu Madya. Tahun 2016, rasio posyandu Pratama sebesar 6,28 naik menjadi 8,8 pada tahun 2017 dan posyandu madya tahun 2016 sebesar 29,5 naik menjadi 31,2 tahun 2017.

Posyandu purnama tahun 2016 sebesar 43,99 menurun menjadi 43,12 pada tahun 2017, rasio posyandu mandiri tahun 2016 sebesar 20,23 turun menjadi 16,83 pada tahun 2017. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu persatuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,67. Rasio rumah sakit per satuan penduduk ditahun 2017 sebesar 0,67 dimana dokter umum sebesar 522 orang. Jumlah tersebut belum ideal karena, 1 dr umum 40 melayani 100.000 penduduk, Idealnya 1 dokter melayani 2500 penduduk, kondisi banyumas dengan penduduk 2.040.877 membutuhkan 816 dokter.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk ditahun 2017 sebesar 2,67 dimana jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 3.308, terdiri dari Perawat 2163, bidan 890, farmasi 255. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sama dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 100%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2016 sebesar 100 % tahun 2017 tetap sebesar 100 %.

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* selama tahun 2013 - 2017 menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar 100%. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan selama lima tahun terakhir (2013 - 2017) menunjukkan angka yang membanggakan, yaitu sebesar 100%.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2016 sebesar 56,16% mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 100 % Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2017 sebesar 100 .Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama lima tahun menunjukkan angka cakupan 100%. Cakupan kunjungan bayi tahun 2016 sebesar 100 % dan capaian tahun 2017 tetap sebesar 100 %. Cakupan puskesmas selama tahun lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 144,40%.

Tabel 2.34.

Tabel Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017
pada Aspek Pelayanan Umum

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio posyandu per satuan balita :						
	2.1 Posyandu Pratama	%	7,2	6,56	5,44	6,28	8,8
	2.2 Posyandu Madya		30,1	32,52	32,88	29,5	31,2
	2.3 Posyandu Purnama		46,8	45,05	44,87	43,99	43,12
	2.4 Posyandu Mandiri		15,9	15,86	16,81	20,23	16,83
2.	Rasio Puskesmas, Rasio Poliklinik, Rasio Puskesmas pembantu (per satuan penduduk)	Rasio	0,06	0,06	0,06	0,58	0,67
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rasio dokter	Rasio	0,1	0,35	0,1	0,1	0,26
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,78	0,35	2,02	1,59	2,67
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,35	100	100	100	100
8.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Rasio	70,04	100	70	56,16	100
11.	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	Rasio	100	100	100	100	100
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
13.	Cakupan kunjungan bayi	%	97,62	98,2	100	100	100
14.	Cakupan puskesmas	%	72,87	72,18	71,52	57,90	57,33
15.	Cakupan puskesmas pembantu	%	72,87	72,18	71,52	57,90	57,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2017

2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)

Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 50,98%, 59,42%, 60,44%, 65,86% dan 71,03%. Namun jika dihitung berdasarkan panjang jalan kabupaten yang baru, mulai tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan kinerja panjang jalan dalam kondisi baik naik lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut jaringan jalan Kabupaten Banyumas memiliki panjang 1.508 km dari sebelumnya sepanjang 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak.

Selanjutnya kinerja pembangunan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang terus mengalami

peningkatan yaitu sebesar 51,11% pada tahun 2013, 55,88% pada tahun 2014, 59,56% pada tahun 2015, 69,76% pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 76,01%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha, terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,933 km.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum dan irigasi Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumber daya air berupa mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan/air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneng. Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 10 buah embung, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering.

Perkembangan kondisi jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35.
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten	804,784	804,784	804,784	804,784 / 1.508	804,784 / 1.508
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,98	59,42	60,44	65,86 / 30,28	71,03 / 34,96 /
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	26,70	15,06	15,39	6,71 / 21,42	11,34 / 20,95
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	22,32	25,52	24,17	27,43 / 48,30	17,63 / 44,09 /
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	620.933	620.933	620.933
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	51,11	55,88	59,56	69,76	76,01
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48,89	44,12	40,44	30,24	23,99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantaban kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

2.1.3.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Berdasarkan Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa angka *backlog* kepemilikan di Kabupaten Banyumas sejumlah 21.384 unit. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Kinerja indikator persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebesar 6,34%, persentase luasan kawasan kumuh tersebut masih lebih tinggi dari target *universal access* sebesar 0%.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 116,977 unit yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 70,54% pada tahun 2017. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 75,33%. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target *universal access* sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2019. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan perumahan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.

Perkembangan Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2017

No.	Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	225.000	277.902	303.139	311.596	322.466
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	55,08	63,78	67,97	68,91	70,54
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	39,39	56,20	66,72	68,15	75,33
4.	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%)	7,11	6,98	6,34	6,34	6,34
5.	Persentase rumah layak huni (%)	87,26	86,70	88,08	88,12	88,70

Sumber : Dinperkim Kab. Banyumas 2018

Secara umum terdapat gap yang cukup besar antara target indikator kinerja terkait pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh dalam RPJMD Kabupaten Banyumas dengan target universal access 100-0-100 RPJMN 2015-2019, dikarenakan target dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah disusun lebih dahulu dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Selain menjadi program prioritas pembangunan daerah, beberapa program nasional dan dana stimulan dari Pemerintah Provinsi terkait pembangunan air minum dan sanitasi didesain untuk dapat mendorong capaian target universal access. Program tersebut antara lain Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), hibah air minum, sanitasi berbasis masyarakat, dan sebagainya. Program-program tersebut memberi dukungan mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik. Dari sejumlah program tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengikuti program PPSP yang telah memfasilitasi Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2015, Program PAMSIMAS mulai tahun 2008 hingga Program PAMSIMAS III tahun 2016, dana stimulan pembangunan jamban (Pemerintah Provinsi), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta STBM. Selain program tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperoleh alokasi dana DAK untuk air minum dan sanitasi. Namun demikian berbagai peluang program tersebut belum mampu mempercepat capaian indikator pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut antara lain dikarenakan pembagian kewenangan pembangunan air minum dan sanitasi skala desa yang menjadi kewenangan desa sesuai Undang-Undang Desa, serta ketentuan berbadan hukum untuk penerima hibah dan bantuan sosial dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kinerja makro Ketentraman Ketertiban Umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per 10.000 penduduk, rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan, pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA, cakupan patroli petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, sistem Informasi Manajemen Pemda, dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Tabel 2.37.

Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	1,18	2,1	1,4	1,4	
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Orang	52.20	5720	6030	6030	9.974
3.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	53	53	53	53	
4.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Rasio	3000	3000	3000	3000	
5.	Penegakan PERDA		-	-			90

Data sementara Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas Tahun 2017

b. Perlindungan Masyarakat

Situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat relatif kondusif, bisa dilihat dari jumlah selesai kasus tindak pidana yang menunjukkan kecenderungan menurun namun masih termasuk kategori tinggi. Jumlah Selesai Kasus Tindak Pidana (Kasus) Tahun 2013 sebanyak 393 dengan kasus 460 kasus (85,43%) . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian sangat optimal dalam menekan kasus-kasus tindak pidana. Terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 43 kali dan tahun 2015 naik menjadi 61 kali namun tahun 2015 turun menjadi 54 kali dan tahun 2017 turun kembali menjadi 47 kali. Lebih jelas terkait dengan capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tindak pidana (<i>crime total</i>) Angka kriminalitas (kasus)	465	380	506	521	599
2.	Jumlah Selesai Kasus Tindak Pidana (Kasus)	393	309	282	311	377
3.	Jumlah unjuk rasa (kali)	43	45	61	54	47
4.	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang)	1.315.267	1.315.267	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
5.	Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu.	919.119	968.266	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
6.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8	4	1	7	10
7.	Kegiatan pembinaan politik daerah	27	11	1	11	2
8.	Jumlah LSM Yang Aktif	56	29	43	74	113

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab . Banyumas, 2017

2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam kurun waktu 2013-2017, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami penurunan jumlah meliputi: Anak Balita Terlantar pada tahun 2013 sebanyak 425 balita turun menjadi 244 balita pada tahun 2017; Anak Terlantar pada tahun 2013 sebanyak 1.100 anak turun menjadi 1.030 anak pada tahun 2017; Anak Nakal pada tahun 2013 sebanyak 105 anak turun menjadi 57 anak pada tahun 2017; Anak Cacat pada tahun 2013 sebanyak 2.230 anak turun menjadi 1.252 anak pada tahun 2017; Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tahun pada 2013 sebanyak 4.817 orang turun menjadi 3.389 orang pada tahun 2017; Wanita Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2013 sebanyak 12 orang turun menjadi 4 orang pada tahun 2017

Jumlah Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2013 sebanyak 4.010 orang turun menjadi 3.974 orang pada tahun 2017; Penyandang Cacat pada tahun 2013 sebanyak 7.407 orang turun menjadi 5.288 orang pada tahun 2017; jumlah tuna susila mengalami kenaikan dari jumlah 194 orang pada tahun 2013 menjadi 238 orang di tahun 2017. jumlah pengemis pada tahun 2013 sebanyak 219 orang dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi

139 orang. Gelandangan pada tahun 2013 sebanyak 260 orang turun menjadi 20 orang pada tahun 2017, jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2013 sebanyak 240 orang dan mengalami penurunan menjadi 17 orang di tahun 2017, jumlah Korban Bencana Alam pada tahun 2013 sebanyak 1.728 orang dan menurun pada tahun 2017 menjadi 204 orang, jumlah Komunitas Adat Terpencil dari tahun 2013 sampai 2016 jumlahnya tetap dan di tahun 2017 berkurang menjadi 1, jumlah Pemulung mengalami peningkatan yang cukup banyak dari 81 orang di tahun 2013 menjadi 464 orang di tahun 2017, jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mengalami penurunan dengan jumlah 10 aorang menjadi 3 orang di tahun 2017, jumlah Korban Trafficking mengalami kenaikan dari 0 atau tidak ada menjadi 7 dan 6 di tahun 2014 dan 2016 dan mengalami penurunan lagi menjadi 0 orang atau tidak ada lagi trafficking di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017.

Perkembangan jumlah PMKS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39.
Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Jumlah PMKS	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	425	425	221	221	244
2	Anak terlantar	1.100	880	895	895	1030
3	Anak nakal	105	31	29	29	57
4	Anak jalanan	95	97	93	93	61
5	Anak cacat	2.230	1346	1310	1310	1252
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	4.817	2797	2686	2686	3389
7	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	12	-	5	5	4
8	Lanjut Usia terlantar	4.010	2524	2623	2623	3974
9	Penyandang Cacat	7.407	5098	5116	5116	5288
10	Tuna Susila	194	220	220	220	238
11	Pengemis	219	142	140	140	139
12	Gelandangan	260	19	20	20	20
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	240	30	29	29	17
14	Korban Bencana Alam	1.728	135	148	148	204
15	Komunitas Adat Terpencil	2	2	2	2	1
16	Pemulung	81	387	389	389	464
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	10	4	4	4	3
18	Korban Trafficking	0	7	6	6	0

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 23 panti yang semula pada tahun 2013 berjumlah 15 panti. Penanganan kasus

penyandang masalah sosial sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 60%. Kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Penanganan bencana alam di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 semuanya tertangani dengan baik, dimana penanganan korban bencana alam yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 576 KK dapat tertangani semua, dengan demikian dapat diketahui bahwa penanganan korban bencana alam telah dilakukan secara optimal.

Tabel 2.40.
Kinerja Penanganan PMKS dan Korban Bencana
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	15	15	15	15	15	23

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

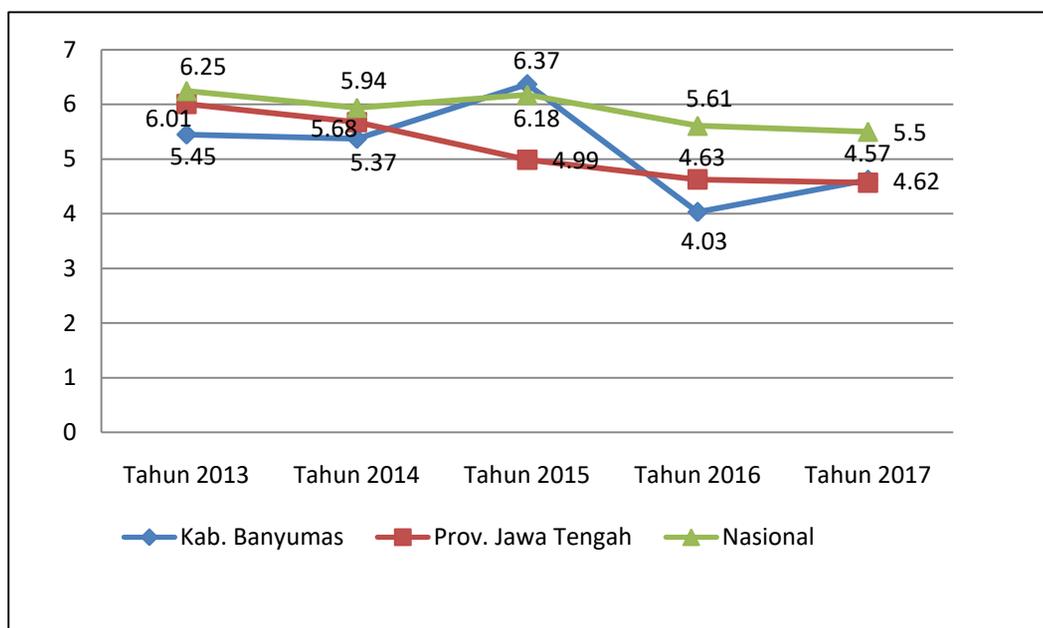
2.1.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Angka partisipasi angkatan kerja tahun 2013 mencapai 765.216 orang, meningkat pada tahun 2014 mencapai 779.804 orang, tahun 2015 menurun menjadi 740.512 orang, meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 781.896 orang dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 823.279 orang. Kasus angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, tahun 2013-2014 mencapai 0,58 kasus, menurun tahun 2015-2016 mencapai 0,48 kasus, meningkat tahun 2017 menjadi 5 kasus. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perkembangan fluktuatif tiap tahunnya tahun 2013 mencapai 63,95%, meningkat pada tahun 2014 mencapai 64,27%, menurun pada tahun 2015 menjadi 60,17%, meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 62,68% dan pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 65,19%. Tingkat pengangguran terbuka mengalami perkembangan fluktuatif tahun 2013 mencapai 5,45%, menurun pada tahun 2014 menjadi 5,37%, meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 6,37%, pada tahun 2016 menurun menjadi 5,50 dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 4,62%. Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh perlindungan sosial) tahun 2013 mencapai 23.496 orang, meningkat tahun 2014 mencapai 39.05 orang dan tahun 2015-2016 menurun mencapai 23,36 orang. Data kasus kecelakaan kerja di perusahaan tercatat tahun 2013-2016 mencapai

52 orang, menurun pada pada tahun 2017 menjadi 50 orang. Untuk perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah sejak tahun 2013-2016 tidak ada. Upah minimum Kabupaten Banyumas tahun 2013-2014 mencapai Rp. 1.000.000 rupiah, meningkat tahun 2015 mencapai Rp. 1.100.000 rupiah, tahun 2016 meningkat kembali mencapai Rp. 1.300.000 rupaih dan tahun 2017 meningkat kembali mencapai Rp. 1.461.600 rupiah.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Banyumas mengalami perkembangan pluktuatif, kondisinya lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Banyumnas tahun 2013 sebesar 5,45%, menurun menjadi 5,37 pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6,37%, menurun kembali pada tahun 2016 menjadi 4,03% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 4,62%. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja.

Tabel 2.41.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2017

Pada Tabel 2.13. Penduduk Banyumas usia 15 tahun ke atas tahun 2017 yang termasuk angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, terbanyak adalah lulusan SD sebanyak 401.466 orang (48,76%), urutan kedua SMTP sebanyak 150.988 orang (18,34%) dan ketiga SMTA Kejuruan sebanyak 110.663 orang (13,44%).

Tabel 2.42.
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017
(Orang)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
Maksimum SD	434.145	418.216	376.192	397.204	401.466
SMTA	153.776	164.518	133.634	149.076	150.988
SMTA Umum	64.919	70.669	62.308	66.489	72.994
SMTA Kejuruan	64.797	76.309	100.858	88.584	110.663
Diploma	15.599	14.554	21.659	18.107	22.140
Universitas	31.980	35.538	45.861	40.700	65.028
Jumlah	765.216	779.804	740.512	760.158	823.279

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

Kinerja makro urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43.
Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	765.216	779.804	740.512	781.896	823.279
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	0,58	0,58	0,48	0,48	5
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,95	64,27	60,17	62,68	65,19
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,45	5,37	6,37	5,50	4,62
5.	Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh perlindungan sosial)	Orang	23.495	39,05	23,36	23,36	0
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0
7.	Upah minimum Kabupaten Banyumas	Rupiah	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.461.400

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kab. Banyumas, 2017.

2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 sebesar 86,6 lebih rendah dari Jawa Tengah

sebesar 92,1. IDG Kabupaten Banyumas sebesar 67,37. Nilai IPG yang masih rendah disebabkan antara lain rata-rata melek huruf, lama sekolah dan sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah daripada laki-laki. Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam peningkatan IDG, antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, di Kabupaten Banyumas banyak terjadi kasus KDRT, dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2017 jumlah KDRT dan anak korban kekerasan sebanyak 71 orang korban kekerasan di Kabupaten Banyumas, telah diupayakan seoptimal mungkin penanganannya setidaknya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit. Penanganan pengaduan maupun penanganan kesehatan terhadap korban kekerasan juga sudah optimal, cakupan layanan rehabilitasi sosial telah mencapai 100%, jumlah *focal point gender* SKPD yang terbentuk sudah mencapai 28 unit dan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 telah mencapai 63,3%, sedangkan prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (PNS PEMDA) sebesar 48,83%.

Gambaran kondisi dan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja PP dan PA Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	
2.	Jumlah anak korban kekerasan (Anak)	53	44	70	72	
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT diRS(%)	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu. (unit)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)	27	27	27	27	27
7.	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	18	18	18	18	18

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Adapun capaian indikator RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.45.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	44	44	48,81	48,81	48,83
2	Rasio KDRT	0,0056	0,0037	0,037	0,0041	0,0019
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	43,38	46,30	42,57	46,72	50,86
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)	18	18	18	18	18

2.1.3.2.3 Urusan Pangan

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten Banyumas telah melakukan regulasi ketahanan pangan. Berdasarkan analisis neraca bahan pangan, ketersediaan energi dan protein perkapita

(kkal/kap/hari) di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 ketersediaan energi dan protein mencapai 85%, meningkat pada tahun 2014 mencapai 86%, pada tahun 2015 meningkat kembali mencapai 87%, meningkat pada tahun 2016 mencapai 89% dan pada tahun 2017 meningkat kembali ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Banyumas mencapai 91%.

Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2015 mencapai 60%, meningkat pada tahun 2016 mencapai 65% dan pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 70%. Untuk ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal pada tahun 2013-2015 mencapai 90% meningkat pada tahun 2016-2017 menjadi 95%. Stabilitas harga dan pasokan pangan kurun waktu tahun 2013-2015 mencapai 90% meningkat pada tahun 2016 mencapai 92% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 95%. Skor pangan harapan kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tahun 2013 mencapai 89,80%, tahun 2014-2016 mencapai 90% dan pada tahun 2017 menjadi 90,01%. Untuk pengawasan dan pembinaan pangan pada tahun 2014-2015 mencapai 70%, menurun pada tahun 2016 mencapai 62% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 70%.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas dikembangkan desa mandiri pangan di desa tersebut dikembangkan pula lumbung pangan masyarakat, sehingga penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 59%, meningkat pada tahun 2014-2015 mencapai 60% dan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 62%. Capaian kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	85,00	86,00	87,00	89,00	91,00
2.	Penguatan cadangan pangan (%)	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00
3.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90,00	90,00	90,00	92,00	95,00
5.	Skor pola pangan harapan (%)	89,80	90,00	90,00	90,00	90,01
6.	Pengawasan dan pembinaan	-	70,00	70,00	67,00	70,00

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pangan (%)					
7.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	59,00	60,00	60,00	62,00	62,00

Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab.Banyumas, 2017.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Kinerja makro urusan Pertanahan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Pensertifikatan tanah sangat penting untuk menunjukkan kepemilikan tanah. Besarnya persentase luas lahan bersertifikat dapat dilihat dari luas lahan bersertifikat dibandingkan dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat. Pada Tahun 2016 di Kabupaten Banyumas luas lahan yang bersertifikat seluas 108.941,69 ha, dan lahan belum bersertifikat seluas 23,818 ha, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini baru mencapai sebesar 82,44%. Berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) di Kabupaten Banyumas tidak terjadi kasus sengketa tanah.

Terkait dengan perizinan lokasi, penyelesaian izin lokasi diperoleh dari jumlah Izin Lokasi dibandingkan dengan Permohonan Izin Lokasi. Pada tahun 2016 di Kabupaten Banyumas terdapat Permohonan Izin Lokasi sebanyak 3 izin sedangkan yang diterbitkan sebanyak 3 izin, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100%. Perkembangan capaian kinerja pembangunan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47.

Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2016

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persertifikatan tanah					
	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	76,93	81,68	82,06	82,44	82,44
2.	Izin Lokasi					
	Jumlah Permohonan Ijin Lokasi	4	2	16	3	3
	Penyelesaian ijin lokasi	4	2	16	3	3
	Prosentase ijin lokasi	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas .(*angka sementara)
tambah data tahun 2017

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu Penegakan hukum lingkungan (%), Pelayanan

pencegahan pencemaran air (%), pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%), Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (dokumen), Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan /tanah untuk produksi biomasa (%), Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan lahan kritis (Ha), rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, persentase penanganan sampah (%), dan persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB (%).

Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: pelayanan pencegahan pencemaran air; pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup juga harus memperhatikan target-target yang ada dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Secara rinci kondisi capaian SPM bidang lingkungan hidup tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	92,5	100	100	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	47,5	100	100	100	100
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	36	36	42	44
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%).	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas, 2018

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan masyarakat meningkatkan beban terhadap daya dukung lingkungan. Ancaman pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, dengan penambahan jumlah kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

Hal lain yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja makro urusan lingkungan hidup yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merupakan salah satu elemen ruang di dalam kawasan perkotaan yang dibutuhkan bagi berbagai kepentingan. Secara ekologis RTH berfungsi sebagai pembentuk iklim mikro perkotaan dan secara sosiologis berfungsi bagi interaksi dan rekreasi penduduk perkotaan. Selain fungsi ekologis dan sosiologis di atas, RTH merupakan salah satu elemen dalam perancangan perkotaan yang memiliki nilai keindahan dan pembentuk kawasan perkotaan itu sendiri. Wolch et al. (2014) mengatakan bahwa ruang terbuka hijau atau Green Space seperti taman kota, hutan kota, taman atap, daerah aliran sungai, dan taman lingkungan memberikan layanan ekosistem yang penting. Hal senada diungkapkan pula oleh Fandeli (2000), bahwa RTH merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

Untuk wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Namun demikian prosentasenya masih dibawah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang yang mengamanatkan prosentase RTH perkotaan sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk keberlanjutan fungsi wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas karena fungsi ekologi dan sosial RTH sangat dibutuhkan oleh wilayah perkotaan.

Untuk sektor persampahan, berdasarkan target akhir RPJMD rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sampai dengan 2017 sebesar 6,3 memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2018. Berdasarkan target akhir RPJMD persentase penanganan sampah sampai dengan 2017 memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2018.

Kinerja makro urusan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.49.
Kinerja Urusan Lingkungan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
2.	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL (Dokumen)	825	1.096	1.452	1.739	1.507
3.	Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan atau lahan kritis (Ha)	125,85	75	60	68	68
4.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	36	40	42	44
5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	0,52	0,55	0,55	6,3
6.	Persentase penanganan sampah (%)	13,25	13,25	13,78	14,07	54
7.	Persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	9,92	10,77	11,83	11,83	11,83

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2017

2.1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran sangat penting. Hal ini dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan lain kepada masyarakat. Dengan demikian tuntutan dan harapan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil semakin besar.

Kinerja pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banyumas belum terwujud secara optimal meskipun terdapat kecenderungan untuk terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja pelayanan KTP, KK maupun akte kelahiran yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan KTP pada tahun 2017 telah mencapai 81,55% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.527.297 orang. Capaian kinerja pelayanan tersebut sebesar 80,66%, dan target kinerja akhir tahun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 80,76%.

Pada tahun 2017 prosentase penduduk yang memiliki akte sebesar 100%. Angka tersebut menunjukkan target kinerja pelayanan akte kelahiran pada tahun 2017 sebesar 89% telah tercapai. Namun demikian pelayanan akte kelahiran masih perlu ditingkatkan karena meskipun pelayanan

tersebut gratis bagi sebagian masyarakat terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten memiliki akte kelahiran memerlukan biaya tinggi. Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Hingga tahun 2017 prosentase kepemilikan KK telah mencapai 94,85% dari total jumlah KK sebanyak 655.515.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Banyumas mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Sementara itu untuk pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Banyumas baru dimulai pada tahun 2012. Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

selengkapnya perkembangan pelaksanaan Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50.
Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk yang wajib KTP	1.466.810	1.493.040	1.503.425	1.527.297	
	Persentase Kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	80,52	81,09	80	80,02	81,55
2.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	56	73,1	84	84	89,01
3.	Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	27 Kec	27 Kec	27 Kec	27 Kec	27 Kec
4.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
5.	Jumlah Keluarga (KK)	622.151	633.989	643.923	655.515	655.515
6.	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)	92,81	93,55	94,86	94,85	94,85
7.	Rasio Lulusan :					
	S1	42.812	44.377	47.936	47.936	47.936
	S2	2.883	2.982	3.203	3.203	3.203
	S3	298	332	343	343	343

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
8.	Raso Ketergantungan (%)	-	-			

Sumber : *Dinpendukcapil Kab. Banyumas, 2017*

2.1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, LPM berprestasi, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. Jumlah LSM selama tahun 2010 - 2015 menunjukkan peningkatan, tahun 2010 sebanyak 80 LSM, menjadi 29 pada tahun 2014. Jumlah swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat juga terjadi peningkatan yang signifikan dari Rp. 2.947.897 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 16.967.000.000 pada tahun 2015.

Tabel 2.51.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		36,81	37,21	37,43	37,43	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		113,6	135,36	111,4	111,4	54
3.	Jumlah LSM	Unit	161/56	29	29	29	136
4.	LPM Berprestasi	Unit	0,9063	0,3021	0,3021	0,3021	1,81
5.	PKK aktif	Unit	7.746		67,01	67,01	100
6.	Posyandu aktif	Unit	2.499	2.515	2.515	2.515	100
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Ribuan Rupiah	6.160.000	16.960.000	16.967.000	16.967.000	3.393.000
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Program	4	4	4	4	80

Sumber : *Dinsospermades Kabupaten Banyumas Tahun 2017*

2.1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2017 meliputi rasio akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, prosentase cakupan peserta KB aktif, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di samping indikator tersebut terdapat indikator lain untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Capaian kinerjanya indikator-indikator tersebut pada tahun 2017 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,2	2,25	2,17	2,17	2,30
2.	Rasio Aseptor KB	74,24	73,2	73,22	78,02	78,59
3.	Jumlah peserta KB aktif	250.867	248.138	233.125	253.095	254.357
4.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,34	73,2	75,5	78,02	78,59
5.	Jumlah peserta KB baru	56.318	48.208	45.018	41.186	41.100
6.	<i>Unmetneed</i> KB	46,24	49.625	37.386	32.439	33.662
7.	Persentase <i>Drop Out</i> (DO) KB	17,48	17,03	21,98	10,1	14,87
8.	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	83,49	74,72	44,92	40,71	42,03
9.	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)	2,75	2,8	2,69	2,09	2,76
10.	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)	1	1	1	1	1
11.	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)	23,35	22,5	20,89	20,68	20,50
12.	Persentase keluarga Pra Sejahtera I (%)	19,6	19,77	17,95	18,43	18,20
13.	Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)	1,21	1,72	1,72	1,72	1,21
14.	Jumlah PIK	54	50	56	63	63
15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80,35	83,3	58,04	79,05	79,81

Sumber : DPPKBP3A Kab. Banyumas, 2017

Berdasarkan tabel tersebut cakupan PUS yang telah menjadi peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 78,59 % mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,57 %. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 254.357 orang naik 1.262 dari tahun 2017.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukan rasio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Rasio PLKB dengan desa / Kelurahan di tahun 2017 adalah 2,76 artinya 1 PLKB mendampingi 2 – 3 Desa/kelurahan, Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

2.1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kecelakaan lalu lintas.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang urusan perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pencapaian sasaran pembangunan perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari tahun 2013-2017 ditunjukkan able berikut:

Tabel 2.53.
Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (unit) :					
	• Rambu Lalu Lintas (unit)	2.427	3.114	3.968	4.290	4.533
	• Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)	289	351	401	421	421
	• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)	51	56	56	58	59
	• Warning Lamp (unit)	95	125	118	149	153
	• Marka Jalan (m2)	10.557	15.540	15.540	15.540	29.970

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018

Jumlah sarana prasarana perhubungan terus bertambah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana perhubungan di lapangan, apalagi dengan penambahan panjang jalan kabupaten.

Dari aspek kelaikan kendaraan Pemerintah Kabupaten Banyumas hanya memiliki 1 tempat pengujian kendaraan. Jumlah ini tidak memadai

jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang (wajib diuji) di wilayah Kabupaten Banyumas.

Jumlah penumpang angkutan umum, baik Bus AKAP, Bus AKDP, Mikrobus, maupun Angkota/angkudes semakin menurun dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan banyaknya pilihan moda transportasi, semakin meningkatnya infrastruktur jalan, dan kemudahan kepemilikan kendaraan. Peningkatan daya beli masyarakat menjadikan tuntutan peningkatan pelayanan dan kenyamanan angkutan transportasi, sementara beberapa angkutan umum tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunaannya. Hal ini terlihat dari penurunan trayek Bus AKAP, Bus AKDP, dan Mikrobus yang terus mengalami penurunan. Sementara itu trayek AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi) mengalami peningkatan. Sementara itu fenomena perkembangan transportasi online perlu diantisipasi pemerintah Kabupaten Banyumas agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat seperti yang terjadi di daerah lain.

Angkutan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan kenaikan jumlah untuk jenis mobil penumpang umum, bus, mobil barang, maupun mobil gandengan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.54.

Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penumpang angkutan umum (orang)					
	Bus AKAP	2.921.580	1.669.650	1.629.635	2.802.568	2.688.073
	Bus AKDP	3.654.201	2.059.964	2.055.961	1.393.122	1.380.106
	Mikrobus	4.501.250	3.007.140	3.002.143	2.240.150	2.170.452
	Angkota/Angkudes	1.834.560	1.208.571	1.200.572	1.185.413	1.303.104
2	Jumlah trayek angkutan umum (unit)					
	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	675	589	589	570	570
	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	47	52	52	70	70
	AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)	54	85	85	90	90
	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)	6	16	16	16	16
	Angkutan Kota	344	344	344	344	344
	Angkutan Desa	506	506	506	506	506
	Taksi	120	120	120	170	170
3	Rasio ijin trayek	0,044	0,044	0,001	0,056	0,064
4	Jumlah angkutan wisata (unit)	54	102	102	104	104

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	11.212	11.764	11.479	13.486	13.199
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum :					
	Mobil penumpang umum	237	245	250	167	321
	Mobil Bus	3.206	3.213	3.310	1.770	3.217
	Mobil Barang	2.442	3.699	3.699	11.428	22.719
	Mobil Gandengan	225	227	243	63	186

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Media massa sebagai salah satu alat penyebaran informasi kepada masyarakat luas juga banyak beredar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan jumlah penduduk cukup besar, Kabupaten Banyumas merupakan pasar yang sangat baik bagi perkembangan media massa. Media massa di Kabupaten Banyumas terdiri atas media cetak dan elektronik yang masing-masing ada yang berskala nasional dan lokal. Perkembangan media masa surat kabar di Kabupaten banyumas tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 stabil, jumlah surat kabar nasional sebanyak 19 surat kabar dan surat kabar lokal sebanyak 5 surat kabar.

Jumlah warnet terhadap penduduk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara umum mengalami penurunan dari 141 warnet menjadi 135 warnet. Demikian pula media komunikasi wartel sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 secara umum juga mengalami penurunan dari sebanyak 20 wartel menjadi 17 wartel. Hal ini disebabkan makin meningkatnya layanan internet rumah dan handphone yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam penggunaannya.

Tabel 2.55.

Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	8	8	8	8	8
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (rasio)	20 141	17 135	17 135	17 135	17 135
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit)	19 5	19 5	19 5	19 5	19 5
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	14 1	14 1	14 1	14 1	14 2
5	Jumlah TV Nasional (unit)	7	7	7	7	13
6	Web site milik pemerintah daerah (unit)	1	1	1	1	55

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Di Kabupaten Banyumas jumlah koperasi menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2013-2017, dari sebanyak 522 unit pada tahun 2013 meningkat menjadi 527 pada tahun 2014, pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 544 unit dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 546 unit. Perkembangan persentase koperasi aktif dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuatif dari 75,48% pada tahun 2013 menjadi 75,90% pada tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 76,72% dan pada tahun 2016 meningkat kembali mejadi 77,02% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 75,82%. Sedangkan untuk perkembangan koperasi kategori sehat menunjukkan perkembangan fluktuatif, untuk koperasi kategori sehat dan tidaksehat kategori koperasi sehat tahun 2013 mencapai 51,24%, menurun menjadi 34,16% pada tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat menjadi 35,38 %, pada tahun 2016 menurun kembali menjadi 32,54% dan tahun 2017 menurun mencapai 29,12%%. Sedangkan koperasi kategori tidak sehat tahun 2013 mencapai 48,76%, tahun 2014 meningkat mencapai 65,84%, menurun tahun 2015 mencapai 64,62%, meningkat tahun 2016 mencapai 67,46% dan meningkat kembali tahun 2017 mencapai 70,88%. Adanya perkembangan kinerja koperasi fluktuatif selama kurun waktu lima tahun tersebut diperlukan semangat yang tinggi masyarakat Banyumas untuk berkoperasi. Secara jelas perkembangan Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56.
Kinerja Makro Koperasi Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi	Unit	522	527	537	544	546
2.	Persentase koperasi aktif	%	75,48	75,90	76,72	77,02	75,82
3.	Koperasi Kategori Sehat	%	51,24	34,16	35,38	32,54	29,12
4.	Koperasi Kategori tidak Sehat	%	48,76	65,84	64,62	67,46	70,88

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kab. Banyumas, 2018.

Berdasarkan data pemerintah, hingga 5 Juli 2017, Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi. Meskipun mengalami pertumbuhan, kualitas keaktifan koperasi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Relatif berimbangnya persentase koperasi yang

sehat dan yang tidak sehat menjadi sinyal pentingnya faktor pengembangan koperasi diperhatikan. Peremajaan kembali koperasi dalam komitmen menjadi penting dalam memaknai koperasi sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan diri sendiri dan untuk kepentingan bersama, sehingga terwujud kedaulatan ekonomi dalam lingkup kabupaten.

Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Dalam hal ini pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas mencapai sebanyak 66.533 unit dengan tenaga kerja yang mampu terserap mencapai sebanyak 95.719 orang, terjadi peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 66.605 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 95.835 orang dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 66.689 unit dengan tenaga kerja sebanyak 95.955 orang. Rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMKM masih dipasarkan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMKM masih kecil. Jumlah unit usaha yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 5.419 unit, adanya program Pemerintah dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2015-2016 UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan meningkat menjadi sebanyak 7.184 unit. UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas diketahui bahwa saat ini yang memperoleh fasilitasi permodalan usaha sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 10,77 %.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemasaran produk UMKM. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Banyumas masih sangat diperlukan. Perkembangan UMKM dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57.
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	581.642	66.533	66.605	66.689	66.689
2.	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)	876.668	95.719	95.835	95.955	95.955
3.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki ijin usaha (unit)	6.475	6.580	6.656	6.720	6.720
4.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)	6.556	7.184	7.184	7.184	7.184

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kab. Banyumas, 2017.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2013 mengacu pada kriteria jumlah UMKM yang didalamnya termasuk petani, sedangkan sesuai dengan ketentuan dan atau kriteria yang diacu pada tahun 2014-2017 tidak termasuk pada mata pencaharian petani, dengan demikian untuk data jumlah UMKM pada tahun 2014-2017 tidak mengikutkan data petani. Pertumbuhan UMKM selama 2014-2017 cukup signifikan, trend yang positif ini mengindikasikan semakin membaiknya iklim bisnis/usaha di Kabupaten Banyumas menurut persepsi pelaku usaha UMKM. Iklim bisnis

ini tentu tidak bisa dilepaskan dari lingkup makro baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa determinan yang menentukan iklim usaha adalah adanya kepastian hukum. Semakin mudahnya informasi mengenai perijinan usaha serta pengurusannya mendorong terciptanya iklim bisnis yang menguntungkan.

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas. Jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013 – 2017 mengalami perkembangan fluktuatif peningkatan. Tahun 2013 tercatat 611 investor, meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.123 investor, tahun 2015 meningkat kembali menjadi 1.123 investor, menurun pada tahun 2015 menjadi 1.041 investor dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 6.132 investor.

Nilai investasi kurun waktu 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Tahun 2013 nilai investasi mencapai Rp 589.016.435.717,- menurun pada tahun 2014 menjadi Rp 360.321.440.329,- meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.738.891.750.025,- dan pada tahun 2017 nilai investasi kembali menurun menjadi Rp. 575.834.857.959,-.

Tenaga kerja yang terserap mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2013 tenaga kerja yang terserap 7.304 orang, meningkat pada tahun 2014 menjadi 8.461 orang, meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 13.518 orang, pada tahun 2016 menurun menjadi 12.683 orang dan pada tahun 2017 tenaga kerja terserap menurun kembali menjadi 7.782 orang. Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi, di Kabupaten Banyumas telah dikembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP). Sampai dengan tahun 2013 BPMPP melayani dan memproses 34 jenis perizinan. Tigapuluh empat jenis perizinan tersebut meliputi : (1) Izin Gangguan (HO); (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (3) Izin Usaha Perdagangan (IUP); (4) Izin Usaha Industri (IUI); (5) Tanda Daftar Perusahaan; (6) Tanda Daftar Industri; (7) Tanda Daftar Gudang; (8) Izin

Tempat Menjual Penggunaan Tanah Kekayaan Pemda; (11) Izin Usaha Jasa Konstruksi; (12) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah; (13) Izin Bahan Galian Golongan C; (14) Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan; (15) Izin Usaha Rumah Makan; (16) Izin Usaha Salon; (17) Izin Usaha Perjalanan Wisata; (18) Izin Usaha Angkutan; (19) Izin Reklame/Pajak Reklame; (20) Izin Lokasi; (21) Izin Usaha Pasar Modern; (22) Persetujuan Prinsip dan Pendirian SPBU; (23) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel; (24) Persetujuan Prinsip dan Izin URHU; (34) .. dst. Namun jenis retribusi yang dilayani DPMPTSP sebanyak 4 buah perizinan yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO); Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol dan Izin Penggunaan Tanah Kekayaan Pemda. Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal
Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah investor (PMDN/PMA)	611	927	1.123	1.041	6.132
2.	Jumlah investasi (Rp)	589.016.435.717	360.321.440.329	609.535.145.592	2.738.891.750.025	575.834.857.959
3.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	7.304	8.461	13.518	12.683	7.782
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	12	9,13	12,04	12,18	7,88
5.	Lama proses perizinan (hari)	14	14	1-10	1-10	1-7
6.	Jumlah jenis retribusi yang dilayani BPMMP (jenis)	4	4	4	4	3

Sumber : DPMPTSP Kab. Banyumas, 2017.

Kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyumas menentukan daya saing Kabupaten Banyumas. Dari data lima tahunan (2013-2017) di atas menunjukkan *volatilitas* pola investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas. Meskipun secara besaran dana mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dari jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas yang semakin kompetitif, atau semakin menarik bagi investor-

investor besar. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kab. Banyumas sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari 1-10 hari pada tahun 2016 menjadi 1-7 hari pada tahun 2017. Saat ini seluruh daerah sedang menyederhanakan proses perizinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat. Menurut survei yang dilakukan BKPM pada tahun 2014, dari 20 *nominee* tingkat kabupaten untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hanya tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang masuk nominasi, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur. Sejak tahun 2015-2016 Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan PTSP, sehingga pengurusan perizinan semakin singkat dan cepat dari 1-10 hari menjadi 1-7 hari pada tahun 2017.

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kondisi pembangunan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 organisasi kepemudaan yang terdiri dari organisasi kesiswaan (OSIS) organisasi mahasiswa (BEM), organisasi KNPI dan organisasi kepramukaan, untuk jumlah organisasi kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah/OSIS) tahun 2013-2017 tetap sebanyak 304 buah. Organisasi kesiswaan seluruhnya telah mendapat pembinaan dari pemerintah. Jumlah organisasi mahasiswa (BEM) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tercatat 10 buah. Tahun 2015-2016 bertambah menjadi 11 buah organisasi mahasiswa tersebut semuanya telah mendapat pembinaan. Untuk perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2017 hanya ada satu perwakilan dan telah mendapatkan pembinaan setiap tahunnya. Jumlah organisasi kepramukaan (gudep) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tetap berjumlah 2.606 gudep dan setiap tahunnya telah mendapat pembinaan.

Pembangunan di bidang olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tercatat sebanyak 202 buah. Fasilitas olahraga berupa prasarana lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, untuk jumlah lapangan olahraga tercatat pada tahun 2013 tercatat 540 buah, bertambah pada tahun 2015-2017 menjadi 540 buah.

Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga dan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.59.
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian kinerja setiap tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	unit	115	115	116	143	143
	Organisasi kesiswaan (OSIS)	unit	304	304	304	304	304
	Organisasi Mahasiswa (BEM)	unit	10	10	11	11	11
	Organisasi KNPI	unit	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan	gudep	2.606	2.606	2.606	2.060	2.060
2.	Jumlah organisasi pemuda yang telah dibina						
	Organisasi kesiswaan (OSIS)	unit	304	304	304	304	304
	Organisasi mahasiswa (BEM)	unit	10	10	11	11	11
	Organisasi KNPI	unit	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan	gudep	2.606	2.606	2.606	2.606	2.606
3.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	202	202	202	202	202
4.	Jumlah lapangan olahraga	lapangan	540	540	657	657	657

Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2017.

2.1.3.2.14 Urusan Ststistik

Urusan Ststistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Kebutuhan akan data statistik senantiasa dilakukan *update* setiap tahunnya, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah, data ini telah dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Banyumas (www.banyumaskab.go.id). Adapun penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten adalah adalah statistik sektoral. Ketersediaan data statistik dasar dan khusus disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, meliputi Kabupaten Banyumas Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat diperoleh pada website <http://banyumaskab.bps.go.id/>

Kinerja makro urusan statistik dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.60.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokumen "Kabupaten Dalam Angka"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Dokumen "PDRB Kabupaten"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Dokumen "Nilai Tukar Petani"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Dokumen "Kecamatan Dalam Angka"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Dokumen Indek Gini Ratio	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kab . Banyumas, 2017

2.1.3.2.15 Urusan Persandian

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian memegang peran yang penting dalam upaya pengamanan informasi pemerintah. Meskipun era keterbukaan informasi berjalan, ada unsur-unsur pemerintahan terkait jenis informasi rahasia, pengembangan kapasitas SDM persandian yang telah berjalan, namun belum bisa dijabarkan.

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan pelik terus menerus eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor pendorong yang dianggap melatarbelakangi semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal yang ada adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas

mengantisipasi permasalahan yang muncul tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan melakukan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun antara lain menampilkan pagelaran kesenian *buncis karawitan, calung dan macapat*, serta beberapa kebudayaan lain seperti *wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan*. Tahun 2012 tercatat lima kali festival seni dan budaya, tahun 2013 tercatat tujuh kali, tahun 2014 dan tahun 2015 tercatat sembilan kali. Namun tahun 2016 menurun menjadi lima kali festival seni dan budaya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekspresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdapat tiga unit. Tahun 2015 bertambah menjadi lima unit, dan tahun 2016 sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya menjadi enam unit.

Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Hingga tahun 2016 tercatat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/ konservasi.

Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Jumlah kelompok group kesenian di Kabupaten Banyumas tahun 2013 tercatat 1.469 kelompok, meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.490 kelompok dan pada tahun 2015-2017 meningkat kembali menjadi 1.633 kelompok. Jumlah kelompok group kesenian yang mendapat pembinaan mengalami peningkatan setia tahunnya pada tahun 2013 sebanyak 117 kelompok, meningkat pada tahun 2014-2015 menjadi 135 kelompok dan pada tahun 2016-2017 kelompok group kesenian yang dibina meningkat menjadi 157 kelompok.

Capaian indikator pembangunan bidang kebudayaan pada tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 - 2017

No.	Bidang.Urusan/ Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	9	9	5	24
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	3	3	5	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	59
4.	Jumlah group kesenian (kelompok)	1.469	1.490	1.633	1.633	1.633
5.	Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok)	117	135	135	157	157
6.	Jumlah seniman (orang)					
	• Penari	1.457	1.501	1.529	1.529	1.529
	• Pemain teater	244	249	900	900	900
	• Pelukis	5	10	112	112	112
	• Pemusik	3.636	3.705	5.983	5.983	5.983

Sumber : *Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2018.*

Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival hendaknya dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival tersebut. Pemasaran untuk setiap *event* tersebut juga perlu dikordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Jumlah kelompok kesenian relatif stabil, namun jika aspek pembinaan minim, dikhawatirkan aktivitasnya akan berkurang. Peningkatan porsi pembinaan ini penting selain sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk keseniannya, adanya pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni.

Jumlah pelaku seni yang masih minim adalah pelukis, padahal Banyumas, khususnya Sokaraja di masa lalu dikenal sebagai gudangnya pelukis dengan tema naturalis yang khas. Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi lain, pelukis semakin tidak mendapatkan tempat sehingga saat ini cukup sulit menjumpai lukisan-lukisan dengan tema keindahan alam yang khas Banyumas/Sokaraja. Aspek ini ke depan perlu ditingkatkan dengan fasilitasi mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pembinaan secara teknis hingga ke aspek ekonomi/pemasarannya. Penanganan yang holistik ini perlu karena seni bukan semata-mata untuk seni, tetapi juga harus bernilai ekonomi khususnya bagi para pelaku yang berkecimpung di dalamnya.

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa supaya tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Banyumas sebanyak 1 unit, perpustakaan keliling sebanyak 1 unit, perpustakaan rumah ibadah sebanyak 3 unit dan perpustakaan sekolah sebanyak 1.073 unit. Selain perpustakaan terdapat pula taman bacaan masyarakat sebanyak 44 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dari tahun 2013-2017 dari 42.792 pengunjung di tahun 2013 menjadi 109.767 orang pengunjung di tahun 2017. Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah tahun 2013 sebanyak 48.309 buku, meningkat menjadi 59.313 pada tahun 2017. Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain menambah koleksi buku, juga bisa menambah fasilitas berupa Internet Gratis, serta fasilitas Wi fi / Hot Spot secara gratis / free acces. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas bisa menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62.
Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2017

No.	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	989	996	1.131	1.131	
	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	
	Perpustakaan keliling	2	3	3	3	
	Perpustakaan Sekolah	815	815	1073	1073	
	Perpustakaan Desa	85	89	52	52	
	Perpustakaan Rumah ibadah	4	4	4	4	
	Taman Bacaan Masyarakat	71	71	44	44	
	Perustakaan Perguruan Tinggi	13	13	13	13	
2.	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah	8.501	3.597	4.423	4.423	
3.	Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)	27.654	39.650	40.017	40.017	
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)	42.742	57.621	75.777	102.716	109.767
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	48.309	50.083	52.008	52.008	59.313

Sumber : Kantor Perpustakaan Kab. Banyumas, 2017

2.1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan untuk menunjang tata pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh SKPD dalam menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak instansi OPD dan UPTD serta Arsip di Pemerintahan Desa. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan optimal. Untuk itu peningkatan SDM pengelola kearsipan selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah pesertanya tersebut bertambah setiap tahunnya sampai tahun 2017 sudah 850 orang yang mengikuti Bintek Pengelolaan Kearsipan

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada. Mulai tahun 2009 arsip yang ditarik dari beberapa institusi pemerintahan bertambah secara gradual setiap tahun. Akan tetapi tahun 2014 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Perkembangan kinerja pembangunan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.
Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengelolaan arsip secara baku	instansi	447	124	68	20	68	28
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	215	233	233	432	665	850
3.	Penarikan arsip dari instansi pemda	berkas	225	254	254	254	254	245

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Banyumas, 2017

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya, untuk luas lahan perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2017 seluas 1.293 ha dan luas perikanan budidaya pada tahun 2017 seluas 424,50 ha. Luas lahan perikanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017, mengalami pertumbuhan meningkat, pada tahun 2013 mencapai 8.524,10 ton, meningkat menjadi 10.859,15 ton pada tahun 2016 dan meningkat kembali mencapai 11.008 ton pada tahun 2017.

Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2013-2017, pada tahun 2013 mencapai 13,55 kg/Kpt/th. Eningkat pada tahun 2016 menjadi 13,78 kg/Kpt/th. Meningkat kembali menjadi 13,88 kg/Kp/th. Pada tahun 2017. Capaian ini jauh dari pola konsumsi harapan sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau.

Banyaknya ikan yang ditebar diperairan umum selama kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang meningkat, pada tahun 2013 ada sebanyak 352.000 ekor, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 400.000 ekor dan meningkat kembali sebanyak 756.460 ekor pada tahun 2017.

Perkembangan luas lahan dan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Perikanan
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	1. Produksi perikanan (ton)	8.524,10	9.138,60	10.710	10.859,15	11.008
	2. Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	13,55	13,68	13,75	13,78	13,85

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	3. Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	352.000	216.100	332.500	400.000	756.460

Sumber : Dinkannak Kab. Banyumas, 2017.

Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 ada sebanyak 192 unit usaha.

Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 sebanyak 522 kelompok.

2.1.3.3.2. Urusan Pariwisata

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Berbagai potensi pariwisata tersebut yaitu : Baturraden, Taman Rekreasi Nirwala Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Pancuran Pitu, Pancuran Telu, Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kalibacin, Museum BRI.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, kurun waktu tahun 2013-2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan fluktuatif. Pada tahun 2012 mencapai 1.462.908 orang, meningkat tahun 2014 mencapai 1.954.873 orang, menurun tahun 2015 mencapai 1.784.378 orang, meningkat tahun 2016 mencapai 2.013.992 orang, pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 2.111.861 orang. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2013 mencapai 1.461.263 orang, meningkat tahun 2014 mencapai 1.953.248 orang, tahun 2015 meningkat mencapai 1.784.018 orang, meningkat kembali tahun 2016 mencapai 2.013.544 orang dan tahun 2017 meningkat kembali mencapai 2.111.367 orang. Jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2013 mencapai 1.645 orang, menurun tahun 2014 mencapai 2.625 orang, tahun 2015 menurun kembali mencapai 360 orang, tahun 2016 meningkat mencapai 448 orang dan meningkat kembali tahun 2017 mencapai 494 orang. Untuk kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas. Untuk perkembangan hotel di Kabupaten Banyumas dari kurun waktu tahun 2013-2017, yaitu : tahun 2013-2015 hotel bintang sebanyak 9 buah, tahun 2016 meningkat menjadi 10 buah dan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata klasifikasi hotel bintang menurun menjadi 4 buah. Sedangkan untuk hotel non bintang tahun 2013-2015 tercatat sebanyak 164 buah, tahun 2016 meningkat menjadi 172 buah dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi 211 buah.

Perkembangan jumlah wisatawan, lama tinggal dan hotel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65.

Jumlah Kunjungan Wisata, Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	orang	1.462.908	1.954.873	1.784.378	2.013.992	2.111.861
2.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	orang	1.461.263	1.953.248	1.784.018	2.013.544	2.111.367
3.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	1.645	1.625	360	448	498
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	hari	1	1	1	1	1
5.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1	1	1	1	1

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	mancanegara						
6.	Hotel (buah) - Hotel bintang - Hotel non bintang	buah buah	9 164	9 164	9 164	10 172	4 211

Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2017.

Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. *Pertama*, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan. *Kedua*, belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya. *Ketiga*, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan *heritage* belum tergarap maksimal, karena minimnya pembinaan sebagaimana nampak pada pembahasan pada aspek kebudayaan.

2.1.3.3.3. Urusan Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari : padi sawah, padi gogo, jagung dan kedelai kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Produktivitas padi sawah (ton/ha) tahun 2013 mencapai 5,99 ton/ha, tahun 2014 menurun menjadi 4,98 ton/ha, meningkat pada tahun 2015-2016 mencapai 5,75 ton/ha dan pada tahun 2017 menurun menjadi 5,57 ha/ton. Produktivitas padi gogo (ton/ha) tahun 2013 mencapai 4,25 ton, meingkat pada tahun 2014 mencapai 4,88 ton/ha, meningkat kembali pada tahun 2015-2016 mencapai 4,97% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 4,38 ton/ha. Produktivitas jagung (ton/ha). Produktivitas jagung (to/ha) tahun 2013 mencapai 6 ton/ha, meningkat pada tahun 2014 mencapai 6,10 ton/ha, menurun pada tahun 2015-2016 mencapai 5,75

ton/ha dan meningkat kembali pada tahun 2017 mencapai 5,92 ton/ha. Produktivitas kedelai (ton/ha) pada tahun 2013 mencapai 1,28 ton/ha, tahun 2014 meningkat mencapai 1,33 ton/ha dan pada tahun 2015-2016 menurun mencapai 1,35 ton/ha dan meningkat kembali pada tahun 2017 mencapai 1,53 ton/ha.

Produksi hortikultura yang terdiri dari : durian, pisang dan cabe merah di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Produksi durian tahun 2013 mencapai 13,107 kuintal meningkat pada tahun 2014 mencapai 21,032 kuintal, menurun pada tahun 2015-2016 mencapai 13,157 kuintal dan meningkat pada tahun 2017 mencapai 48,624 kuintal. Produksi pisang tahun 2013 mencapai 164.463 kuintal, menurun pada tahun 2014 mencapai 86.970 kuintal, pada tahun 2015-2016 meningkat kembali mencapai 103.277 kuintal dan pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 2015.108 kuintal. Produksi cabe merah tahun 2013 mencapai 3.121 kuintal, menurun pada tahun 2014 mencapai 2.301 kuintal, meningkat kembali pada tahun 2015-2017.

Produksi tanaman perkebunan yang terdiri dari : cengkeh, kelapa dalam dan kelapa deres selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Produksi tanaman cengkeh tahun 2013 mencapai 232,95 ton, meningkat pada tahun 2014 mencapai 414,55 ton, menurun pada tahun 2015 mencapai 213,56 ton, meningkat kembali pada tahun 2016 mencapai 322,95 ton dan menurun kembali mencapai 310,41 ton pada tahun 2017. Produksi kelapa dalam tahun 2013 mencapai 13.192,41 ton, meningkat pada tahun 2014 mencapai 13.303,27 ton, meningkat pada tahun 2015 mencapai 13.494,80 ton, pada tahun 2016 meningkat kembali mencapai 14.092,41 ton dan meningkat kembali pada tahun 2017 mencapai 14.220,50 ton. Produksi kelapa deres tahun 2013 mencapai 52.164,56 ton, menurun pada tahun 2014 mencapai 49.568,52 ton, meningkat pada tahun 2015 mencapai 3.868 ton, meningkat pada tahun 2016 mencapai 54.114,56 ton dan pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 54.730,50 ton. Cakupan bina kelompok tani tahun 2013 mencapai 36,14%, meningkat pada tahun 2014 mencapai 42,78%, tahun 2015 menurun mencapai 41,81%, menurun kembali pada tahun 2016 mencapai 41,78% dan meningkat pada tahun 2017 mencapai 74%.

Capaian indikator Urusan Pertanian tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66.

Capaian Indikator, Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :					
	- Produktivitas padi sawah (ton/ha)	5,99	4.98	5.75	5.75	5,57
	- Produktivitas padi gogo (ton/ha)	4,25	4.88	4.97	4.97	4,38
	- Produktivitas jagung (ton/ha)	6,00	6.10	5.75	5.75	5,92
	- Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,28	1.33	1.35	1.35	1,53
2.	Produksi Hortikultura:					
	- Durian (kuintal)	13.107	21.032	13.157	13.157	48.624
	- Pisang (kuintal)	164.463	86.970	103.277	103.277	205.108
	- Cabe Merah (kuintal)	3.121	2.301	3.674	3.674	15.698
3.	Produksi Tanaman Perkebunan :					
	- Cengkeh (ton)	232,95	414,55	213,56	322,95	310,41
	- Kelapa Dalam (ton)	13.192,41	13.303,27	13.494,80	14.092,41	14.220,50
	- Kelapa Deres (ton)	52.164,56	49.568,52	53.868	54.114,56	54.730,5
	- Cakupan bina kelompok tani (%)	36,14	42,78	41,81	41,78	74,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas, 2013-2017.

Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Perkembangan populasi sapi potong pada tahun 2013 mencapai 14.845 ekor, menurun sebanyak 12.347 ekor pada tahun 2014, tahun 2015 meningkat menjadi 13.316 ekor, menurun kembali pada tahun 2016-2017 mencapai 12.805 ekor. Perkembangan populasi sapi perah tahun 2013 menjadi 2.213 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 2.250 ekor, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 2.570 ekor, meningkat kembali pada tahun 2016-2017 mencapai 3.172 ekor. Populasi Kerbau tahun 2012 mencapai 1.590 ekor, menurun pada tahun 2014 mencapai 1.531 ekor, menurun kembali pada tahun 2015 mencapai 1.375, pada tahun 2016-2017 menurun kembali mencapai 1.260 ekor. Populasi kambing tahun 2013 mencapai 208.763 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 213.983 ekor, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 218.798 ekor, pada tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 227.124 ekor. Populasi domba tahun 2013 mencapai

21.332 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 21.354 ekor, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 21.365 ekor dan pada tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 22.213 ekor.

Untuk populasi ayam ras petelur tahun 2013 mencapai 1.432.110 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 1/460.752 ekor, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 1.570.988 ekor, pada tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 1.577.825 ekor. Populasi ayam ras pedaging tahun 2013 mencapai 6.064.838 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 7.065.168 ekor, tahun 2015 meningkat kembali mencapai 9.869.010 ekor, meningkat kembali tahun 2016-2017 mencapai 10.054.844 ekor. Populasi ayam buras/kampong tahun 2013 mencapai 1.213.740 ekor, meningkat tahun 2014 mencapai 1.250.152 ekor, meningkat kembali tahun 2015 mencapai 1.287.657 ekor dan pada tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 1.320.970 ekor. Populasi itik tahun 2013 mencapai 166.494 ekor, meningkat pada tahun 2014 mencapai 174.819 ekor, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 181.375 ekor, meningkat kembali pada tahun 2016-2017 mencapai 186.357 ekor.

Produksi daging di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan ayam, selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Produksi daging tahun 2013 mencapai 15.008,91 ton, tahun 2014 meningkat mencapai 15.081,49 ton, meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 15.520,64 ton, tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 19.255,10 ton. Untuk produksi daging sapi tahun 2013 mencapai 4.528,45 ton, tahun 2014 menurun mencapai 3.415,13 ton, menurun kembali pada tahun 2015 mencapai 3.362,25 ton dan pada tahun 2016-2017 meningkat mencapai 3.739,10 ton. Produksi daging kerbau tahun 2013 mencapai 1,43 ton, tahun 2014 meningkat mencapai 2,23 ton, tahun 2015 menurun mencapai 1,16 ton, tahun 2016-2017 meningkat mencapai 4,3 ton. Produksi daging kambing tahun 2013 mencapai 1.402,05 ton, menurun pada tahun 2014 mencapai 1.307,93 ton, meningkat pada tahun 2015 mencapai 1.643,19 ton dan pada tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 1.733,20 ton. Produksi daging domba tahun 2013-2014 mencapai 109,97 ton, meningkat pada tahun 2015 mencapai 114,94 ton, pada tahun 2016-2017 menurun mencapai 103,20 ton. Produksi daging babi tahun 2013 mencapai 96,49 ton, meningkat tahun 2014 mencapai 112,33 ton, tahun 2015 menurun mencapai 95,44 ton dan tahun 2016-2017 menurun kembali mencapai

87,80 ton. Produksi daging ayam buras/kampung tahun 2013 mencapai 1.401,87 ton meningkat mencapai 1.443,91 ton tahun 2014, tahun 2015 meningkat kembali mencapai 1.487,25 ton, tahun 2016-2017 meningkat menjadi 1.525,70 ton. Produksi ayam pedaging tahun 2013 mencapai 7.193,93 ton, meningkat menjadi 8.401,81 ton pada tahun 2014, meningkat kembali mencapai 11.517,15 ton tahun 2015, meningkat kembali tahun 2016-2017 mencapai 11.754,60 ton. Produksi daging itik tahun 2013 mencapai 274,72 ton, meningkat mencapai 288,46 ton tahun 2014, meningkat kembali tahun 2015 mencapai 299,27 ton dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 307,20 ton.

Produksi susu yang terdiri dari : susu sapi perah dan kambing selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang meningkat. Tahun 2013 mencapai 2.930.678 liter, meningkat mencapai 3.000.699 tahun 2014, meningkat kembali tahun 2015 mencapai 4.687.722 liter dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 5.272.222 liter. Untuk produksi susu sapi perah tahun 2013 mencapai 2.868.678 liter, meningkat mencapai 2.935.699 tahun 2014, meningkat kembali tahun 2015 mencapai 4.612.722 liter dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 5.192.222 liter. Produksi susu kambing tahun 2013 mencapai 62.000 liter, tahun 2014 meningkat mencapai 65.000 liter, tahun 2015 meningkat kembali mencapai 75.000 dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 80.000 liter.

Produksi telur yang berasal dari ayam buras, ayam ras dan itik selama kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang meningkat. Tahun 2013 mencapai 15.901,75 ton, meningkat tahun 2014 mencapai 16.383,62 ton, meningkat kembali tahun 2016 mencapai 17.666,61 ton dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 17.764,60 ton. Produksi telur ayam buras tahun 2013 mencapai 13.774,09 ton, meningkat tahun 2014 mencapai 14.052,61 ton, meningkat kembali tahun 2015 mencapai 15.253,90 ton dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 777,30 ton. Produksi telur ayam ras tahun 2013 mencapai 644,55 ton, tahun 2014 meningkat mencapai 732,68 ton, tahun 2015 meningkat kembali mencapai 757,65 ton dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 777,30 ton. Produksi telur itik tahun 2013 mencapai 1.483,11 ton meningkat tahun 2014 mencapai 1.598,34 ton, tahun 2015 meningkat kembali mencapai 1.655,06 ton dan tahun 2016-2017 meningkat kembali mencapai 1.700,50 ton.

Angka kesakitan ternak dan angka kematian ternak yang terdiri dari : ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas selama kurun waktu 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Angka kesakitan ternak besar tahun 2013 mencapai 15,50%, meningkat tahun 2014 mencapai 16,52%, menurun pada tahun 2015-2017 mencapai 14,52%. ANgka kesakitan ternak kecil tahun 2013 mencapai 19,50%, tahun 2014 menurun mencapai 3,52% dan tahun 2015-2017 menurun kembali mencapai 1,43%. Angka kesakitan ternak unggas tahun 2013 mencapai 1,90 %, menurun tahun 2014 mencapai 0,65%, tahun 2015 menurun kembali mencapai 0,55% dan tahun 2016-2017 menurun kembali mencapai 0,53%. Angka kematian ternak besar tahun 2013 mencapai 5,0% menurun tahun 2014 mencapai 3,2%, menurun kembali tahun 2015 mencapai 2,2% dan tahun 2016-2017 menurun kembali mencapai 2,1%. Angka kematian ternak kecil tahun 2013 mencapai 6,5%, menurun tahun 2014 mencapai 5,7%, menurun kembali tahun 2015 mencapai 4,6% dan tahun 2016-2017 menurun kembali mencapai 4,5%. Angka kematian ternak unggas tahun 2013 mencapai 1,7%, menurun tahun 2014 mencapai 0,37%, menurun kembali mencapai 0,25% tahun 2015-2017.

Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67.

Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama					
	Sapi Potong	14.845	12.347	13.316	12.805	12.805
	Sapi Perah	2.213	2.250	2.570	3.172	3.172
	Kerbau	1.590	1.531	1.375	1.260	1.260
	Kambing	208.763	213.983	218.798	227.124	227.124
	Domba	21.332	21.354	21.365	22.213	22.213
	Ayam Ras Petelur	1.432.110	1.460.752	1.570.988	1.577.825	1.577.825
	Ayam Ras Pedaging	6.064.838	7.065.168	9.869.010	10.054.844	10.054.844
	Ayam Buras / Kampung	1.213.740	1.250.152	1.287.657	1.320.970	1.320.970
	Itik	166.494	174.819	181.375	186.357	186.357
2.	Produksi Daging (ton)	15.008,912	15.081,487	18.520,642	19.255,100	20.446,913
	Sapi	4.528,452	3.415,129	3.362,250	3.739,1	3.739,1
	Kerbau	1,433	2,225	1,163	4,3	4,3
	Kambing	1.402,050	1.307,925	1.643,196	1.733,2	1.733,2
	Domba	109,970	109,70	114,938	103,2	103,2
	Babi	96,492	112,332	95,436	87,8	87,8

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Ayam Buras / Kampung	1.401,870	1.443,910	1.487,245	1.525,7	1.525,7
	Ayam Pedaging	7.193,930	8.401,812	11.517,146	11.754,6	11.754,6
	Itik	274,715	288,454	299,268	307,2	307,2
3.	Produksi Susu (liter) :	2.930.678	3.000.699	4.687.722	5.272.222	5.520.183
	Sapi Perah	2.868.678	2.935.699	4.612.722	5.192.222	5.192.222
	Kambing	62.000	65.000	75.000	80.000	80.000
4.	Produksi Telur (ton)	15.901,753	16.383,623	17.666,609	17.764,600	19.626,697
	Ayam Buras	13.774,096	14.052,608	15.253,9	15.286,8	15.286,8
	Ayam Ras	644,548	732,677	757,646	777,3	777,3
	Itik	1.483,109	1.598,338	1.655,063	1.700,5	1.700,5
5.	Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas)					
	Ternak Besar (%)	15,50	16,52	14,52	14,52	15,50
	Ternak Kecil (%)	19,50	3,52	1,43	1,43	19,50
	Ternak Unggas (%)	1,90	0,65	0,55	0,53	1,90
6.	Angka Kematian Ternak (Mortalitas)					
	Ternak besar (%)	5,0	3,2	2,2	2,1	2,1
	Ternak Kecil (%)	6,5	5,7	4,6	4,5	4,5
	Ternak Unggas (%)	1,7	0,37	0,25	0,25	0,25

Sumber : Dinkannak Kab. Banyumas, 2018.

2.1.3.3.4. Urusan Perdagangan

Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, ekspor bersih perdagangan, dan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, terutama perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah. Perdagangan dibagi menjadi tiga bagian yaitu perdagangan lokal, regional atau nasional dan internasional. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur peningkatan kinerja perdagangan adalah besarnya nilai ekspor, jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia.

Kinerja urusan perdagangan selama kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai ekspor di Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 sebesar US \$ 18.742.592 meningkat secara signifikan pada tahun 2016 menjadi sebesar US \$

25.762.423,11 dan menurun pada tahun 2017 mencapai US \$ 22.691.050. Adapun komoditas utama ekspor dari Kabupaten Banyumas adalah kayu olahan dan minyak atsiri dengan tujuan Negara USA, Perancis dan negara-negara Eropa, Jepang dan Korea. Selain untuk ekspor, minyak atsiri juga dikonsumsi dalam negeri meskipun jumlahnya mungkin kecil. Berkembangnya produk kosmetik, parfum dan peralatan kecantikan dalam negeri akan memacu pertumbuhan pemakaian minyak atsiri. Pasar atsiri internasional yang masih terbuka luas, dengan permintaan rata-rata 1.500 ton/tahun dengan kecenderungan yang selalu meningkat, berpotensi mendorong sektor perdagangan ke depan lebih positif. Namun demikian, hal ini masih terkendala dengan keterbatasan produksi, disamping hambatan yang bersifat teknis, kelembagaan klaster minyak atsiri di Kabupaten Banyumas juga tidak berkembang. Artinya, meskipun ada para pelaku dalam bisnis tersebut, tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, serta tidak terbentuk pola bisnis yang terorganisir dengan berbagai bisnis yang berkaitan.

Perkembangan sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013–2017 menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Perkembangan ini memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan capaian indikator Urusan Perdagangan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.68.
Perkembangan Capaian Indikator Urusan Perdagangan
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)/000 rp	5.400.556.810	5.734.332.400	6.159.743.520	6.489.419.460	-
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)/000 rp	4.919.741.720	5.087.139.810	5.267.271.250	5.501.759.400	-
3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	1,522	400	400	140	1.118
4	Nilai Ekspor Perdagangan	18.742.592	21.229.327	24.181.103,47	25.762.423,11	22.691.050

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	(US\$)					
5.	Nilai Impor perdagangan (ribu US\$)	-	-	-	-	-
6.	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)	99	99	99	99	99
7.	Jumlah pasar tradisional (unit)	27	26	26	26	26

Sumber : Dinperindag Kab. Banyumas, 2017.

Perkembangan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 sebanyak 26 unit. Dibangunnya pasar tradisional yaitu dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 ada sebanyak 99 unit. Pasar modern ini tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah, terutama Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.

2.1.3.3.5. Urusan Perindustrian

Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta cakupan bina kelompok pengrajin. Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas selama kurun wakt 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang baik. Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup bagus terutama indutri menengah dan industri kecil dan mikro. Selama kurun waktu 2013-2017, industri menengah meningkat dari sebanyak 77 unit pada tahun 2012 menjadi 82 pada tahun 2016-2017. Demikian pula

dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri menengah, yaitu 3.949 orang pada tahun 2013 menjadi 5.949 orang pada tahun 2016-2017. Pertumbuhan Industri kecil di Kabupaten Banyumas selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan, dari 2.076 unit pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 42.435 unit pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 42.443 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil pada tahun 2013 sebanyak 8.083 orang, meningkat menjadi 92.500 orang pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 97.065 orang pada tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Banyumas semakin membaik. Tumbuhnya industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Gambaran perkembangan jumlah industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69.
Pertumbuhan Jumlah Industri menurut Jenis dan
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Unit Industri					
a.	Industri besar (unit)	4	5	5	5	5
b.	Industri menengah (unit)	77	82	82	82	82
c.	Industri kecil (unit)	2.085	2.091	2.102	42.435	42.443
d.	Industri mikro (non formal) (unit)	38.473	39.778	39.977	-	-
2.	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri					
a.	Industri besar (orang)	1.075	1.275	1.275	1.275	1.275
b.	Industri menengah (orang)	3.949	5.949	5.949	5.949	5.949
c.	Industri kecil (orang)	8.083	8.681	8.934	92.500	97.065
d.	Industri mikro (non formal) (orang)	77.130	83.184	83.566	-	-
3.	Tingkat penggunaan bahan baku impor (%)	2	2	2	2	2
4.	Pertumbuhan Industri	41.942	42.038	42.166	42.522	42.530
5.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	587	732	745	745	820

Sumber : Dinperindag Kab. Banyumas, 2017.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah perkembangan industri mikro (non formal), selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan pertumbuhan perkembangan yang sangat baik sehingga pada tahun 2016 industri mikro (non formal) sudah menjadi formal. Meskipun berskala kecil, sektor industri kecil terbukti besar perannya dalam menopang perekonomian Kabupaten Banyumas. Menurut Tambunan, ” industri kecil di sentra-sentra dapat berkembang lebih pesat, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar

dan dapat meningkatkan produksinya daripada industri kecil secara individu di luar sentra”. Sementara itu Mudrajad Kuncoro menyatakan, “industri kecil atau bisa juga disebut *community based industry* terbukti telah memajukan perekonomian di berbagai negara dengan tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah”.

2.1.3.3.6. Urusan Transmigrasi

Kinerja makro urusan ketransmigrasian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah pendaftar (KK) dan jumlah transmigrasi yang berangkat (KK). Pemerintah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun terakhir 2013–2017 telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak 31 KK ke beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Pemberangkatan transmigran paling banyak terjadi pada tahun 2013 yaitu 22 KK dari pendaftar sebanyak 25 KK dan pada tahun 2017 dari jumlah pendaftar 55 KK yang dapat diberangkatkan sebanyak 5 KK.

Tabel 2.70.
Kondisi Makro Urusan Ketransmigrasian
Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017

No.	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pendaftar (KK)	25	48	0	0	55
2.	Jumlah transmigrasi yang berangkat (KK)	22	4	0	0	5

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas, 2017.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka yang menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang/jasa yang dikonsumsi petani. Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dengan sendirinya pendapatan petani relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat sedangkan pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan petani.

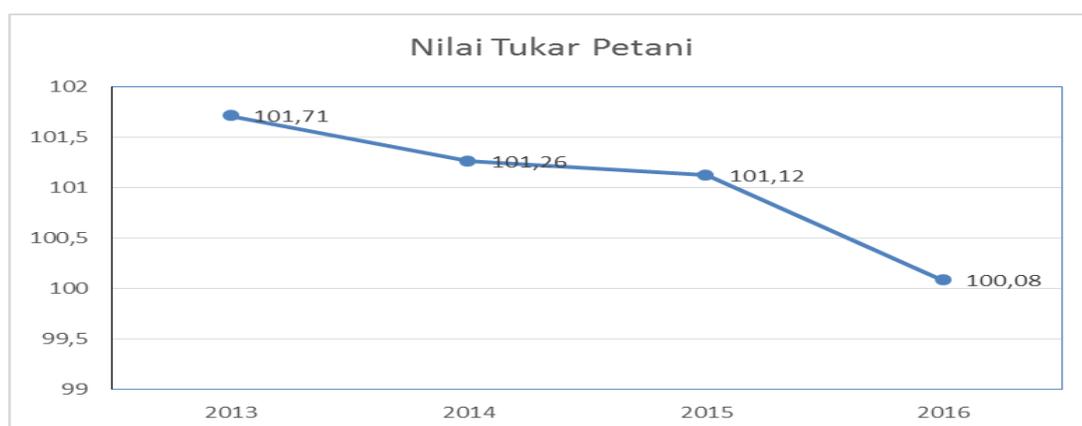
Salah satu indikator proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Secara umum ada tiga macam pengertian NTP, yaitu :

- A. $NTP > 100$, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya.
- B. $NTP = 100$, berarti petani mengalami **impas/break even**. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan tidak mengalami perubahan.
- C. $NTP < 100$, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan petani serta biaya produksi. Sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Nilai tukar petani selama empat tahun dari tahun 2013 – 2016 menunjukkan adanya penurunan, yaitu dari sebesar 101,72 di tahun 2013 menjadi 100,08 di tahun 2016. Penurunan nilai tukar petani ini mengindikasikan penurunan dalam nilai tukar hasil pertanian, atau penurunan tingkat harga pertanian relatif terhadap harga barang dan jasa lain mengakibatkan penurunan pendapatan riil petani. Penurunan NTP ini masih diatas 100 sehingga petani masih mengalami surplus. Harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya.

Gambar 2.13.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2016



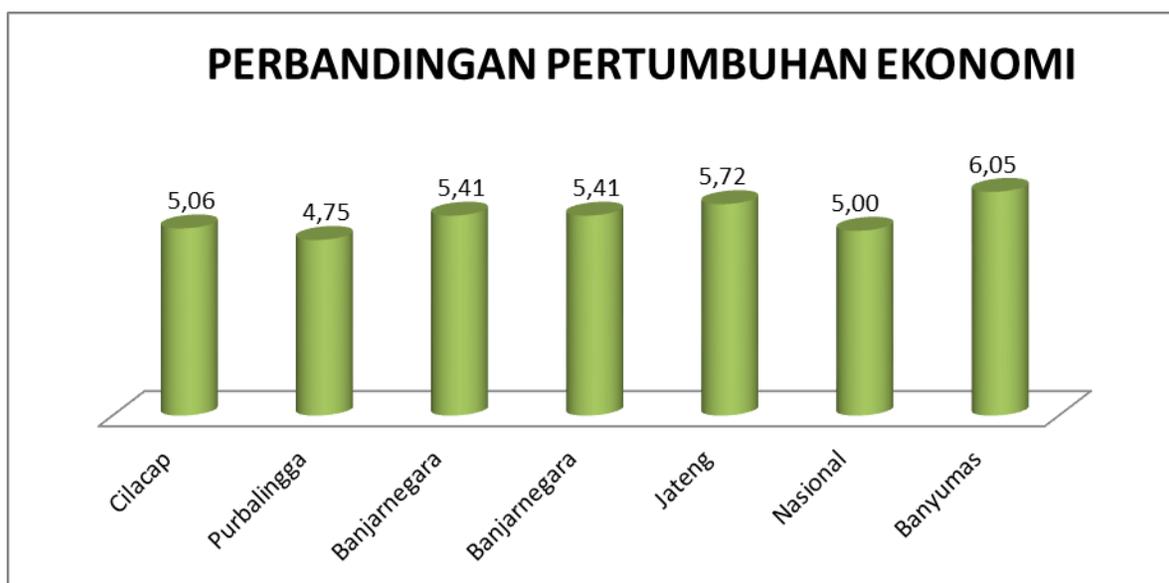
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

2.1.4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB Kabupaten Banyumas menurut data BPS sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar 6,05% (yoy), lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan bahkan dibandingkan dengan Kabupaten sekitar.

Gambar 2.14.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa per Desember 2017

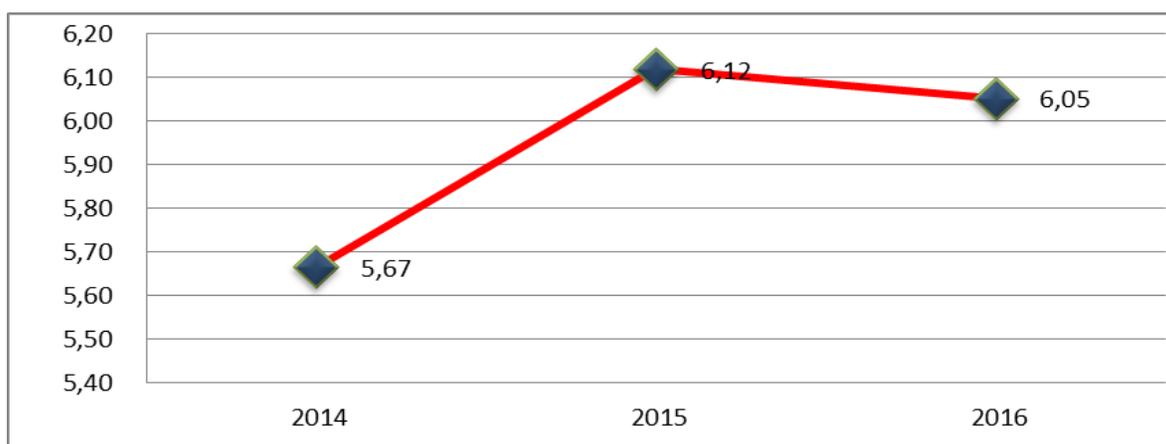


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Selama rentang waktu 3 tahun, ekonomi Kabupaten Banyumas terus tumbuh dari 5,67% pada tahun 2014 menjadi 6,05% pada tahun 2016, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2013 s.d 2016 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.15.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 (%)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2015-2017

2.1.4.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,40 (prediksi BPS) dan titik timpang terendahnya pada tahun 2014 sebesar 0,32. Perkembangan Indeks Gini tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71.

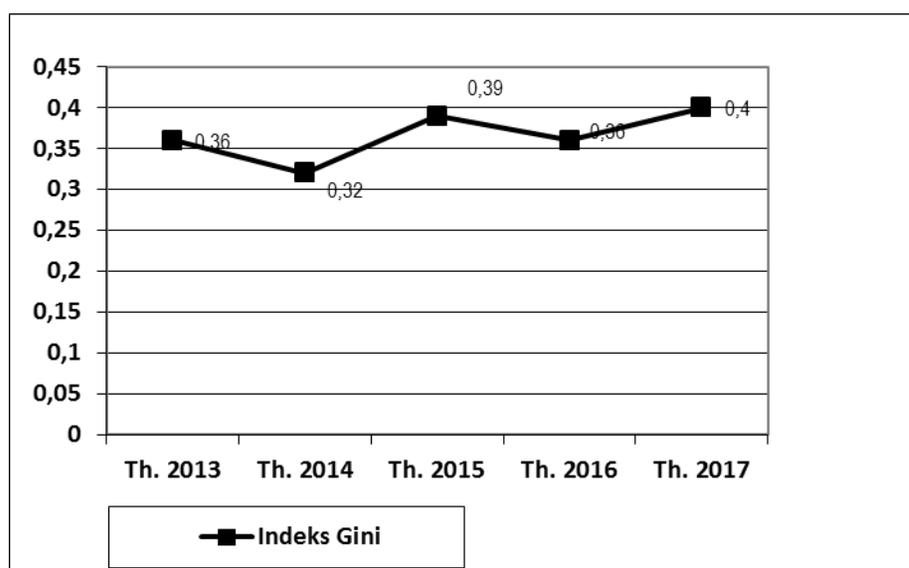
Indeks Gini Ratio Tahun 2013 – 2017

No.	Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Gini	Ratio	0,36	0,32	0,39	0,36	0,40*)

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2017.

Gambar 2.16.

Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017



Data Indeks Gini diatas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan perkapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus diperhatikan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun indeks gini Kabupaten Banyumas mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyumas, tetapi juga di kabupaten-kabupaten sekitar seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya indeks Gini, pertama adalah pertumbuhan penduduk, inflasi dan kurang meratanya pembangunan di wilayah Banyumas. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, nampak bahwa selama 2 dekade terakhir, terhitung sejak 2015 sampai dengan tahun 2016 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas cukup tinggi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 23,54 persen. Disamping pertumbuhan jumlah penduduk, laju inflasi juga merupakan variabel yang berpengaruh penting dalam menentukan tingkat pemerataan pendapatan. Angka inflasi cukup berpengaruh terhadap pendururan daya beli masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor agraris.

2.1.4.1.4 Indeks Williamson

Guna melihat tingkat kesenjangan antar wilayah digunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil

pembangunan. Angka Indeks Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang semakin kecil atau dengan kata lain pendapatan yang semakin merata. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2013 mencapai 0,0004, tahun 2014 meingkat mencapai 0,0109 dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menurun kembali mencapai 0,0107. Hal ini memberikan makna bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas cukup kecil yang berarti tingkat pendapatan antar wilayah cukup merata.

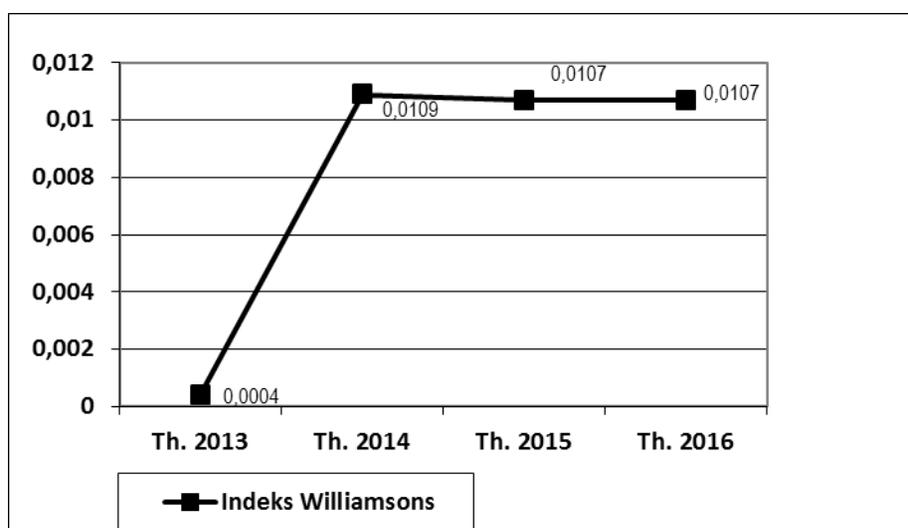
Peningkatan indeks Williamson ini memperkuat hasil kalkulasi indeks gini Kabupaten Banyumas yang cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Kecenderungan peningkatan indeks Williamson berarti terjadi kecenderungan peningkatan disparitas kesejahteraan masyarakat. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, tetapi jika dibiarkan tanpa perhatian yang cukup, dikhawatirkan terjadi ketimpangan yang melebar pada periode yang akan datang.

Tabel 2.72.
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

No.	Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016
1.	Indeks Williamson	Ratio	0,0004	0,0109	0,0107	0,0107

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2017.

Gambar 2.17.
Indeks Williamson Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017



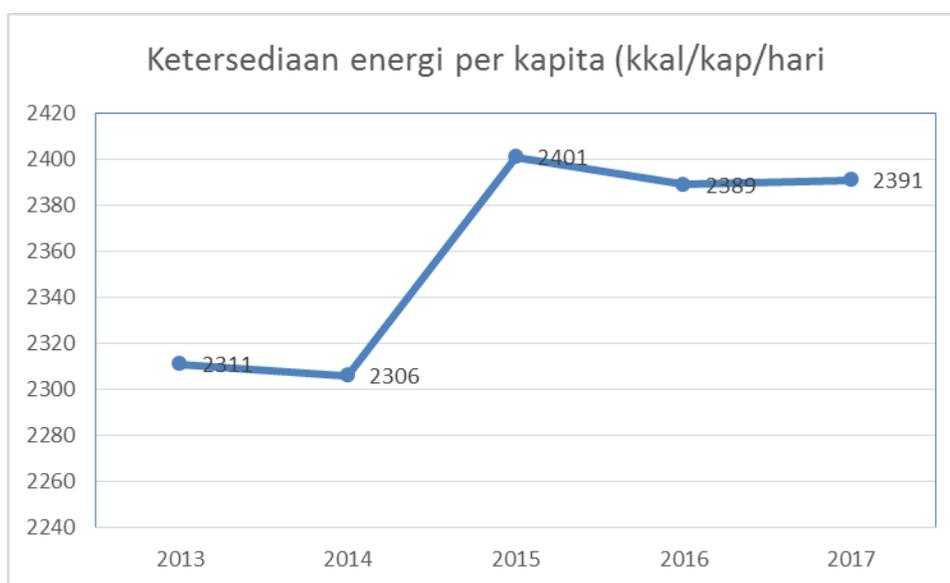
2.1.4.1.5 Pangan

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan

mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten Banyumas telah melakukan regulasi ketahanan pangan. Berdasarkan analisis neraca bahan pangan, ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2016 terjadi fluktuatif. Tahun 2013 ketersediaan energi per kapita senilai 2.311,00 kkal/kap/hari, tahun 2014 menurun menjadi 2.306,00 kkal/kap/hari, dan tahun 2015 meningkat menjadi 2.401,00 kkal/kap/hari. Tahun 2016 menurun menjadi 2.389,00 kkal/kap/hari dan meningkat kembali tahun 2017 sebesar 2.391 kkal/kap/hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari standar yang ditetapkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan energi senilai 2.200 kkal/kap/hari.

Gambar 2.18.

Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari) Tahun 2013 - 2017

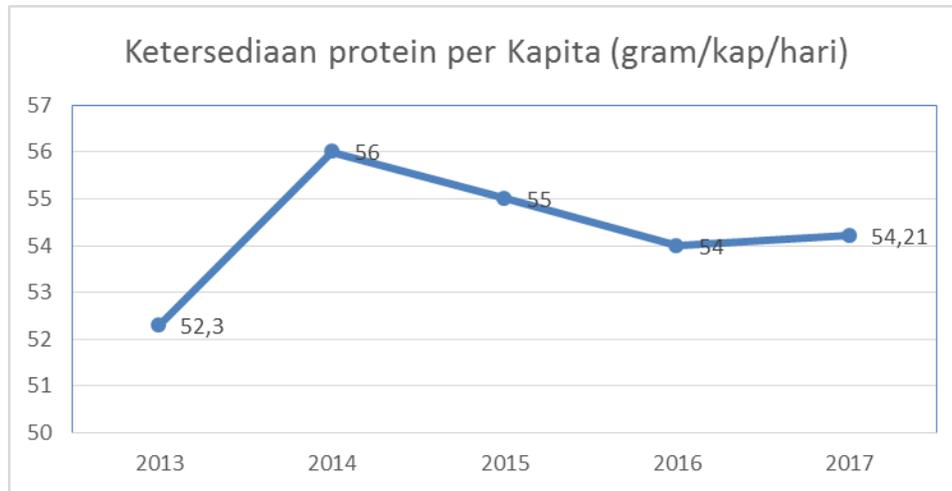


Sumber : Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.

Ketersediaan protein per kapita kurun waktu 2013-2016 terjadi fluktuatif pula. Tahun 2013 ketersediaan protein per kapita senilai 52.30 gram/kap/hari, dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 56,00 gram/kap/hari. Tahun 2015 tercatat menurun menjadi 55,00 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 54,00 gram/kap/hari. Pada tahun 2017 ketersediaan protein per kapita meningkat menjadi 54,21 gram/kap/hari. Namun demikian, ketersediaan protein per kapita Kabupaten Banyumas masih lebih rendah dibandingkan standar yang

ditetapkan dalam WKNPG VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan protein senilai 57 gram/kap/hari.

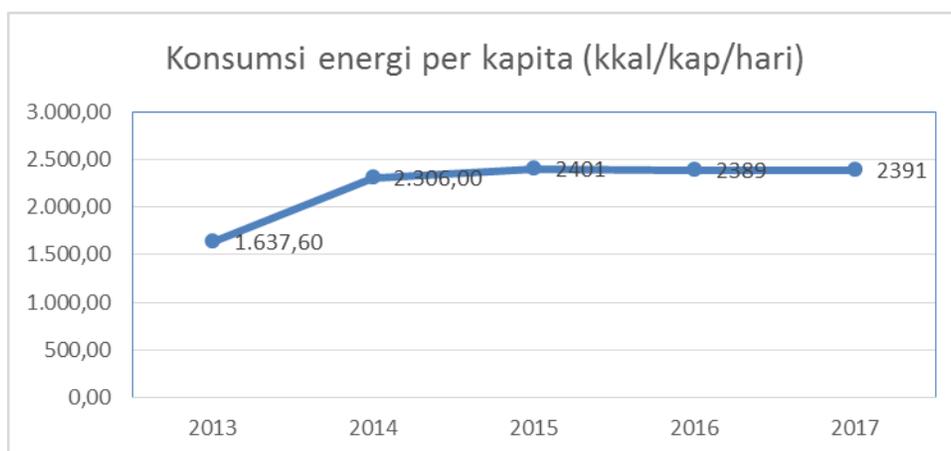
Gambar 2.19.
Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)
Tahun 2013 – 2017



Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

Konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan. Konsumsi protein tahun 2013 senilai 39,50 gram/kap/hari. Tahun 2014 meningkat menjadi 46,80 gram/kap/hari. Tahun 2015 menurun menjadi 45,10 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 45,30 gram/kap/hari menurun kembali menjadi 45,17 gram/kap/hari pada tahun 2017. Capaian tersebut masih di bawah standar Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia yaitu sebesar 57,00 gram/kap/hari.

Gambar 2.20.
Konsumsi Energi per Kapita (kkal/kap/hari) Tahun 2013 – 2017

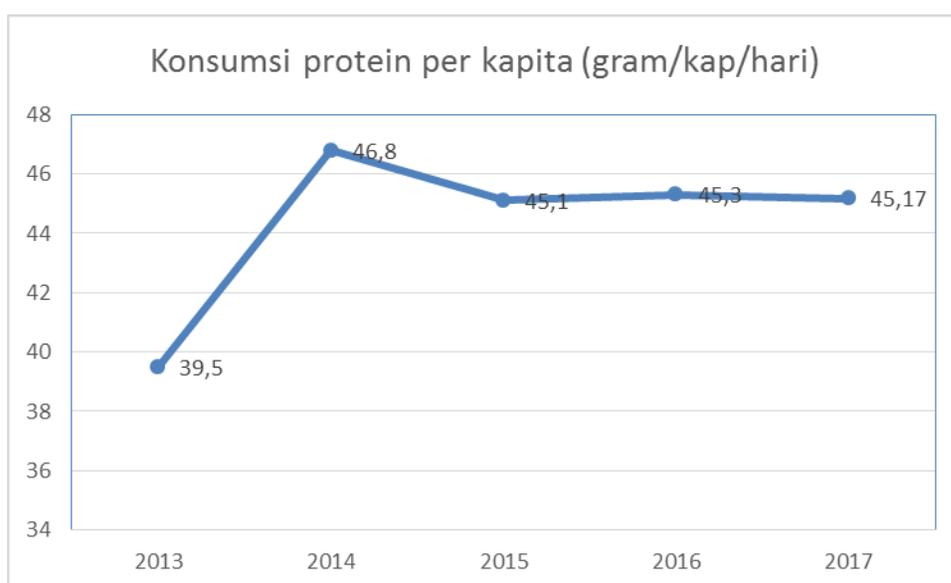


Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

Konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan. Konsumsi protein tahun 2013 senilai 39,50 gram/kap/hari. Tahun 2014 meningkat menjadi 46,80 gram/kap/hari. Tahun 2015 menurun menjadi 45,10 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 45,30 gram/kap/hari menurun kembali menjadi 45,17 gram/kap/hari pada tahun 2017. Capaian tersebut masih di bawah standar Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia yaitu sebesar 57,00 gram/kap/hari.

Gambar 2.21.

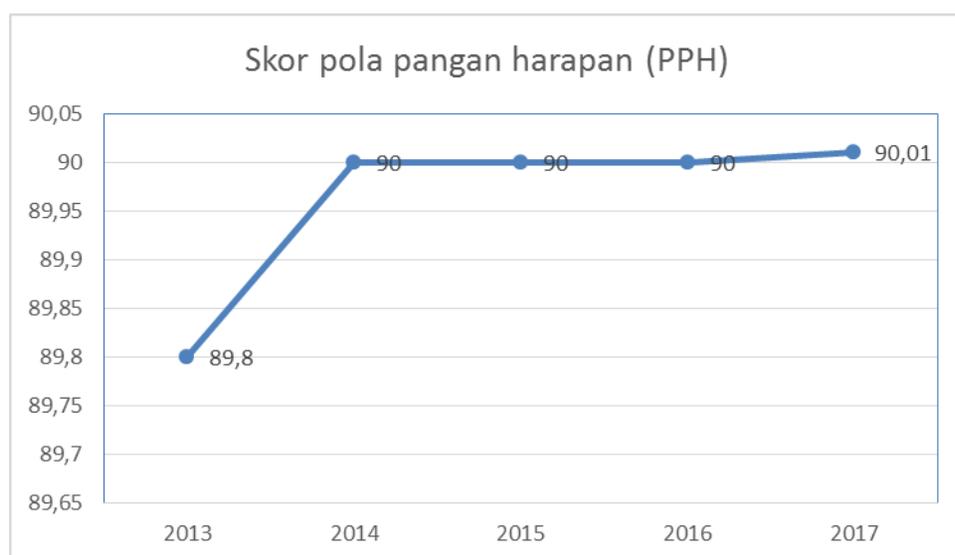
Konsumsi Protein per Kapita (gram/kap/hari) Tahun 2013 – 2017



Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

Keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada sumbangan energi dari sembilan kelompok pangan utama yaitu antara lain padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah. Konsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di Kabupaten Banyumas belum optimal. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2013 senilai 89,8 meningkat mencapai 90,01 pada tahun 2017. Jenis bahan pangan yang perlu ditingkatkan adalah jenis pangan umbi-umbian, buah, sayur dan pangan hewani.

Gambar 2.22.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2013 – 2017



Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.1.4.2.1 Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sebesar 87,83% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 1.716,886 km. Jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24% dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Tabel 2.73.
Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang (km)
	Baik		Sedang		Rusak		
	km	%	km	%	km	%	
Nasional	60,966	34,67%	114,860	65,33%	0	0,00%	175,826
Provinsi	24,400	73,81%	8,660	26,19%	0	0,00%	33,060
Kabupaten	527,197	34,96%	315,926	20,95%	664,877	44,09%	1.508,000
Jumlah	612,563	35,68%	439,446	25,60%	664,877	38,73%	1.716,886

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018*

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2017 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan kabupaten.

Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwoserto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Tabel 2.74.
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
	Baik		Rusak		
	m	%	m	%	m
Primer	275.000	58,26%	108.822	73,07%	383.822
Sekunder	197.000	41,74%	40.111	26,93%	237.111
Jumlah	472.000	100,00%	148.933	100,00%	620.933

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 620.933 m dengan rincian kondisi baik sebanyak 472 m dan kondisi jaringan irigasi rusak sebanyak 148.933 m.

Untuk mendukung pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2017. berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Kabupaten Banyumas memiliki 573 daerah irigasi meliputi luas areal 23.716 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas. Pembangunan infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 telah meningkatkan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 76,01%.

2.1.4.2.2 Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan darat di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit terminal kelas A, 2 unit terminal kelas B dan 1 unit terminal kelas C. Pembangunan terminal khususnya kelas C terus dilakukan untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya.

Sebagai daerah tempat jalur utama lintasan kereta api jalur Utara dengan jalur Selatan, di Kabupaten Banyumas terdapat Stasiun Besar Purwokerto dan stasiun-stasiun kecil lainnya. Stasiun Besar Purwokerto dilintasi kereta api dengan jalur Purwokerto ke Cirebon–Jakarta, Purwokerto–Tegal–Semarang, Purwokerto–Bandung–Jakarta, maupun Purwokerto–Jogja– Surabaya/Malang. Sebagai bagian dari prioritas nasional sedang dilaksanakan pembangunan rel ganda jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu jalur Cirebon–Kroya yang pada Tahun 2017 sudah terealisasi sebesar 72,62%, dan jalur Kroya–Kutoarjo yang baru terealisasi sebesar 15,211%.

Tabel 2.75.

Fasilitas Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1	Perhubungan Darat		
	a. Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
	b. Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
	c. Jumlah Terminal Kelas C (unit)	3	Wangon, Ajibarang, Baturraden
2	Perkeretaapian		
	Jumlah Stasiun	1	Purwokerto

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018.

2.1.4.2.3 Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi satu bagian yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan prima pemerintah terhadap warganya.

Dalam rangka memberikan berbagai informasi kepada masyarakat umum, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama dengan dengan berbagai media. Selain itu, kemudahan terhadap akses informasi

juga dilakukan melalui update web site Kabupaten Banyumas (<http://www.banyumaskab.go.id>), dialog interaktif, press rilis, akses internet yang lancar, publikasi keliling, penyampaian aspirasi masyarakat melalui layanan SMS, layanan call centre, iklan layanan masyarakat, sosialisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten, dan penyebaran informasi pembangunan melalui buku informasi dan media elektronik.

Tabel 2.76.

Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Website milik pemerintah daerah	55
2	Jumlah jaringan komunikasi	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan Banyumas. Apabila kita lihat, data jumlah kriminalitas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012-2017, terlihat bahwa kasus kriminalitas mengalami fluktuasi dan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 467 kasus. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2012-2017 adalah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77.

Jumlah Kriminalitas Tahun 2012 – 2017

No.	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	467	460	380	282	270	419
2.	Jumlah Kriminalitas tertangani	Kasus	235	393	309	282	153	239

Sumber : Kantor Kesbang Kabupaten Banyumas Tahun 2017

2.1.4.3.2 Nilai Investasi

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi

masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas. Jumlah investor PMDN/PMA yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Tahun 2013 tercatat 611 investor, meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.123 investor, tahun 2015 meningkat kembali menjadi 1.123 investor, menurun pada tahun 2016 menjadi 1.041 investor dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 6.132 investor.

Realisasi jumlah investasi kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Tahun 2013 nilai investasi yang masuk di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 589.016.435.717,- menurun pada tahun 2014 menjadi Rp 360.321.440.329,- meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.738.891.750.025,- dan pada tahun 2017 nilai investasikembali menurun menjadi Rp. 575.834.857.959,-.

Tenaga kerja yang terserap mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2013 tenaga kerja yang terserap 7.304 orang, meningkat pada tahun 2014 menjadi 8.461 orang, meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 13.518 orang, pada tahun 2016 menurun menjadi 12.683 orang dan pada tahun 2017 tenaga kerja terserap menurun kembali menjadi 7.782 orang. Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Tabel 2.78.

Jumlah PMDN dan PMA di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	611	927	1.123	1.041	6.132
2.	Jumlah investasi (Rp)	589.016.435.717	360.321.440.329	609.535.145.592	2.738.891.750.025	575.834.857.959
3.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	7.304	8.461	13.518	12.683	7.782
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	12	9,13	12,04	12,18	7,88

Sumber : DMPPTSP Kab. Banyumas, 2017.

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan publik di Banyumas dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP yang diukur dengan indikator penyelesaian izin dan

non izin sesuai SOP. Peningkatan dan penurunan investasi di Banyumas secara umum dipengaruhi oleh faktor: 1) internal yaitu infrastruktur (sarana dan prasarana), lahan kawasan industri, bahan baku, kualifikasi tenaga kerja, pelayanan perijinan, dan promosi investasi; 2) eksternal yaitu inflasi, nilai tukar, peluang pasar, kredit investasi dan kebijakan nasional.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1 S2 S3)

Tingkat pendidikan SI/S2/S3 sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2016 jumlah SDM yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 47.936 orang; S2 sebanyak 2.982 orang dan untuk S3 sebanyak 3.546 orang.

Tabel 2.79.
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Lulusan :					
	S1	42.812	44.377	47.936	47.936	47.936
	S2	2.883	2.982	3.203	3.203	3.203
	S3	298	332	343	343	343

Sumber : Dinpendukcapil Kab. Banyumas, 2017

2.1.4.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.4.5.1 Urusan Pengawasan

Jumlah temuan pengawasan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2013 sebanyak 1.437 menjadi 494 pada tahun 2017, terdiri dari 306 temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti, 88 temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut, dan 0 temuan pengawasan belum ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi sebanyak 494 buah, sebanyak 306 buah rekomendasi selesai ditindaklanjuti, 88 buah rekomendasi dalam proses tindaklanjut, dan 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 9 kasus, dan 9 kasus telah ditindaklanjuti. Secara rinci capaian kinerja di bidang pengawasan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah temuan pengawasan (temuan)	1.437	625	638	562	494

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan)	758	518	436	476	306
3.	Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan)	390	107	176	86	88
4.	Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan)	289	0	0	0	0
5.	Jumlah rekomendasi	1.437	625	638	562	494
6.	Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti	758	518	436	476	306
7.	Jumlah rekomendasi dalam proses tindak lanjut	390	107	202	86	88
8.	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti	289	0	0	0	0
9.	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)	25	28	12	5	9
10.	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)	25	26	5	5	9

Sumber : Inspektorat Kab. Banyumas, 2016.

2.1.4.5.2 Urusan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik. Adapun kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.81.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan	15,13%	18,8%	18,92%	18,16%	17,64%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Presentase SILPA	17,47%	15,36%	18,24%	13,43%	40,07%
4	Presentase SILPA terhadap APBD	17,47%	15,36%	18,24%	13,43%	40,07%
5	Presentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	12,64%	12,5%
6	Presentase Belanja Pendidikan (20%)	48,14%	46,02%	42,5%	37,25%	34,18%
7	Presentase Belanja Kesehatan (10%)	13,80%	16,94	18,00%	20,09%	15,34%
8	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	38,11% : 61,89%	40,96% : 59,04%	35,81% : 64,19%	34,86% : 65,14%	27,04% : 72,96%
9	Penetapan APBD	Tepat waktu				

Dari table tersebut diatas bahwa Presentase PAD terhadap Pendapatan semakin meningkat yaitu dari 15,13% menjadi 17,64%, presentase SILPA terhadap APBD cenderung tetap dari tahun 2013-2016 namun ada kenaikan yang cukup besar sampai 40,07% di tahun 2017, Prosentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana dari tahun 2013-2015 tidak ada program/kegi Prosentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana yang tidak dilaksanakan namun di tahun 2016-2017 ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu sekitar 12,5%. Presentase Belanja Pendidikan (20%) dari tahun 2013-2017 rata-rata 40% ini melebihi dari target sebesar 20%, Presentase Belanja Kesehatan (10%) dari tahun 2013-2017 melebihi target dari 10% yaitu rata-rata sekitar 18%, Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung rata-rata 30% : 70% dari tahun 2013-2017 dan Penetapan APBD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 selalu tepat waktu.

2.1.4.5.3 Urusan Perencanaan

Kondisi kinerja pada urusan perencanaan pembangunan diindikasikan dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas setiap tahun.

Tabel 2.82.
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2016.

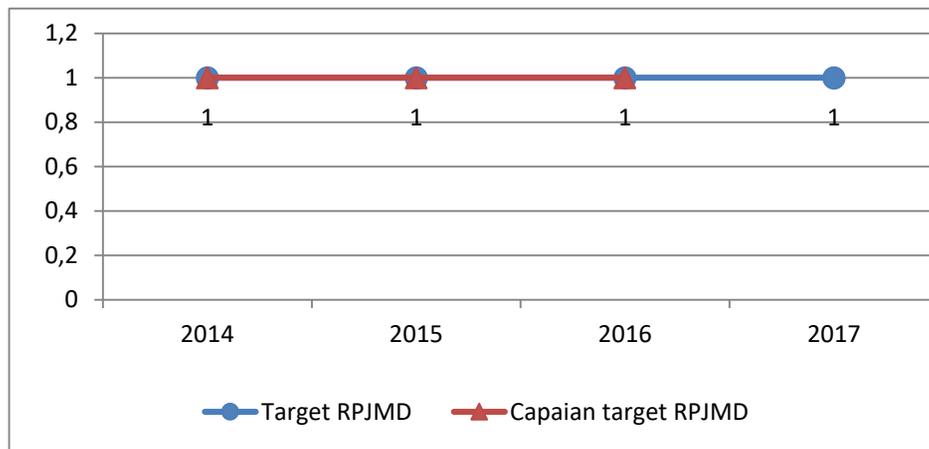
Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator yaitu 3 indikator telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun masih terdapat 1 indikator yang masih membutuhkan perhatian untuk pencapaiannya di tahun mendatang.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)

Berdasarkan target akhir RPJMD, Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA sampai dengan tahun 2016 adalah 1 dokumen telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 100%. Target dan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.23.

Capaian RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 : Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)

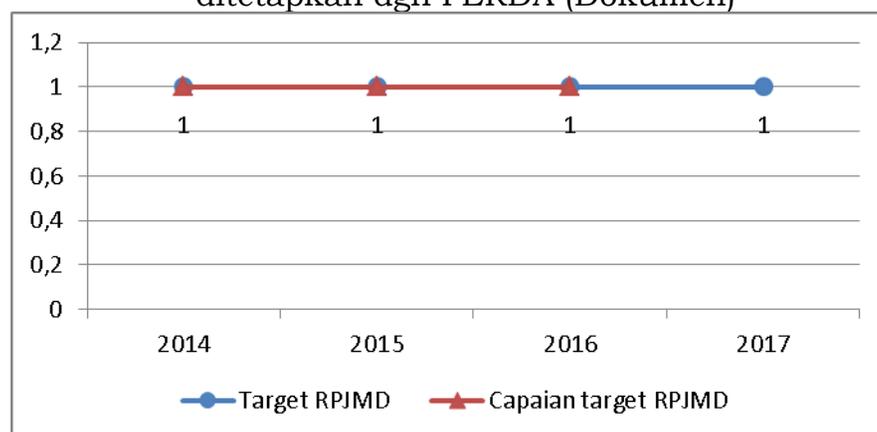


2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)

Berdasarkan target akhir RPJMD, Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA sampai dengan tahun 2016 adalah 1 dokumen telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 100%. Target dan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.24.

Capaian RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 : Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)



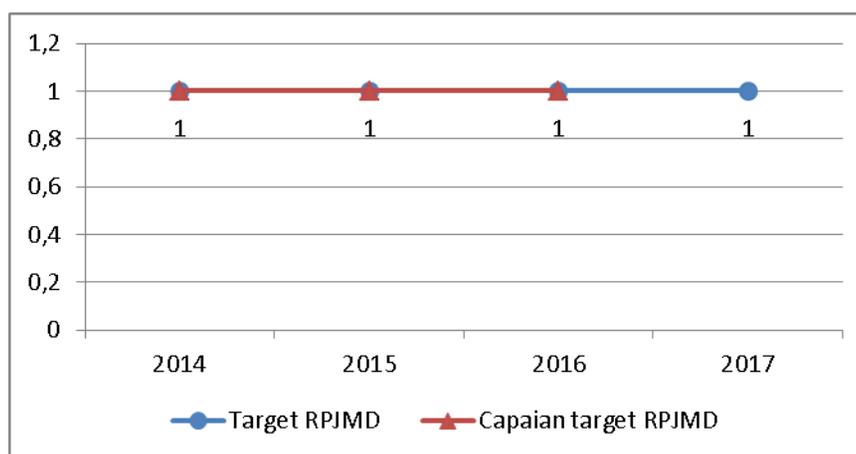
Berdasarkan Peraturan diatas bahwa Kepala Daerah terpilih berkewajiban menyusun RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan pasca dilantik. Terkait dengan hal tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Periode Tahun 2013-2018 telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP (dokumen)

Berdasarkan target akhir RPJMD, Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP sampai dengan tahun 2016 adalah 1 dokumen telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 100%. Target dan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.25.

Capaian RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 : Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP (dokumen)

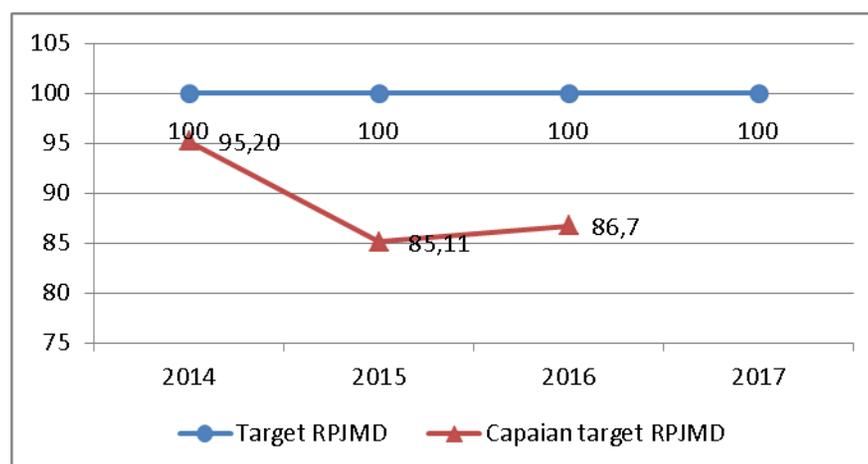


4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

Berdasarkan target akhir RPJMD, Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sampai dengan tahun 2016 adalah 86,70% belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2018 sebesar 100%. Target dan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.26.

Capaian RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 :
Indikator Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)



2.1.4.5.4 Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dimana untuk memenuhi standar kompetensi PNS. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan structural. Adapun PNS Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.83.
Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat

No.	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PNS yang telah mengikuti diklat	535	611	983	371	224
2.	PNS yang telah lulus diklat	535	611	983	371	224

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas

2.1.4.5.5 Urusan Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas dilayani oleh pegawai negeri sipil dimana jumlah PNS di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan yaitu dari 15.537 PNS di tahun 2013 menjadi 13.306 di tahun 2017 di karenakan adanya pegawai yang pension dan tidak adanya penambahan pegawai di karenakan adanya pegawai yang pension dan tidak adanya penambahan pegawai. Perkembangan Jumlah PNS, Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2017

Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.84.
Jumlah PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2017

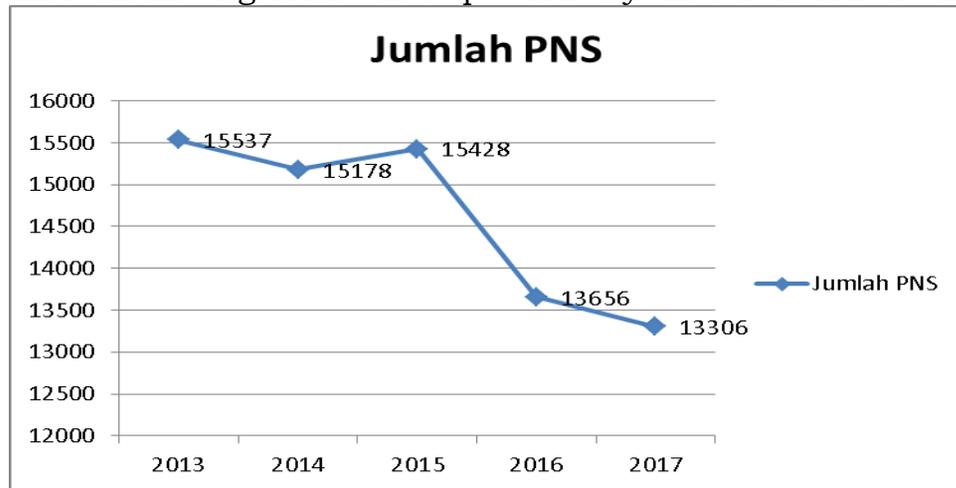
No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS Daerah Kabupaten Banyumas	15.537	15.178	15.428	13.656	13.306

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan PNS di Kabupaten Banyumas yang mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 namun pada tahun 2015 ada penambahan PNS sebanyak 250 orang dari 15.178 orang PNS di tahun 2014 menjadi 15.428 orang PNS di tahun 2015.

Bila di buat grafik perkembangan PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Gambar 2.27.
Grafik Perkembangan PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017



Perincian jumlah PNS Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 2.85.
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

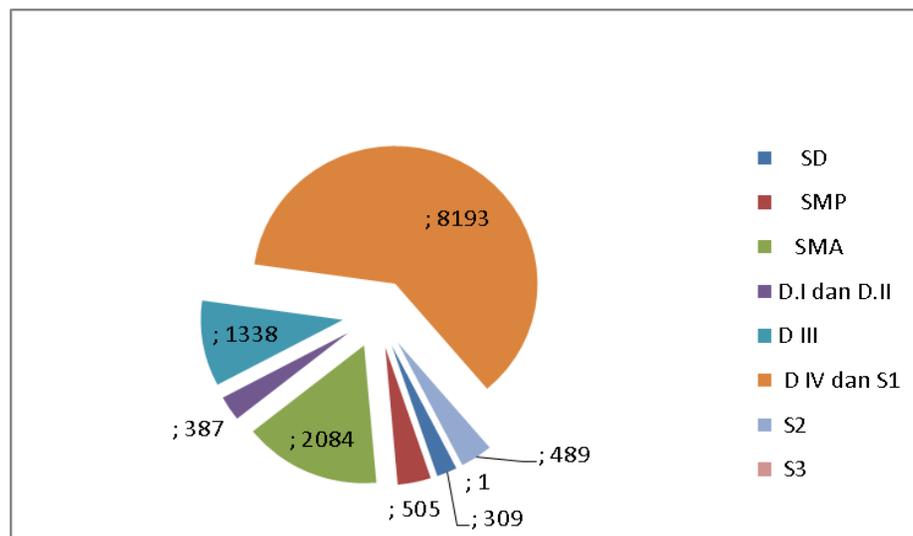
No.	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS Daerah menurut tingkat pendidikan	15.537	15.178	15.428	13.656	13.306
	• SD	419	384	378	345	309
	• SMP	628	593	620	558	505
	• SMA	2.983	2.713	2.675	2.350	2084
	• D.I dan D.II	1.332	806	660	516	387
	• D III	1.202	1.193	1.233	1.131	1338
	• D IV dan S1	8504	8.969	9.306	8302	8193
	• S2	476	519	555	453	489
	• S3	-	1	1	1	1

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas

Dari Tingkat Pendidikan PNS di Kabupaten Banyumas, tingkat pendidikan yang terbanyak adalah pendidikan D IV dan S1 sebanyak 8.193 orang PNS (61,66%). Urutan kedua adalah tingkat pendidikan SMA sebanyak 2.084 orang PNS (15,66%) urutan ke tiga adalah tingkat pendidikan D.III sebanyak 1.338 orang PNS (10,56%)

Porposi tingkat pendidikan PNS Kabupaten Banyumas tahun 2017 dapat di lihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 2.28.
Grafik Proporsi Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2017



Untuk tingkat golongan PNS kabuapten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 2.86.
Tingkat Golongan PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS Daerah menurut golongan	15.537	15.178	13.656	13.565	13306
	• Golongan I	768	666	479	479	403
	• Golongan II	3.459	3.130	2.488	2.488	3.130
	• Golongan III	5.279	5.373	5.665	5.665	5.373
	• Golongan IV	6.031	6.009	5024	5.024	6.009

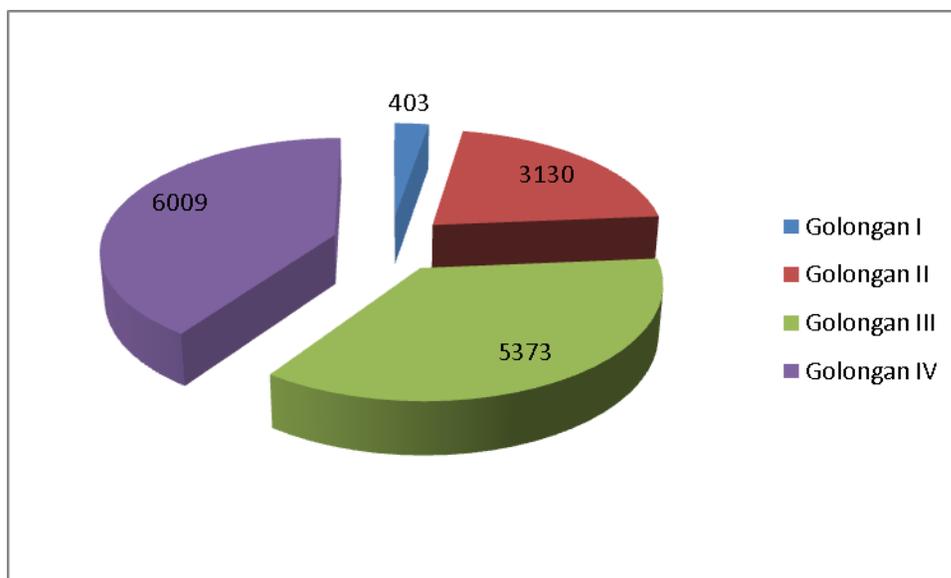
Sumber : BKDD Kab. Banyumas, 2017.

Berdasarkan klasifikasi golongan kepangkatan PNS Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dari tahun 2013-2017 dikarenakan karena kenaikan pangkat regular, pilihan atau penyesuain pendidikan dan untuk PNS di kabupaten Banyumas sampai tahun 2017 yang paling banyak adalah golongan IV sebanyak 6.009 orang PNS (45,16%) sedangkan urutan kedua adalah golongan III sebanyak 5.373 orang PNS (40,38%) dan urutan

ketiga adalah golongan II sebanyak 3.130 orang PNS (23,52%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 403 orang PNS (3,02%)

Proporsi Klasifikasi tingkat golongan PNS Kabupaten Banyumas untuk tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 2.29.
Grafik Proporsi Klasifikasi Tingkat Golongan PNS Kabupaten Banyumas Tahun 2017



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Banyumas diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 (setelah dilakukan perubahan RPJMD). Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Banyumas Pada Triwulan IV Tahun 2017, dari 428 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 367 indikator (85,75 persen) berstatus telah tercapai; 11 indikator (2,57 persen) berstatus akan tercapai; dan 50 indikator (11,68 persen) berstatus perlu upaya keras. Secara rinci, evaluasi kinerja program pembangunan daerah untuk seluruh urusan tertuang dalam Buku II RKPD ini.

Tabel 2.87.
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2017

No.	Status Pencapaian Indikator	Tahun 2017	
		Jumlah	Persentase
1.	Telah Tercapai	367	85,75
2.	Akan Tercapai	11	2,57
3.	Perlu Upaya Keras	50	11,68
Total Indikator		428	100,00

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2017, meliputi:

- 1) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
- 2) Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian;
- 3) Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
- 4) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
- 5) Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal;
- 6) Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- 7) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup;
- 8) Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- 9) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2019 merupakan isu yang telah diangkat dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan

Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka *good governance* dan *clean government* menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kemampuan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

2. Kemiskinan dan Pengangguran

Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2017 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 17,05%, sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 13,01%, dan 10,64%.

3. Keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal, seperti jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk masih belum memenuhi kondisi ideal.

4. Keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Keterjangkauan pendidikan ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan

Angka Melanjutkan. Kemampuan masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar pendidikan menjadi salah satu indikasi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyumas belum optimal untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan SMK / SMK / MA / Paket C. Disisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyumas belum optimal mencapai 100% untuk semua strata pendidikan. Kondisi tersebut masih ditambah persoalan terkait dengan adanya indikasi Angka Putus Sekolah khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sampai dengan SMK/SMK/MA/Paket C. Keadaan tersebut memberikan tekanan dan persoalan tersendiri dalam pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas perlu dikedepankan upaya pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

5. Ketersediaan infrastruktur daerah belum mampu mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini masih menjadi indikasi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kajian terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif dalam kurun waktu dari tahun 2013 – 2017. Ketersediaan infrastruktur daerah sebagai salah satu faktor pendongkrak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

6. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Indeks Gini Kabupaten Banyumas berada dalam posisi 0,36 yang menunjukkan bahwa ketimpangan sebaran pendapatan berada dalam posisi sedang. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya tertentu agar ketimpangan pendapatan masyarakat tersebut dapat lebih ditekan lagi sehingga tidak melebar menjadi kesenjangan yang lebih besar di Kabupaten Banyumas. Penurunan kesenjangan pendapatan menjadi keinginan pemerintah daerah karena ketimpangan pendapatan yang terlalu besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang bisa mengarah pada konflik sosial.

7. Iklim Investasi Dan Iklim Usaha Belum Mampu Mendorong Penurunan Angka Kemiskinan Dan Angka Pengangguran

Penanaman modal atau investasi di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Banyumas. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Walaupun jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, tetapi keberadaan investasi tersebut belum mampu sepenuhnya mengurangi keberadaan penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Banyumas.

8. Keberadaan Koperasi, Industri Kecil Menengah Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Belum Mampu Mendukung Perkuatan Basis Ekonomi Kerakyatan

Pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kondisi tersebut terlihat dari berkembangnya jumlah unit koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas terus meningkat dengan tenaga kerja yang mampu terserap juga meningkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah sebenarnya memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan yang terjadi adalah keberadaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah belum mampu menjadi kekuatan untuk mendukung basis ekonomi kerakyatan karena kalah bersaing dengan industri-industri besar yang dikuasai oleh perseorangan maupun swasta.

9. Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan

Ketersediaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk dan obat-obatan) secara umum sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat petani walaupun distribusi dan keterjangkauannya belum merata di seluruh

wilayah Kabupaten Banyumas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan produksi dan produktifitas lahan pertanian antar wilayah. Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan terkait dengan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi.

10. Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Banyumas merupakan salah daerah tujuan wisata yang potensial karena memiliki banyak jenis obyek wisata di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas. Potensi-potensi wisata tersebut dengan berbagai sarana dan prasarananya ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata yang signifikan di Kabupaten Banyumas. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan infrastruktur khususnya yang mendukung akses maupun destinasi pariwisata perlu menjadi prioritas utama pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyumas ke depan.

11. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang cukup penting, bukan hanya permasalahan lokal tetapi sudah menjadi isu global dan nasional. Isu yang saat ini mencuat diantaranya pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan dan dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

12. Resiko Bencana dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Sebagian wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan rawan bencana alam, berupa bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana letusan gunung api. Untuk mengantisipasi kejadian bencana alam, perlu dilakukan pengurangan resiko bencana serta penguatan kondisi masyarakat di wilayah rawan bencana melalui penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pengurangan resiko bencana merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan resiko bencana.

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih terdapat penduduk yang buta huruf.
- b. Masih tingginya Angka Putus Sekolah di semua jenjang pendidikan.
- c. Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah.
- d. Masih terdapat pendidik Dikdas dan PAUD/RA yang belum berijazah S1/DIV.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan.
- f. Masih banyaknya bangunan dikdas yang menempati lahan bukan milik Pemerintah Daerah.

2. Kesehatan

- a. Masih adanya keterbatasan lahan Puskesmas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai standar.
- b. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi.
- c. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu.
- d. Masih Tingginya Kasus Balita Gizi Buruk Dan Stunting.
- e. Masih Tingginya Kasus Penyakit Menular (TB, HIV /AIDS dan DBD) Dan Trend Meningkatnya Penyakit Tidak Menular (Hipertensi Dan DM).
- f. Kualitas Kesehatan Lingkungan Masih Rendah.
- g. Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat Belum Optimal.
- h. Pembiayaan Kesehatan Untuk Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Belum optimal.
- i. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyumas.

3. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

- 1) Belum optimalnya tingkat pelayanan jaringan jalan yang disebabkan antara lain karena masih terdapat jalan dalam kondisi rusak, penyempitan jalan dan jembatan, tidak adanya bahu jalan, belum optimalnya pemenuhan bangunan pelengkap jalan dan adanya jalan yang rawan longsor.

- 2) Belum optimalnya standarisasi jalan kabupaten yang merupakan alih status dari jalan kewenangan desa dan antar desa.
- b. Sumber Daya Air
- 1) Masih tingginya tingkat kebocoran air irigasi yang disebabkan karena kerusakan jaringan irigasi maupun bangunan irigasi.
 - 2) Masih tingginya bencana banjir tingkat banjir dan tanah longsor.
 - 3) Masih tingginya laju sedimentasi di sungai;
- c. Air Minum dan Sanitasi
- 1) Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat antara lain disebabkan karena keterbatasan jaringan perpipaan/distribusi dan akses layanan/sambungan air bersih, pembagian peran dan wilayah kerja antara PDAM dan non PDAM masih tumpang tindih.
 - 2) Belum optimalnya pengembangan SPAM Kawasan di Kabupaten Banyumas untuk penyediaan air baku lintas wilayah desa disebabkan karena keterbatasan sumber, anggaran dan hambatan penyediaan tanah.
 - 3) Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum, sebaran wilayah sumber air baku, kondisi geografis wilayah, perlunya peningkatan pembangunan tampungan/sumber air baku serta belum sinkronnya rencana pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Banyumas.
 - 4) Kurangnya pemahaman pemanfaatan air bersama untuk pertanian dan air minum dengan mempertimbangkan potensi kapasitas sumber air baku dan pengguna air eksisting.
 - 5) Rendahnya akses layanan sanitasi layak antara lain disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan masih terbatasnya infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik (IPAL komunal, IPAL/IPLT skala kawasan dan perkotaan).
 - 6) Belum optimalnya penanganan sampah antara lain disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sarana prasarana eksisting serta SDM pengelola persampahan (sarana pengangkutan dan TPA) sedangkan rencana pengembangan dan perluasan TPA masih terhambat oleh persepsi masyarakat dan penyediaan tanah.

d. Jasa Konstruksi

Masih rendahnya kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya pemanfaatan informasi jasa konstruksi

e. Tata Ruang

- 1) Masih sedikitnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun dan belum ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Belum optimalnya rencana perwujudan ruang yang terencana dalam rencana pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang di Kabupaten Banyumas.
- 4) Belum optimalnya peran serta dan pemahaman masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang di daerah.
- 5) Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan aturan Penataan Ruang yang telah ditetapkan.
- 6) Masih terdapat potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- 7) Kurangnya sinkronisasi aturan-aturan sektoral dari pusat dengan aturan penataan ruang yang ada.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan rumah (*Backlog*)

- 1) Perkembangan jumlah rumah yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan rumah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa angka backlog kepemilikan di Kabupaten Banyumas sejumlah 21.384 unit.
- 2) Peran Pemerintah dalam penyediaan Rumah Layak Huni pada tahun 2013 sampai dengan 2017 masih terbatas/fokus pada upaya penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan kegiatan peningkatan RTLH/ bedah rumah terhadap 3.234 unit rumah tidak layak huni (berdasarkan BDT Tahun 2015).
- 3) Di sisi lain terdapat persoalan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/pekerja/buruh sangat terbatas juga terhadap akses rumah yang layak huni. Fenomena ini lebih tampak terjadi pada wilayah perkotaan dan daerah yang terdapat kegiatan perdagangan dan industri.

- 4) Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan backlog rumah antara lain arus urbanisasi khususnya di perkotaan, kemampuan ekonomi MBR, terbatasnya lahan untuk pembangunan rumah serta terbatasnya kemampuan pengembang dan pemerintah dalam penyediaan rumah.
- b. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni /RTLH pada masyarakat miskin masih cukup besar. Program peningkatan kualitas RTLH tidak serta merta menuntaskan RTLH (hanya merupakan upaya stimulan) dan harus didukung dengan upaya keswadayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya komitmen penanganan RTLH antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Selain itu perlu diimbangi juga dengan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin itu sendiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.
- c. Terdapatnya Kawasan Permukiman Kumuh yang disebabkan karena:
- 1) Penurunan kualitas lingkungan permukiman. yang disebabkan beberapa faktor yaitu : 1) tumbuhnya permukiman ilegal (squater) dan kumuh (slum), 2) penyediaan dan pengelolaan PSU permukiman yang masih rendah, 3) meningkatnya urbanisasi dan rendahnya kemampuan ekonomi MBR; serta 4) faktor alam dan bencana.
 - 2) Tingginya tingkat urbanisasi tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Di sisi lain memang tingkat kemampuan ekonomi MBR sangat terbatas baik yang bekerja di sektor informal maupun formal. Akibatnya terdapat fenomena : sebuah rumah dipakai oleh beberapa Kepala Rumah Tangga dan munculnya permukiman ilegal.
 - 3) Di beberapa daerah terdapat fenomena ada beberapa pembangunan rumah yang dilakukan oleh perseorangan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual/ komersil yang tidak dilengkapi dengan Prasarana Sarana Umum. Jika lingkungan ini makin berkembang juga akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri.
 - 4) Belum mantapnya Sistem Data dan Informasi. Pada saat ini belum ada sumber data yang dapat dijadikan acuan besaran angka Backlog Perumahan. Hal ini disebabkan belum adanya

mekanisme/ format yang baku terhadap pendataan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Rasio jumlah personil aparat keamanan dan Satlinmas belum mencukupi.
- b. Masih rendahnya budaya literasi masyarakat, yang diindikasikan maraknya kabar hasutan (hate speech) dan berita bohong (hoax).
- c. Masih adanya permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Belum optimalnya kerjasama seluruh stakeholder dalam pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
- e. Kurangnya akses pendidikan politik masyarakat.

6. Sosial

- a. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dilaksanakan secara parsial dikarenakan terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.
- b. Terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola/pelayanan panti yang tidak sebanding dengan jumlah PMKS.
- c. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko dan kurangnya ketersediaan lahan relokasi.

2.3.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih banyaknya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah.
- b. Masih ada perusahaan yang belum patuh dalam perlindungan pekerja dan dalam hubungan Industrial dan K3 kurang optimal.
- c. Kebutuhan tenaga kerja oleh investor yang masuk ke Jawa Tengah belum menggambarkan jenis jabatan pekerjaan yang di butuhkan atau dipersyaratkan bagi pencari kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum tersedianya Sistem pencatatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

- b. Belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak kelompok rentan.
- c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung layanan korban.

3. Pangan

- a. Ketersediaan protein per kapita yang masih dibawah standar yang ditetapkan dalam WKNPG VIII tahun 2004.
- b. Rendahnya pendapatan masyarakat (tingginya angka kemiskinan) yang menyebabkan daya beli terhadap komoditas pangan juga rendah, dan pada akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan jauh dari angka ideal untuk menunjang kehidupan yang sehat.
- c. Pola Konsumsi Pangan yang belum beragam terutama konsumsi protein perkapita yang masih dibawah standar Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.
- d. Masih kurangnya desa mandiri pangan.
- e. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.
- f. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal.
- g. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan.

4. Pertanahan

a. Pembebasan Tanah

Terhambatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang disebabkan antara lain karena : Pekerjaan DED yang tidak matang, Kurangnya intensifnya koordinasi dengan Kecamatan, Desa atau Kelurahan dan Kurangnya Sosialisasi dengan masyarakat

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

- 1) Rendahnya animo masyarakat untuk menjadikan tanahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- 2) Masih sulitnya pengendalian untuk mempertahankan lahan pertanian (sawah) baik ditingkat pemerintah daerah maupun masyarakat pemilik lahan.
- 3) Keterbatasan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk membeli tanah masyarakat dan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 4) Penetapan luasan LP2B dari pusat dan provinsi ke daerah-daerah tidak memperhatikan luasan eksisting yang ada di setiap daerah,

sehingga membebani proses penetapan LP2B oleh pemerintah daerah yang memiliki lahan potensial LP2B kurang dari yang ditetapkan pusat dan provinsi.

- 5) Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan sektoral dari pusat dan daerah dengan aturan LP2B yang telah ditetapkan. Di satu sisi pemerintah melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian, namun di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan sektor non pertanian yang menggunakan lahan pertanian.
- 6) Belum optimalnya penerapan insentif dan disinsentif kepada masyarakat untuk menjadikan lahannya sebagai lahan LP2B.
- 7) Belum optimalnya inovasi dan penerapan hasil inovasi di sektor pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian dan distribusi hasil pertanian, sehingga menarik masyarakat untuk berusaha di sektor pertanian.

c. Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah yang masih belum baik, dimana masih banyak tanah-tanah milik pemerintah kabupaten yang belum tersertifikasi.

5. Lingkungan Hidup

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Kurangnya pengelolaan sampah di tingkat sumber (rumah tangga) mengakibatkan usia operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi lebih pendek dari usia rencana operasional TPA.
- b. Masih kurangnya sarana pemilahan dan pengolahan sampah di wilayah-wilayah.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha/pemrakarsa untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang telah dibuat. Hal ini diindikasikan oleh masih adanya masalah dalam perizinan dan pengawasan lingkungan, laporan ketidaktaatan industri, dan kurang optimalnya pengawasan lingkungan.

- d. Masih kurangnya RTH publik di kawasan perkotaan. Di kawasan Perkotaan Purwokerto, luasan RTH publik saat ini baru mencapai kurang lebih 11,83 %, hal tersebut masih belum mencapai indikator SPM yaitu tersedianya luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting Kependudukan ke Institusi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.
 - b. Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Jumlah Sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang masih kurang dan belum optimal;
 - d. Distribusi blangko KTP elektronik kurang efektif dan efisien.
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi pedesaan, sehingga perlu peningkatan melalui Badan Uaha Milik desa (BUMDES) serta melalui pemberdayaan usaha mikro kecil di Pedesaan, untuk itu Bumdes dan UMKM di Pedesaan perlu sekali mendapat dukungan baik secara kelembagaan, sarana prasarana maupun fasilitasi manajemen dn pelatihn SDM.
 - b. Masih sedikitnya desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam rangka mendukung usaha dan pertanian/pengolahan hasil pertanian di Pedesaan. Sehingga dalam hal ini perlu dorongan/motivasi untuk memanfaatkan tekhnologi tepat guna sehingga sektor pertanian dan pengolahan hasil pertnian akan semakin meningkat serta efisien. Dukungan tersebut dapat berupa program dan pendanaan dari APBD Kab Banyumas.
 - c. Masih rendahnya pengembangan potensi sumber daya alam di Pedesaan.
 - d. Belum terbentuknya regulasi Kawasan Perdesaan
 8. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
 - a. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP.
 - b. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional.

- c. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB untuk mendukung program KB secara komprehensif.
- d. Menurunnya peran BKB dan BKR dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

- a. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum.
- b. Masih tingginya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas.
- d. Belum optimalnya pelayanan terminal.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Kurang efektifnya penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik.
- b. Belum memadainya infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- c. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah

11. Koperasi dan UKM

- a. Masih rendahnya persentase koperasi yang aktif dan sehat.
- b. Masih rendahnya jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha.
- c. Masih rendahnya akses permodalan oleh UMKM.
- d. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
- e. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi mengakibatkan kualitas sumber daya manusia relatif terbatas dan kurang kompetitif.
- f. Koperasi belum sepenuhnya menerapkan azas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sesuai dengan jati diri perkoperasian.
- g. Tingkat produktivitas dan daya saing UMKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.

12. Penanaman Modal

- a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain karena :
ketertersediaan lahan untuk industri yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang danketerbatasan infrastruktur pendukung
- b. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- c. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/ bidang usaha unggulan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya fasilitas olah raga dan kepemudaan.
- b. Belum optimalnya pencapaian prestasi di bidang olah raga dan kepemudaan.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga olahraga, maupun dunia usaha.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan.
- e. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

14. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan data statistik
- b. Belum optimalnya survey data statistik sektoral

15. Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian

16. Kebudayaan

- a. Perlunya pengembangan taman budaya sebagai sarana optimalisasi kebudayaan Banyumas.
- b. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya lokal yang menjadi jatidiri masyarakat Banyumas sebagai obyek wisata.
- c. Masih kurangnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagai arena untuk mengekspresikan dan pementasan seni budaya daerah.

17. Perpustakaan

- a. Terbatasnya SDM (Fungsional Pustakawan) untuk melayani perpustakaan di semua titik sehingga layanan perpustakaan belum bisa merata di semua masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan.
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan terutama koleksi Buku dan Peralatan IT serta mobil keliling sehingga belum bisa maksimal melayani masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Minimnya SDM Kearsipan (Fungsional Arsiparis) untuk mengelola arsip.
- b. Terbatasnya Sarpras Kearsipan untuk mendukung pengolahan, penyelamatan, dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Minimnya anggaran untuk mendukung pengelolaan kearsipan.

2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam usaha budidaya ikan.
- b. Perlunya peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tawar.
- c. Belum optimalnya hasil dan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- d. Masih rendahnya konsumsi ikan perkapita pertahun.
- e. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan tingginya harga pakan ikan
- f. Belum Optimalnya produktivitas usaha pembenihan dan pembesaran perikanan budidaya. Hal ini dikarenakan penerapan CPIB belum konsisten, tidak didukung induk dan pakan berkualitas, harga pakan yang tinggi mempengaruhi kelayakan usaha. BPBAT belum mampu untuk menyediakan induk yang unggul, produksinya dipengaruhi oleh musim, manajemen pokdakan masih lemah dan belum berorientasi sebagai lembaga usaha/lembaga ekonomi serta lambannya penerapan teknologi budidaya intensif.
- g. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap yang cenderung stagnan, hal ini dikarenakan Pengelolaan perairan umum dalam rangka pelestarian sumber daya ikan masih sangat terbatas, Perairan tertutup belum dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi, Penguasaan teknologi budidaya untuk jenis ikan asli masih terbatas, Belum ada kelembagaan terkait perikanan tangkap (kelompok nelayan, pokwasmas, Tim pengelola PUD).

2. Pariwisata

- a. Masih rendahnya jumlah wisatawan mancanegara dan rata-rata lama tinggal wisatawan.
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi dan obyek wisata.
- c. Belum optimalnya pengembangan kemitraan dengan para pelaku pariwisata.
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pemasaran pariwisata.
- e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.
- g. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UMKM sektor pariwisata.
- h. Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Banyumas masih tinggi.
- i. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- j. Belum optimalnya kerjasama/kemitraan antara stakeholder utamanya dalam peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan kepariwisataan.

3. Pertanian

- a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian.
- b. Mata rantai distribusi dan pemasaran hasil pertanian belum efektif.
- c. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada on-farm.
- e. Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.
- f. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas.
- g. Masih terdapat pemotongan ternak ruminansia betina produktif sehingga menghambat produksi dan produktivitas ternak.

- h. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
- i. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan;
- j. Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak dan hasil peternakan yang cenderung berfluktuasi setiap tahunnya.
- k. Kurang optimalnya dalam pemanfaatan sumberdaya lokal hijauan pakan ternak
- l. Manajemen budidaya yang belum sesuai good breeding practice (pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi pembibitan sapi potong yang baik)

4. Perdagangan

- a. Tinggi harga barang kebutuhan pokok dan strategis yang disebabkan belum optimalnya sistem distribusi yang efektif dan efisien.
- b. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karenabelumdidukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Terjadinya defisit neraca ekspor import yang disebabkan tingginya penggunaan bahan baku impor untuk mendukung komoditas ekspor utamanya barang elektronika, mesin dan peralatan listrik serta pakaian.
- d. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.
- e. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen

5. Industri

- a. Masih belum standarnya kualitas produk industri kecil dan menengah.
- b. Rendahnya kapasitas industri karena kurangnya inovasi.
- c. Terbatasnya sumber daya industri.
- d. Tidak meratanya persebaran industri di wilayah Jawa Tengah, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
- e. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.

- f. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam.
- g. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dll).
- h. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah (penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi).
- i. Rendahnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

6. Ketransmigrasian

- a. Terbatasnya daerah penempatan karena akar tradisi dan budaya yang sering menjadi pemicu, karena penduduk setempat beranggapan bahwa lahan yang diberikan kepala para transmigrasi merupakan lahan mereka yang seharusnya dimaksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
- b. Jumlah animula transmigran Jawa Tengah relatif cukup besar sebanyak 2.2 ribu KK, namun jumlah pemeberangkatan setiap tahun jumlahnya relatif kecil (antara 100 s/d 150 KK).
- c. Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasaranapemukiman.

2.3.3.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya sinergitas kebijakan pusat dan daerah serta Wilayah Perbatasan.
- b. Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan kurang optimalnya koordinasi lintas wilayah dikarenakan sudah secara tegas membagi kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota.
- c. Kurang efektifnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam proses perencanaan pembangunan.
- d. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan termasuk tidak tersedianya data by name by address yang up to date dan valid.

2. Keuangan

- a. Belum tersedianya SAB (Standard analisis Biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran
- b. Belum optimalnya penggalian PAD

3. Kepegawaian dan Diklat

- a. Belum adanya standar kompetensi jabatan, sebagai dasar pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang makna mengikuti pelatihan yaitu sebagai upaya mengatasi gap kompetensi antara standar kompetensi jabatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh ASN dan berkorelasi dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan.
- b. Belum optimalnya fungsi kelitbangan karena struktur organisasi Litbang diampu oleh eselon IV

5. Fungsi lain

- a. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung peningkatan pendapatan.
- b. Raperda yang telah disampaikan kepada DPRD belum seluruhnya mendapatkan pengesahan, karena pembahasan dan penetapannya menyesuaikan jadwal/ agenda DPRD.
- c. Masih kurangnya pemahaman tentang makna mengikuti pelatihan sebagai upaya mengatasi gap kompetensi antara standar kompetensi jabatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh ASN dan berkorelasi dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

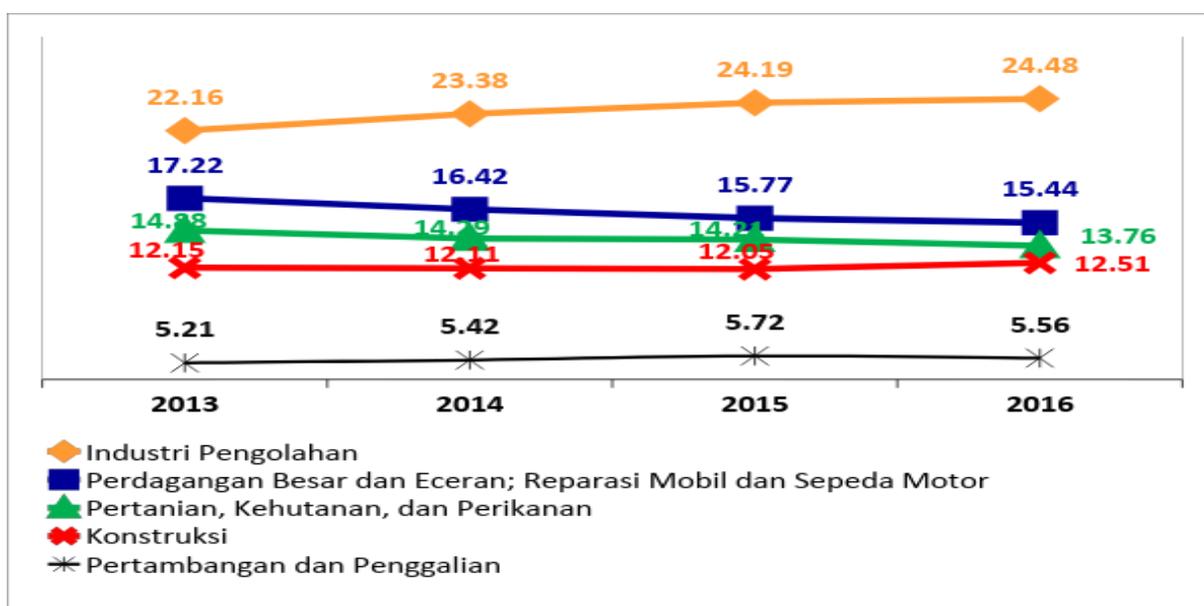
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Kabupaten Banyumas utamanya didorong oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan. Industri pengolahan di Kabupaten Banyumas telah berkembang pesat dengan industri unggulan di antaranya industri makan dan minuman, yaitu gula kelapa dan pengolahan ikan, industri minyak atsiri, industri semen, dan industri besar lainnya.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor



Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas menunjukkan perekonomian di Kabupaten Banyumas meningkat dibandingkan Jawa Tengah. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dengan adanya pertumbuhan tersebut berarti perbaikan di sektor ekonomi. Dengan meningkatnya perekonomian Kabupaten Banyumas, diharapkan ada penyerapan tenaga kerja karena dengan pertumbuhan maka di sektor riil terdapat penyerapan tenaga kerja baru. Meskipun meningkat, namun perekonomian di Banyumas masih sangat tergantung konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga perannya sangat dominan, hingga 70 persen. Dengan demikian aktivitas konsumsi rumah tangga, sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Selain perekonomian, inflasi Kabupaten Banyumas juga tidak lebih tinggi

dari Jawa Tengah. Selama dua tahun terakhir, inflasi (tahun kalender, red) Kabupaten Banyumas masih di bawah target. Dengan demikian Inflasi dapat ditekan dengan sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar.

3.1.2 Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditi pada April 2018, secara umum mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan harga oleh BPS, pada bulan ini terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,19 pada Maret 2018 menjadi 129,27 pada April 2018. April 2018, Lima kelompok pengeluaran memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Purwokerto, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang memberikan andil dalam pembentukan deflasi, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,51 persen. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga tidak mengalami perubahan indeks dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi masih dalam rentang target inflasi yaitu empat plus minus satu meskipun lebih tinggi dari inflasi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,19 persen (yoy). Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai sampai akhir tahun 2018, yaitu permintaan masyarakat yang tinggi saat momentum liburan dan hari Natal, stok beras yang terbatas akibat hama wereng dan proses mulai tanam, harga cabai mulai merangkak naik, serta dampak bahan bakar minyak nonsubsidi yang diperkirakan masih mempengaruhi tekanan inflasi. Dari Tabel inflasi bulanan terlihat bahwa inflasi bulanan Tahun 2017 lebih stabil dibanding 2015 dan 2016 sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 tetap menunjukkan tren menurun sehingga tidak ada gejolak harga.

Gambar 3.2

Inflasi Bulanan Kota Purwokerto 2015 - 2016 -2017

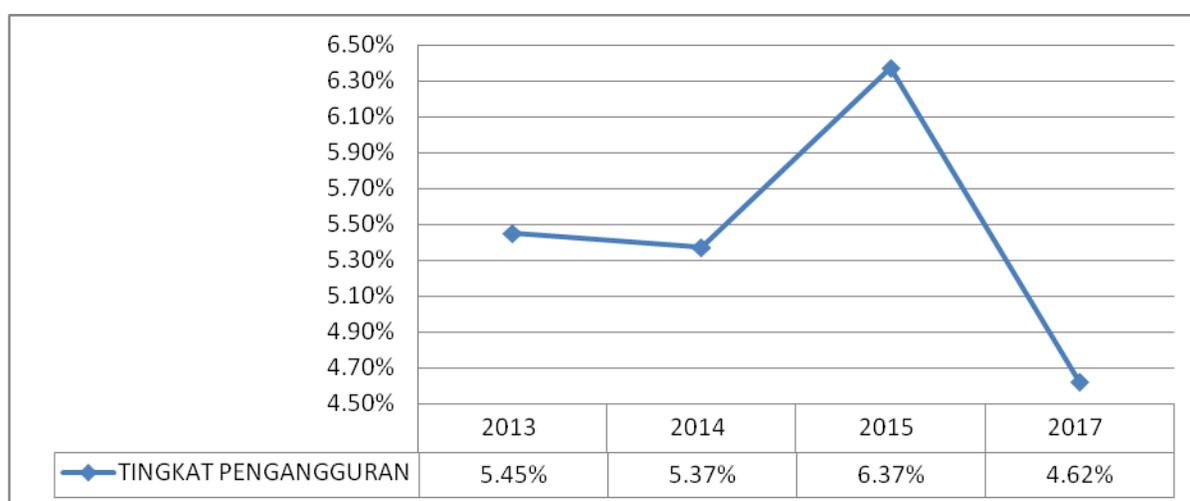


tantangan dalam percepatan perekonomian. Pertama, potensi komoditas agroindustri unggulan kabupaten Banyumas yang terdiri atas gula kelapa, minyak atsiri, tepung tapioka, kopi, dan mocaf (*modified cassava flour*) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Selain itu Kabupaten Banyumas juga memiliki komoditas ketahanan pangan unggulan, yaitu padi, sapi, ayam, sayur-sayuran, dan cabai. Potensi kedua, baik yang sedang dalam proses pengerjaan maupun yang akan dilaksanakan juga perlu menjadi perhatian. Pengembangan strategis yang saat ini dalam proses penyelesaian adalah Bandara Jenderal Besar Soedirman, sedangkan pengembangan infrastruktur yang akan dimulai, antara lain perairan perintis jalur selatan, PLTP Gunung Slamet, jalur darat lintas selatan, serta pengembangan pariwisata daerah. Di tengah pemulihan kondisi ekonomi, terdapat tantangan yang dapat menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas.

3.1.3. Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan baik dalam hal pengentasan kemiskinan dari sisi pangan, kesehatan, akses pendidikan, hingga peningkatan taraf hidup masyarakat. tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Banyumas.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran

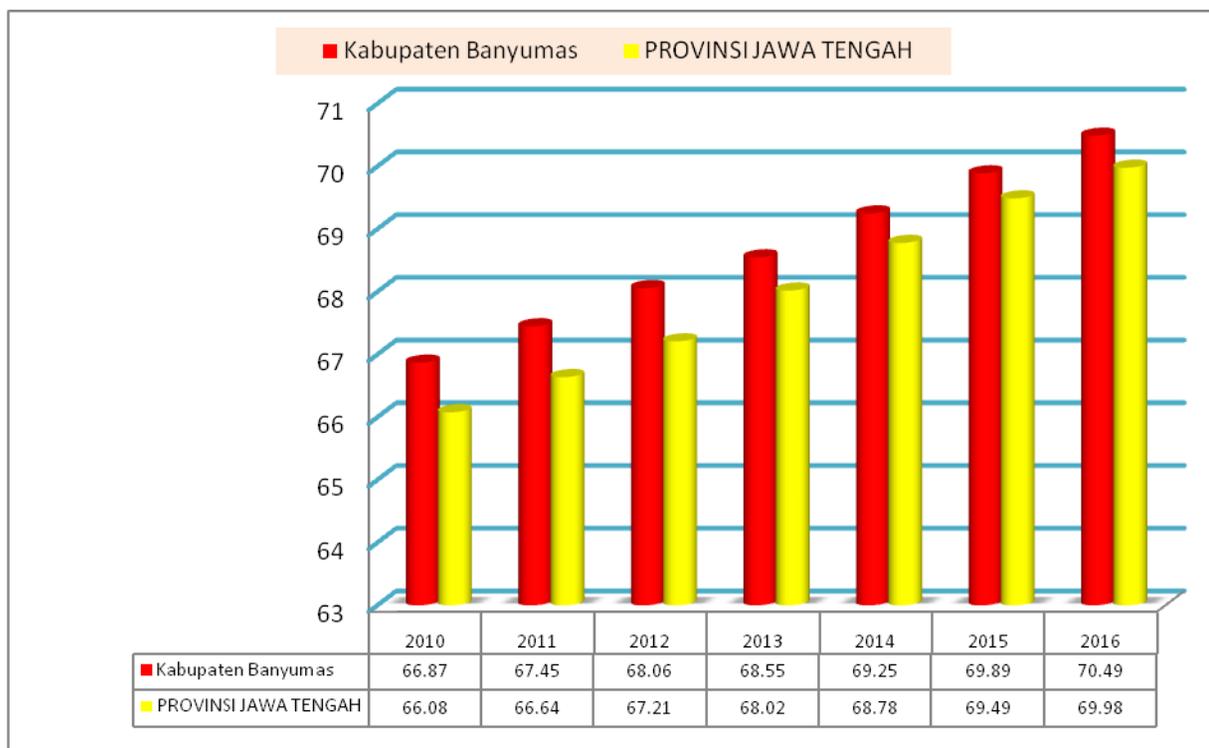


Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2017 sebesar 4,6 % sebesar sejumlah 38.048 penganggur mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dengan tingkat 6,4 % sejumlah 47.172 penganggur. Sedangkan ketimpangan di Kabupaten Banyumas secara konsisten

menurun. Secara keseluruhan, kata dia, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas sudah mengalami tren penurunan selama periode 2013 sampai dengan 2017. Hal tersebut didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas. Indeks pembangunan manusia tertinggi di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 70,49 pada tahun 2016.

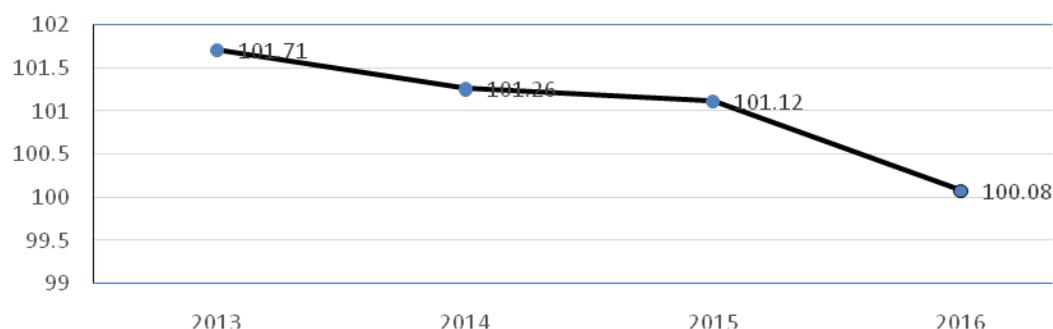
Gambar 3.4

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas



Tantangan besar yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Banyumas adalah tantangan dari sektor pertanian dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu penguatan dan optimalisasi kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi pengelolaan pertanian, dan tata niaga tani yang erat kaitannya dengan rantai distribusi pertanian terutama sektor yang mempengaruhi inflasi. Tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Banyumas yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) mengalami penurunan. Sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi lima subsektor, yaitu : subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan perannya dengan upaya meningkatkan peran kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi pengelolaan pertanian, serta usaha untuk memperpendek rantai distribusi atau yang disebut tata niaga tani. Peningkatan kelembagaan petani dilakukan oleh Bank Indonesia melalui program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Gambar 3.5
Nilai Tukar Petani



Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2018 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMD 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten dikisaran 6,0 persen. Dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian. Meskipun kinerja perekonomian nasional diperkirakan tahun 2017 kurang bagus namun prospek pertumbuhan ekonomi diharapkan cukup yaitu pada kisaran 5,6 – 6,0 persen. Kinerja Kabupaten Banyumas diperkirakan mendorong prospek yang membaik ini, didukung oleh membaiknya kinerja di sektor industri pengolahan dan sektor pariwisata.
2. Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 17,05 persen. Diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan Secara terus menerus mengingat tingkat Kemiskinan Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi dibanding Kabupaten lain disekitarnya.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 dan diupayakan tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2018. Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Bidang Ekonomi Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut adalah:

Isu Strategis di Kabupaten Banyumas meliputi Isu :

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran (isu strategis 1)
- Belum optimalnya iklim investas I dan investasi (isu startegis 4)
- Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata (isu strategis 5)
- Rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM (isu strategis 6)
- Belu optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas (isu strategis 7)
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah (isu strategis 8)
- Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam (isu strategis 9)
- Pemenuhan kebutuhan energi belum merata (isu strategis 11)

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Perekonomian Kerakyatan (Masyarakat) didukung infrastruktur yang semakin mantap dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan tahun 2018“. Guna mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tema dimaksud, pendekatan yang digunakan adalah holistik, tematik, integratif, dan spasial. Sehingga diharapkan pembangunan daerah secara keseluruhan merupakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, merupakan Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 untuk menangani permasalahan dan isu strategis **tingginya angka kemiskinan dan pengangguran** maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi **prioritas tahun 2018**, yaitu **Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja** (Prioritas Kab No. 10 dalam RPJM) dan **memberdayakan**

masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa (Prioritas Kabupaten No. 7 dalam RPJMD), dengan fokus pada:

- 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan provinsi dan pusat;
- 2) Pemantapan kerjasama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- 3) Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif keluarga dan pengembangan kewirausahaan;
- 4) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong pemantapan investasi daerah;
- 5) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
- 6) Pemantapan Peningkatan kapasitas dan ketrampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker, peningkatan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan optimalisasi BLK;

Penanganan permasalahan dan isu strategis **belum optimalnya iklim investasi**, didorong melalui prioritas Kabupaten **memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat**. (Prioritas Kabupaten No. 5 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga peneliti, praktisi dan dunia usaha, pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai Pusat Unggulan;
- 2) Pemantapan diversifikasi produk pertanian, perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- 3) Pemantapan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMK) melalui pengembangan peran UMKM terutama yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM;

- 4) Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan one stop services;
- 5) Peningkatan kerjasama dan kemitraan perdagangan.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **pemenuhan kebutuhan energi belum merata**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan** (Prioritas Kabupaten No. 8 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar desa, dan BUMDes) didukung dengan pengembangan sistem informasi desa;
- 2) Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pemantapan pembinaan dan fasilitasi pengolahan usaha pertanian dan perikanan;
- 4) Pemantapan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan.

Penanganan permasalahan dan isu strategis rendahnya **daya saing dan daya jual destinasi pariwisata**, serta isu strategis **belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi (Prioritas Kabupaten No. 3 dalam RPJMD), dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan produktifitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi, prasarana wilayah, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasi lahan non produktif; pengendalian alih fungsi lahan pertanian ;
- 2) Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan melalui peningkatan akses dan sarana prasarana produksi perikanan; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan); penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap ramah lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan penerapan sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi perikanan lokal;

- 3) Pengembangan daya tarik wisata melalui : pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dalam pembangunan industri wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata dan peningkatan kinerja sektor pariwisata.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran** (Prioritas Kabupaten No. 4 dalam RPJMD) dan **membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan system kerakyatan** (Prioritas Kabupaten no. 5 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk UMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; penguatan kelembagaan KUMKM;
- 2) Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri; peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan SDM industri; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;

Penanganan permasalahan dan isu strategis **kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah**, serta isu strategis **menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan** (Prioritas Kabupaten No. 9 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yaitu (jalur antar pusat-

pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga; jaringan rel Kereta Api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;

- 2) Pemantapan peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktivitas perekonomian;
- 3) Pemantapan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik perdesaan;
- 4) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 5) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
- 6) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
- 8) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;
- 9) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai **target sasaran pembangunan daerah tahun 2018** yaitu :

Tabel 3.1
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2015,
dan Proyeksi Tahun 2016 – 2018

No	Komponen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,97	5,67	6,12	6,20	6,21	6,34
2	Inflasi	8,5	7,09	2,52	2,42	3,91	3,7
3	Tingkat Penduduk Miskin	18,44	17,45	17,52	17,23	17,05	16,84
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,45	5,37	6,5	6,0	4,62	5,5
5	Nilai Tukar Petani	1,712	101,70	101,12	100,08	100,05	100,05
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,55	69,25	69,89	70,49	72,50	75,54
7.	Indeks Gini	0,485	0,485	0,39	0,410	0,400	0,40
8.	Indeks Ketimpangan Wiiliamson	0,004	0,004	0,0103	0,0101	0,0100	0,0100

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan prioritas yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyumas Paruh Kedua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepatguna;
2. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah;
3. Peningkatan kemudahan perijinanusaha;
4. Peningkatan jaringanjalan;
5. Peningkatan kapasitas/suplai listrikwilayah;
6. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangandaerah;
7. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakanpembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah

Kabupaten Banyumas untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan.

Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu, pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Kabupaten Banyumas yang paling besar adalah pada belanja pegawai, diproyeksikan rata-rata tumbuh **sebesar 6%**. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13 dengan catatan tidak terjadi keputusan dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai. Belanja tidak langsung lainnya yang cukup besar adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ditetapkan tidak mengalami kenaikan dengan harapan meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa diprediksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perolehan pajak daerah. Sementara itu belanja bunga diperkirakan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi dan proyeksi / target Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018 (Rp)	APBD-P 2018 (Rp)	+/- (Rp)	%	KETERANGAN
4	PENDAPATAN	3.257.004.283.785	3.263.776.943.365	6.772.659.580	0,21%	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	586.340.721.110	626.880.637.593	40.539.916.483	6,47%	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	173.350.000.000	195.300.000.000	21.950.000.000	11,24%	Direncanakan pada APBD-P 2018, target semua jenis pajak naik, kecuali Pajak Reklame
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.265.695.859	28.860.420.000	594.724.141	2,06%	Hasil rapat TAPD dengan SKPD pengelola retribusi

4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.467.836.264	24.766.697.323	12.298.861.059	49,66%	Kenaikan terbesar bersumber dari hasil investasi Bank Jateng yang berasal dari penagihan kredit macet (AMU) sebesar 12,24 milyar, yang akan diinvestkan kembali dengan jumlah yang sama
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	372.257.188.987	377.953.520.270	5.696.331.283	1,51%	Kenaikan terbesar bersumber dari Pendapatan BLUD sebesar 4,8 milyar rupiah.
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.917.837.364.000	1.917.837.364.000	-	0,00%	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.757.057.000	53.757.057.000	-	0,00%	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	-	0,00%	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	490.108.498.000	490.108.498.000	-	0,00%	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	752.826.198.675	719.058.941.772	(33.767.256.903)	-4,70%	
4.3.1	Pendapatan Hibah	171.984.400.000	181.123.767.772	9.139.367.772	5,05%	Terjadi kenaikan akibat kenaikan rencana pendapatan hibah Dana BOS (7,4 milyar rupiah) dan rencana penerimaan hibah IPDMIP (1,6 milyar rupiah)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.659.190.675	195.417.737.000	(9.241.453.675)	-4,73%	Penurunan terbesar bersumber dari bagi hasil pajak rokok sebesar 12,4 milyar rupiah, sementara kenaikan terbesar berasal dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor naik sebesar 4,5

						milyar rupiah
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	332.795.418.000	330.126.047.000	(2.669.371.000)	-0,81%	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.387.190.000	12.391.390.000	(30.995.800.000)	-250,14 %	Bangub seharusnya di induk 2018 tidak dipasang, namun dipasang 43,3 milyar rupiah. Sesuai dengan DPA Prov. Jateng untuk pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kab./Kota , Kab. Banyumas mendapatkan alokasi sebesar 12,3 milyar rupiah
5	BELANJA	3.472.253.363.785	3.595.101.730.693	122.848.366.909	3,42%	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.056.223.883.904	2.090.377.319.855	34.153.435.951	1,63%	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.369.201.013.249	1.393.040.947.786	23.839.934.537	1,71%	Angka berdasarkan usulan seluruh SKPD, sudah termasuk tambahan alokasi TPP/Tamsil untuk THR dan Gaji 13 T.A 2018
5.1.4	Belanja Hibah	69.048.913.500	76.042.813.500	6.993.900.000	9,20%	Kenaikan diantaranya tambahan hibah untuk pembangunan kantor Polsek Purwokerto Selatan (3,5 milyar rupiah) dan kepada Ajenrem/Kodi m 071 (301,9 juta rupiah) untuk pembelian seperangkat alat musik dan Kejakaan Negeri Banyumas untuk pembangunan rumah jabatan

5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.509.050.000	20.393.550.000	3.884.500.000	19,05%	Terdapat tambahan alokasi untuk RTLH (3 milyar rupiah) dan tali asih&uang duka Satlinmas (741 juta rupiah)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20.161.569.586	22.416.042.000	2.254.472.414	10,06%	Naik akibat kenaikan target pajak daerah (menyesuaikan target pajak dan retribusi daerah)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	577.303.337.569	574.483.966.569	(2.819.371.000)	-0,49%	Koreksi penganggaran. Pada induk 2018 terdapat penganggaran kegiatan RTLH di Bankeudes, dikoreksi/dialihkan pada pos Bansos
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00%	
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.416.029.479.881	1.504.724.410.838	88.694.930.957	5,89%	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(215.249.080.000)	(331.324.787.328)	(116.075.707.328)	35,03%	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	254.000.000.000	382.315.707.328	128.315.707.328	33,56%	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	254.000.000.000	382.315.707.328	128.315.707.328	33,56%	Silpa berdasarkan LKPD audited oleh BPK (Perda Nomor xx Tahun 2018)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.750.920.000	50.990.920.000	12.240.000.000	24,00%	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	36.250.920.000	48.490.920.000	12.240.000.000	25,24%	Hasil investasi Bank Jateng yang berasal dari penagihan kredit macet (AMU) sebesar 12,24 milyar diinvestasikan kembali
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%	

	PEMBIAYAA N NETTO	215.249.080.000	331.324.787.328	116.075.707.328	35,03 %	
	SISA LEBIH PEMBIAYAA N ANGGARAN TAHUN BERKENAA N					

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

3.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 meliputi:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
- c. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD tahun 2018, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk

menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan pendampingan DAK;

- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mengusahakan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2017, meliputi:
 - Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar diseluruh wilayah;
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2018 diarahkan kepada:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk

mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan Pembiayaan Daerah akan diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah. Bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2018.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk perbaikan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2017 disusun dengan perpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018, dengan Visi sebagai berikut : **“Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Banyumas Yang Bersih Dan adil Menuju Masyarakat Yang sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Makna yang termuat dalam **Visi** pembangunan Kabupaten Banyumas jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Pemerintahan **yang bersih**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan **yang adil berarti** pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat **yang sejahtera** menurut Joseph Murphy pada bukunya *"Think Yourself Rich"* dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan

manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya.

Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Berlandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun

mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa

yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung

membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi

umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah berpedoman kepada visi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :
 - a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - 2) Meningkatnya kualitas SDM aparatur
 - 3) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - 3) Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi
 - 4) Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.
2. **MISI 2** : Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dijabarkan melalui tujuan:
- a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kualitas anak didik.
 - 3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
3. **MISI 3** : Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah, dijabarkan melalui tujuan:
- a. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.
 - 2) Meningkatnya ketahanan pangan.

- 3) Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.
 - b. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri.
 - 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan.
 - 4) Meningkatnya perlindungan terhadap ketenagakerjaan.
 - 5) Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya.
 - 6) Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.
4. **MISI 4** : Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijabarkan melalui tujuan:
- a. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis.
 - 2) Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis.
 - b. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.
5. **MISI 5** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dijabarkan melalui tujuan:
- a. Peningkatan ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
 - 3) Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan
 - 4) Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni.
 - b. Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

- 2) Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
- 3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. **MISI 6** : Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial, sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
- 2) Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan

b. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.

c. Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat
- 2) Meningkatnya penanganan bencana
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.
- 4) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

7. **Misi 7** : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya kerukunan hidup beragama.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal, sasaran yang hendak dicapai adalah :
- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.
 - 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- c. Pengembangan potensi pemuda dan olah raga, sasaran yang hendak dicapai adalah, meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-
2018

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa.

Misi		Tujuan		Sasaran			
1.	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat	1.1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
				1.1.2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		
				1.1.3	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
				1.1.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan		
		1.2	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	1.2.1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah		
		1.3	Peningkatan kualitas pelayanan public	1.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan		
				1.3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan.		
				1.3.3	Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi		
				1.3.4	Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi		
		Misi		Tujuan		Sasaran	
		2.	Meningkatkan	2.1	Meningkatkan	2.1.1	Meningkatnya akses

	kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas		akses dan mutu pelayanan pendidikan		pendidikan dalam masyarakat	
				2.1.2	Meningkatnya kualitas anak didik	
				2.1.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	
		2.2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2.2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	
				2.2.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
3.	Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah	3.1	Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	3.1.1	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	
				3.1.2	Meningkatnya ketahanan pangan	
				3.1.3	Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	
		3.2	Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	3.2.1	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	
				3.2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	
				3.2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	
				3.2.4	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	
				3.2.5	Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya	
				3.2.6	Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.	
Misi		Tujuan			Sasaran	
4	Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	4.1	Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian	4.1.1	Meningkatnya inovasi terhadap produk agribisnis	
				4.1.2	Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis	
		4.2	Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM	4.2.1	Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan	
5.	Meningkatkan	5.1	Peningkatan	5.1.1	Meningkatnya sarana	

	kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.		ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat		dan prasarana infrastruktur daerah
				5.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
				5.1.3	Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan
				5.1.4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		5.2	Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan	5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				5.2.2	Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
				5.2.3	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi		Tujuan		Sasaran	
6.	Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.	6.1	Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan social	6.1.1	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
				6.1.2	Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan
		6.2	Peningkatan peñataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	6.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis
		6.3	Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat	6.3.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat
				6.3.2	Meningkatnya penanganan bencana
				6.3.3	Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak
				6.3.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk
7.	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berke-pribadian dan me-miliki keimanan	7.1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan	7.1.1	Meningkatnya kerukunan hidup beragama
				7.1.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat

serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa.				dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
			7.1.3	Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat
	7.2	Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal	7.2.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya local
			7.2.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya
	7.3	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga	7.3.1	Meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga

2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 merupakan tahun ke 4, dan merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Selain merupakan penjabaran RPJMD, pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

4.2.1 Pokok – Pokok Pikiran RKPD

Pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan **hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat** dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2018. Pokok- pokok pikiran dimaksud yang harus mendapat perhatian dari eksekutif guna mengakomodir dalam RKPD tahun 2018, mencakup :

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Pemerintahan
3. Bidang Perekonomian
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bantuan Keuangan

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui **7 (tujuh) Misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **“Nawa Cita”**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** pada seluruh seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih , efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor- sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;

9. Memperteguh **ke-Bhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Untuk tercapainya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2018 diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (Sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam tahun 2018 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan social, serta pembentukan mental / karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air serta semangat bela Negara.
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritime, energy, pariwisata, maupun stabilitas dan

kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Pendekatan yang di digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:

- 1 Pendidikan
 - a Pendidikan Vokasi
 - b Pendidikan kualitas guru
- 2 Kesehatan
 - a Peningkatan kesehatan ibu dan anak
 - b Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - c Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- 3 Perumahan dan Permukiman

- a Penyediaan perumahan layak
- b Air bersih dan sanitasi
- 4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - a Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
 - b Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 - c Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
 - d Perbaiki iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
 - e Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
- 5 Ketahanan Energi
 - a EBT dan konservasi energy
 - b Pemenuhan kebutuhan energy
- 6 Ketahanan Pangan
 - a Peningkatan produksi pangan
 - b Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- 7 Penanggulangan Kemiskinan
 - a Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
 - b Pemenuhan kebutuhan dasar
 - c Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
- 8 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
 - a Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
 - b Pengembangan telekomunikasi dan informatika
- 9 Pengembangan Wilayah
 - a Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
 - b Pembangunan perdesaan
 - c Reforma agraria
 - d Pencegahan dan penanggulangan bencana
 - e Percepatan pembangunan Papua
- 10 Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
 - a Penguatan pertahanan
 - b Stabilitas politik dan keamanan
 - c Kepastian hukum
 - d Reformasi birokrasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2018, maka dalam RKP Tahun 2018 ditetapkan sasaran makro pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94%;

2. Tingkat kemiskinan sebesar 12,10%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,9% (RPJMN 2015-2019)

4.2.3 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2018**, meliputi:

- 1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- 2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- 3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
- 4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
- 5 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.
- 6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

- 1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
 - a Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan

- kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
- b Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenaga kerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
- 2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
- a Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
 - b Jaminan perlindungan social, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi local; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai

- Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- e Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan keterampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
- 3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
- a Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
 - b Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c Peningkatan kualifikasi SI/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
 - d Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - e Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
- 4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
- a Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;

- f Pengembangan perikanan budi daya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
 - i Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;
- 5 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus kepada:
- a Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industry dan pertanian;
 - b Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*);
 - c Penataan system transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal aglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang – Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
 - d Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - e Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri,

Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah pantura;

- f Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut;
- g Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
- h Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
- i Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
- j Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
- k Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
- l Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
- m Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
- n Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
- o Pengembangan masyarakat tangguh bencana;

- 6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan focus pada:
 - a Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
 - c Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan *agent of change* (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan system pengukuran kinerja berbasis elektronik;
 - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;
 - 5) Penataan Tata laksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;
 - 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;
 - 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;

- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun *Standart Operasional Prosedure* dan penyediaan media pengaduan masyarakat.
- d Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
 - e Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompetensi, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh system pembinaan karir yang jelas dan terbuka (*merit system*);
 - f Peningkatan layanan public melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan public, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g Gerakan Revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan gotong-royong.
 - h Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian, dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat.
 - i Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV / AIDS guna menangkal upaya destruktif;
 - j Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan Gedung Terpadu II di Jatidiri.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
- b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks dan Williamson sebesar 0,6986;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%
- f. Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59 dengan komponen :
 - 1. Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun
 - 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,55 tahun
 - 3. Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun
 - 4. Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun

- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99; dan
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13% Dan
- i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 selain guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2018, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018.

Isu Strategis di Kabupaten Banyumas meliputi Isu :

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran (isu strategis 1)
2. Masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi Pendidikan (isu strategis 2)
3. Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial (isu strategis 3)
4. Belum optimalnya iklim investas I dan investasi (isu startegis 4)
5. Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata (isu strategis 5)
6. Rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM (isu strategis 6)
7. Belum optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas (isu strategis 7)
8. Kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah (isu strategis 8)
9. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam (isu strategis 9)
10. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (isu strategis 10)
11. Pemenuhan kebutuhan energi belum merata (isu strategis 11)
12. Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan (isu strategis 12)

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ditujukan untuk **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Perekonomian Kerakyatan (Masyarakat) didukung**

infrastruktur yang semakin mantap dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan tahun 2018". Guna mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tema dimaksud, pendekatan yang digunakan adalah holistik, tematik, integratif, dan spasial. Sehingga diharapkan pembangunan daerah secara keseluruhan merupakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, merupakan Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 untuk menangani permasalahan dan isu strategis **tingginya angka kemiskinan dan pengangguran** serta isu strategis **belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan**, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi **prioritas tahun 2018**, yaitu **Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja** (Prioritas Kab No. 10 dalam RPJM) dan **memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa** (Prioritas Kabupaten No. 7 dalam RPJMD), dengan fokus pada:

- 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan provinsi dan pusat;
- 2) Pemantapan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi serta penyediaan bantuan dan jaminan sosial;
- 3) Pemantapan kerjasama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- 4) Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif keluarga dan pengembangan kewirausahaan;
- 5) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong pemantapan investasi daerah;

- 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
- 7) Pemantapan Peningkatan kapasitas dan ketrampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker, peningkatan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan optimalisasi BLK;
- 8) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi Pendidikan**; dan isu strategis **belum optimalnya akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial** didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya** (Prioritas Kabupaten No. 2 dalam RPJMD), dengan fokus pada :

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan melalui peningkatan penerapan pendidikan karakter sejak dini; peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin; peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik; perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan kebutuhan khusus yang belum tertangani serta putus sekolah melalui lembaga non formal; pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan budaya baca masyarakat; serta pembangunan mental dan karakter dalam kurikulum;
- 2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan mengirimkan tugas belajar tenaga kesehatan; pelatihan; sertifikasi dan penguatan kompetensi.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **belum optimalnya iklim investasi**, didorong melalui prioritas Kabupaten **memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat**. (Prioritas Kabupaten No. 5 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga peneliti, praktisi dan dunia usaha, pengembangan klaster inovasi dan

- pengetahuan sebagai Pusat Unggulan;
- 2) Pemantapan diversifikasi produk pertanian, perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
 - 3) Pemantapan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMK) melalui pengembangan peran UMKM terutama yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
 - 4) Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan *one stop services*;
 - 5) Peningkatan kerjasama dan kemitraan perdagangan.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **pemenuhan kebutuhan energi belum merata**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan** (Prioritas Kabupaten No. 8 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar desa, dan BUMDes) didukung dengan pengembangan sistem informasi desa;
- 2) Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pemantapan pembinaan dan fasilitasi pengolahan usaha pertanian dan perikanan;
- 4) Pemantapan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan.

Penanganan permasalahan dan isu strategis rendahnya **daya saing dan daya jual destinasi pariwisata**, serta isu strategis **belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi (Prioritas Kabupaten No. 3 dalam RPJMD), dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan

mordernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi, prasarana wilayah, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasi lahan non produktif; pengendalian alih fungsi lahan pertanian ;

- 2) Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan melalui peningkatan akses dan sarana prasarana produksi perikanan; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap ramah lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan penerapan sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi perikanan lokal;
- 3) Pengembangan daya tarik wisata melalui : pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dalam pembangunan industri wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata dan peningkatan kinerja sektor pariwisata.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran** (Prioritas Kabupaten No. 4 dalam RPJMD) dan **membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan system kerakyatan** (Prioritas Kabupaten no. 5 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk UMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; penguatan kelembagaan KUMKM;
- 2) Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri; peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan

SDM industri; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;

Penanganan permasalahan dan isu strategis **kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah**, serta isu strategis **menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan** (Prioritas Kabupaten No. 9 dalam RPJMD), dengan fokus pada ;

- 1) Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yaitu (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga; jaringan rel Kereta Api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
- 2) Peningkatan keselamatan jalan melalui pengembangan sistem transportasi massal dan antar-Moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) serta peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan;
- 3) Pemantapan peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktivitas perekonomian;
- 4) Pemantapan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik perdesaan;
- 5) Pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitas dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (Terminal, penanganan sarana prasarana sumber daya air, waduk/embung, Kereta Api, Bandara Udara dan ASDP) dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas Desa;
- 6) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 7) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
- 8) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
- 9) Pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;

- 10) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;
- 11) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.

Penanganan permasalahan dan isu strategis **belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik**, didorong melalui prioritas Kabupaten yaitu **mempertahankan profesionalisme dan produktivitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel** (Prioritas Kab No. 1 Dalam RPJMD), dengan fokus pada :

- 1) Pemantapan peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik, penerapan janji pelayanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi; dan pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan kepada Kecamatan (Paten) sampai ke Tingkat Kelurahan/Desa;
- 2) Pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
- 3) Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government;
- 4) Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;
- 7) Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai **target sasaran pembangunan daerah tahun 2018** yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26%;
- b. Laju inflasi sebesar 4-5 %;
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54%
- d. Indeks Gini sebesar 0,46 dan Indeks dan Williamson sebesar 0,0100;
- e. Penurunan tingka kemiskinan menjadi sebesar 16,84% ;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5%

Tabel 4.2

Konsistensi Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas, Prioritas Pembangunan Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS JATENG
Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran (Isu Strategis No. 1)	Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja (Prioritas Kab No. 10 dalam RPJM)	Penguatan penanggula kemiskinan upaya peng beban peng peningkatat pendapatar pemberdaya mikro dan l masyarakat ((Prioritas P 2)
Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan (Isu Strategis No. 12)	memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa (Prioritas Kabupaten No. 7 dalam RPJMD)	
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (Isu Strategis No. 10)	Mempertahankan profesionalisme dan produktivitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Prioritas Kab No. 1 Dalam RPJMD)	
ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS JATENG
Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial (Isu Strategis No. 3)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya (Prioritas Kabupaten No. 2 dalam RPJMD)	Penguatan kompetensi daya manu diberbagai cakupan la dasar (Prioritas P

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITA JATEM
Belum optimalnya iklim investas I dan investasi (Isu Strategis No. 4)	Memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat. (Prioritas Kabupaten No. 5 dalam RPJMD)	Penguatan pangan dan didukung pembangunan pertanian d luas serta pengembangan pemanfaatan secara berk (Prioritas Pr
Pemenuhan kebutuhan energi belum merata (Isu Strategis No. 11)		
Belum optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas (Isu Strategis No. 7)	Meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi (Prioritas Kabupaten No. 3 dalam RPJMD)	
Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata (Isu Strategis No. 5)		
Kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah (Isu Strategis No. 8)	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan (Prioritas Kab No. 8)	Pemantapa pembangun infrastruktur memperhatikan keberlanjutan sumberdaya lingkungan

		pengurangan (Prioritas P
ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITA JATEN
Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam (Isu Strategis No. 9)	meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan (Prioritas Kabupaten No. 9 dalam RPJMD)	
Rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM (Isu Strategis No. 6)	Memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (Prioritas Kabupaten No. 4 dalam RPJMD)	Penguatan ekonomi da berbasis pa unggulan d berorientas ekonomi ke
	membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan system kerakyatan (Prioritas Kabupaten no. 6 dalam RPJMD)	(Prioritas P

erdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
1.	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.			

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	Penunjang Urusan-Perencanaan Pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Data/Informasi. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	BAPPEDA LITBANG
		2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	
		3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERBUP	1	
		4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd (%)	100	
	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil : <ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Administrasi Kependudukan. 	1. Prosentase penduduk ber KTP	80,76	DINDUK CAPIL
		2. Prosentase bayi berakte kelahiran	81,00	
		3. Rasio pasangan berakte nikah	0,91	
		4. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	1	
		5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	
	Bidang Statistik : <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 	1. Buku "Kabupaten Dalam Angka" (Dokumen)	1	BAPPEDA LITBANG
		2. Buku "PDRB Kabupaten" (Dokumen)	1	
		3. Buku "Indeks Harga konsumen Tribulanan" (Dokumen)	1	
		4. Buku "Kecamatan Dalam Angka" (Dokumen)	27	
		5. Buku "Nilai Tukar Petani" (Dokumen)	1	
		6. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) (Dokumen)	1	
		7. Buku Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (Dokumen)	1	
	Penunjang Urusan-Otonomi Daerah, Pemerintahan, Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian.			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Program Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi Berbasis Teknologi. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Program Peningkatan 	1. Pertumbuhan Ekonomi	6,26	SEMUA OPD
		2. Laju inflasi kabupaten	4,50	
3. Nilai Tukar Petani /NTP (%)		107,55		
4. Indeks Gini		0,460		
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,54		
6. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,0100	DPMPPPTSP	
7. Angka Kemiskinan (%)		16,84		
8. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (sistem)		1	SETDA	
9. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)		100		
10. Indeks Kepuasan Layanan		2		

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Masyarakat		
	• Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	11. Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca	Ada	BKD
	• Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.	12. Jumlah Pegawai Pemda yang mengikuti diklat (orang)	520	BKDD
	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13. Jumlah Pegawai Pemda yang lulus diklat (orang)	520	
	• Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14. Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM	119	
		15. Prosentase PNS lulusan S1	70,00	
		16. Jumlah pegawai	16.000	
		17. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (unit)	17	BKD
		18. Penertiban distribusi BBM dan gas (agen)	650	SETDA, Bag Perekonomian
	Bidang Kearsipan			
	• Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	1. Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	Dinarpusda
	• Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	550	
	Bidang Perpustakaan :			
	• Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	1. Jumlah perpustakaan	1.011	Dinarpusda
		2. Perpustakaan Daerah (buah)	1	
		3. Perpustakaan Keliling (buah)	7	
		4. Perpustakaan Sekolah (buah)	815	
		5. Perpustakaan Desa (buah)	100	
		6. Perpustakaan Rumah Ibadah (buah)	4	
		7. Taman Bacaan Masyarakat (buah)	71	
		8. Perguruan Tinggi	13	
		9. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	58.000,00	
		10. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (orang)	57.398	
		12. Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)	34.500	
		13. Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)	2.098	
	Bidang Ketransmigrasian			
	• Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	1. Jumlah Transmigran (KK)	30	DINNAKER KOP UKM
2.	Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.			
	Bidang Pendidikan :			
	• Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1. Angka melek huruf (%)	94,74	DINDIK
	• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.	2. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,98	
	• Program Pendidikan Menengah.	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :		
	• Program Pendidikan Non Formal.	- APK PAUD/TK (%)	81,92	
	• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	- APK SD/MI (%)	110,00	
	• Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.	- APK SMP/MTs/Paket B (%)	98,89	
		- APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	85,94	
		4. Angka Partisipasi Murni:		
		- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)	95,00	
		- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	85,00	

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Luar Biasa 	(%)		
		- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	58,00	
		5. Angka Partisipasi Sekolah (%):		
		- Pendidikan Dasar	111,04	
		- Pendidikan Menengah	96,50	
		6. Fasilitas Pendidikan :		
		- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	74,64	
		- Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	
		- Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	98,00	
		7. Angka Putus Sekolah (%) :		
		- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00	
		- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23	
		- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,50	
		8. Angka Melanjutkan (%):		
		- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	
		- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,00	
		- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	87,51	
		9. Angka Kelulusan (%) :		
		- AL SD/MI	100	
		- AL SMP/MTs	93,83	
	- AL SMA/SMK/MA	100		
	Bidang Kesehatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya. Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 	1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)	65	DINKES
		2. Angka kelangsungan hidup bayi	95	
		3. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)	7,0	
		4. Angka Harapan Hidup (tahun)	70,17	
		5. Persentase balita gizi buruk (%)	0,10	
		6. Prevalensi gizi kurang (%)	7,0	
		7. Prevalensi gizi lebih (%)	0,40	
		8. Rasio Posyandu per satuan Balita :		
		* Posyandu Pratama	5,30	
		* Posyandu Madya	29,10	
		* Posyandu Purnama	48,20	
		* Posyandu Mandiri	17,40	
		9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan Penduduk :		
		- Rasio Puskesmas persatuan Penduduk	144,40	
		- Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	0,76	
		- Rasio Pustu persatuan Penduduk	144,4	
		- Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,11	
		- Rasio Dokter persatuan Penduduk	0,11	
		- Dokter Spesialis	0,16	

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	Lansia. • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	- Dokter Gigi	0,02	
		- Rasio Tenaga Paramedis persatuan Penduduk	0,88	
		- Perawat	0,81	
		- Bidan	0,46	
		- Kefarmasian	0,08	
		- Nutrisionis	0,04	
		10. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	
		11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100	
		12. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	
		13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	
		14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	70	
		15. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	
		16. Cakupan kunjungan bayi (%)	100	
		17. Cakupan Puskesmas	144,40	
		18. Cakupan Puskesmas Pembantu	144,40	
3.	Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.			
	a. Bidang Pertanian :			
	• Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :		DINPERTAN KP
	• Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.	- Produktivitas padi (ton/ha)	6,29	
	• Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	- Produktivitas padi sawah (ton/ha)	6,24	
	• Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.	- Produktivitas padi gogo (ton/ha)	4,50	
	• Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.	- Produktivitas jagung (ton/ha)	7,50	
	• Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	- Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,43	
	• Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.	2. Produksi Hortikultura :		
	• Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	- Durian (kuintal)	34.600,00	
	• Program Pengembangan Agribisnis.	- Pisang (kuintal)	190.500	
	• Program Peningkatan	- Cabe Merah (kuintal)	13,14	
		3. Produksi Tanaman Perkebunan :		
		- Cengkeh (ton)	382,95	
		- Kelapa Dalam (ton)	14.962,41	
		- Kelapa Deras (ton)	55.114,56	
		- Cakupan bina kelompok tani	41,78	
		4. Jumlah Produksi Peternakan		
		- Daging	15.968.196	
		- Telur	17.103.465	
		- Susu	2.611.885	

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	Sarana dan Prasarana Pertanian.	5. Nilai Tukar Petani	107,55	BAPPEDA LITBANG
	Bidang Kelautan dan Perikanan			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar. 	1. Produksi perikanan (ton)	9.094,83	DINKANNAK
		2. Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	13,85	
		3. Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	400.000	
	Bidang Pariwisata			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program Pengembangan Kemitraan. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program Pengembangan Kemitraan. 	1. Jumlah Kunjungan wisata (orang)	1.250.000	DINPORA BUDPAR
	Bidang Perindustrian			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. 	Pertumbuhan Industri	2,115	DINPERIN DAG
		Cakupan bina kelompok pengrajin	699	
	Bidang Perdagangan			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan. Program Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 	1. Ekspor Bersih Perdagangan (ribu US \$)	19.900.000	DINPERIN DAG
		2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	718	
	Bidang Ketenagakerjaan			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,5	DINNAKER KOP UKM
		2. Angka partisipasi angkatan kerja	800,69	
		3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,52	
		4. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	
		5. Pencari kerja yang ditempatkan	63,85	
		6. Keselamatan dan	77,66	

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
		perlindungan		
	Bidang Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 	1. Luas hutan kritis dan lahan kritis (ha) 2. Luas Areal Hutan Rakyat (ha)	4.770 22.192	DINPERTAN KP
	Bidang Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 	1. Persentase luas lahan bersertifikat (%) 2. Penyelesaian izin lokasi (izin)	83,34 5	SETDA DPMPTSP
	Bidang Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Program Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Program Pemberdayaan Petani melalui Demonstrasi serta Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan 	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita (%) 2. Penguatan cadangan pangan (%) 3. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%) 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 5. Skor pola pangan harapan (%) 6. Pengawasan dan pembinaan pangan (%) 7. Penanganan daerah rawan pangan (%)	94 75 95 95 90 75 64	DINPERTAN KP
4.	Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.			
	Bidang Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (000) 3. Rasio daya serap tenaga kerja (%) 4. Lama proses perijinan (hari)	600 250.000 13 14	DPMPTSP
	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Program Pengembangan 	1. Persentase koperasi aktif 2. Usaha Mikro dan Kecil	74,00 583.097	DINNAKER KOP UKM

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
5.	Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Program Peningk Kualitas Kelembagaan Koperasi. 			
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.			
	Bidang Lingkungan Hidup	1. Penegakan hukum lingkungan (%)	100	DLH
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 	2. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	100	
		3. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100	
		4. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (dokumen)	600	
		5. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan /tanah untuk produksi biomasa (%)	20	
		6. Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan lahan kritis (Ha)	32,00	
	Bidang Energi	1. Pertambangan tanpa ijin (%)	5	PROV
		2. Pemanfaatan Air Tanah (%)	38	
		3. Pengelolaan kerusakan lingkungan pasca tambang(%)	30	
		4. Pemanfaatan energi baru terbarukan (unit)	925	
		5. Penanganan mitigasi bencana geologi (%)	71,1	
		6. Pemahaman masyarakat terhadap usaha panas bumi (%)	100	
Bidang Pekerjaan Umum	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	76,93	DPU	
<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan Jalan dan Jembatan. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Program Pengembangan 	2. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) (%)	79,40		
	3. Rasio Jaringan Irigasi	37,69	DLH	
	4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	79,40		
	5. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	3,07		
	6. Persentase penanganan sampah	15,03		
	7. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,57		
	8. Persentase Penduduk berakses air minum	59,40		DINPERKIM

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	<p>Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Banjir. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 	9. Persentase Luas pemukiman yang tertata	8,48	DINPERKIM
	<p>Bidang Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Lingkungan Sehat Perumahan. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	41,37	DINPERKIM
		2. Prosentase rumah layak huni	88,46	
		3. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	57,86	
		4. Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	41,37	
		5. Lingkungan pemukiman kumuh (%)	6,33	
		6. Rumah tangga pengguna listrik (%)	90,00	
		7. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	90	
	<p>Bidang Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. 	1. Rasio ijin trayek	0,074	DINHUB
		2. Jumlah Terminal Bis (buah)	6	
		3. Kepemilikan KIR angkutan umum (buah)	4.625	
		4. Rasio Penerangan Jalan Umum (%)	62,5	
	<p>Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 	1. Web site milik pemerintah daerah (buah)	56	DINKOMINFO
		2. Pameran/expo (kegiatan)	2	
		3. Jumlah jaringan komunikasi	13	
6.	<p>Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>Bidang Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tata Ruang. Program Pemanfaatan Tata Ruang. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian. <p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15,80	DLH
		2. Bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	33,00	SETDA

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50,00	DPPKBP3A
		2. Menurunnya Rasio KDRT	0,01	
		3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	65,00	
		4. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	
		5. Persentase perempuan di lembaga legislative	30,00	
		6. Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak	35,00	
		7. Rata-rata Jumlah anak per keluarga (anak)	2,20	
	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera <ul style="list-style-type: none"> Program Keluarga Berencana. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Program Pelayanan Kontrasepsi. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 	1. Rasio akseptor KB	74,00	DPPKBP3A
		2. Cakupan peserta KB aktif (%)	74,00	
		3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	160.000	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	37,59	DINSOS PERMASDES
		2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	127	
		3. Jumlah LSM	136	
		4. LPM Berprestasi (%)	1,20	
		5. PKK aktif (%)	70,28	
		6. Posyandu aktif (%)	100	
		7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta rupiah)	1.571,00	
		8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	57,14	
	Bidang Sosial <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program Pembinaan Anak Terlantar. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat 	1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	DINSOS PERMASDES

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	<p>Dan Trauma.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 			
7.	<p>Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.</p>			
	<p>Bidang Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Program Pengembangan Nilai Budaya. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah grup kesenian (grup) Jumlah gedung kesenian (unit) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) 	<p>1.523</p> <p>4</p> <p>9</p> <p>80</p>	DINPORA BUDPAR
	<p>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 	<ol style="list-style-type: none"> Lapangan olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Provinsi (emas) Tingkat Nasional (emas) Tingkat Internasional (emas) Peningkatan Prestasi Kepemudaan: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Provinsi (prestasi) Tingkat Nasional (prestasi) Tingkat Internasional (prestasi) 	<p>662</p> <p>135</p> <p>20</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>3</p> <p>1</p>	DINPORA BUDPAR
	<p>Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Penegakan PERDA (%) Angka kriminalitas yang 	<p>47</p> <p>90</p> <p>95</p> <p>125</p>	KESBANG POL SATPOL PP

No	Misi, Urusan dan Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	OPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan. • Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. • Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan. • Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. • Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri • Program Pendidikan Politik Masyarakat • Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan. • Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. • Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan. • Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 	tertangani		
		5. Menurunnya Jumlah Unjuk Rasa (kasus)	12	
		6. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,4	
		7. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	65	
		8. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	6,4	
		9. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100	
		10. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	
		11. Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik	100	BPBD
		12. Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana	4	

Dalam rangka mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018, maka ditetapkan kebutuhan pendanaan secara indikatif pada tiap prioritas pembangunan daerah, yang meliputi belanja langsung (termasuk BLUD dan Eks BAU), sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Pagu Indikatif pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas 2018

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	No.	BIDANG	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total		
Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran (Isu Strategis No. 1)	Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja (Prioritas Kab No. 10 dalam RPJM)	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin ((Prioritas Provinsi No. 2)	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan. (Nawa Cita No. 9)	1	Sosial	1	Sosial		52	11.609.600.000	-	-	11.609.600.000	
						1	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	5.095.000.000	-	-	5.095.000.000
						2	2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13	2.782.600.000	-	-	2.782.600.000
						3	3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	1.210.000.000	-	-	1.210.000.000
						4	4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	100.000.000	-	-	100.000.000
						5	5	Program Pembinaan Panti asuhan/panti jompo	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	50.000.000	-	-	50.000.000
						6	6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	150.000.000	-	-	150.000.000
									Pendukung Operasional OPD					

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	1.466.000.000	-	-	1.466.000.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	716.000.000	-	-	716.000.000
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	40.000.000	-	-	40.000.000
				2	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		37	10.362.551.000	-	-	10.362.551.000	
					7	1	Program Peningkatan Kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	720.000.000	-	-	720.000.000
					8	2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	10	2.010.000.000	-	-	2.010.000.000
					9	3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	435.000.000	-	-	435.000.000
							Pendukung Operasional OPD						
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	6	2.350.000.000	-	-	2.350.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	4.772.551.000	-	-	4.772.551.000	
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	75.000.000	-	-	75.000.000	
				3	trans migrasi	3	transmigrasi		2	250.000.000	-	-	250.000.000	
					10	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	250.000.000	-	-	250.000.000	
	Total PK 10 =									22.222.151.000				
Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan (Isu Strategis No. 12)	memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa (Prioritas Kabupaten No. 7 dalam RPJMD)			4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		15	3.155.000.000	600.000.000	-	3.755.000.000	
						11	1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	400.000.000	-	-	400.000.000
						12	2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	100.000.000	-	-	100.000.000
						13	3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	525.000.000	-	-	525.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total			
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (Isu Strategis No. 10)	Mempertahankan profesionalisme dan produktivitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Prioritas Kab No. 1 Dalam RPJMD)		Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman (Nawa Cita No. 1)	6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6			53	33.188.285.000	-	-	33.188.285.000		
			Dengan Prioritas Nasional :				20	1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	300.000.000	-	-	300.000.000
			- Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan (Prioritas Nasional No. 10)				21	2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	1.425.000.000	-	-	1.425.000.000
						22	3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	17.000.000.000	-	-	17.000.000.000	
						23	4	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	4.347.200.000	-	-	4.347.200.000	
						24	5	Program pendidikan politik masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	250.000.000	-	-	250.000.000	
						25	6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	345.000.000	-	-	345.000.000	

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
					26	7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000
					27	8	Program Peningkatan kesadaran kepatuhan hukum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	2.142.815.000	-	-	2.142.815.000
					28	9	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	1.783.990.000	-	-	1.783.990.000
					29	10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	140.000.000	-	-	140.000.000
					30	11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	2	200.000.000	-	-	200.000.000
							Pendukung Operasional OPD						
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	3.240.000.000	-	-	3.240.000.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	698.280.000	-	-	698.280.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	16.000.000	-	-	16.000.000
								Total PN 1 =			33.188.285.000			
			Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis (Nawa Cita No. 2)	7	Komunikasi dan Informatika	7		Komunikasi dan Informatika		32	12.246.400.000	-	-	12.246.400.000
						31	1	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	450.000.000	-	-	450.000.000
						32	2	Program kerjasama Informasi dengan Media Massa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	425.000.000	-	-	425.000.000
						33	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	7.575.000.000	-	-	7.575.000.000
						34	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	75.000.000	-	-	75.000.000
						35	5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	2.361.400.000	-	-	2.361.400.000
								Pendukung Operasional OPD						
							1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	650.000.000	-	-	650.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	670.000.000	-	670.000.000	
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	40.000.000	-	40.000.000	
				8	Admi nistra si Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		28	9.928.400.000	-	3.667.216.000	13.595.616.000
					36	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	6.565.000.000	-	3.667.216.000	10.232.216.000
							Pendukung Operasional OPD						
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	963.400.000	-	-	963.400.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	2.350.000.000	-	-	2.350.000.000
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	50.000.000	-	-	50.000.000
				9	Admi nistra si Pemer	9	Administrasi Pemerintahan		164	98.162.815.453	-	270.000.000	98.297.815.453

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
				intahan										
					37	1	Program legislasi daerah	SEKRETARIAT DAERAH	3	360.000.000	-	-	360.000.000	
					38	2	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	21	3.040.000.000	-	150.000.000	3.190.000.000	
					39	3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD	7	6.810.150.000	-	120.000.000	6.930.150.000	
					40	4	Program peningkatan disiplin aparatur	SEKRETARIAT DPRD	1	165.000.000	-	-	165.000.000	
					41	5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SEKRETARIAT DPRD	8	15.987.700.000	-	-	15.987.700.000	
					42	6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SEKRETARIAT DAERAH	2	410.000.000	-	-	410.000.000	
					43	7	Program peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	3	260.000.000	-	-	260.000.000	
					44	8	Program Peningkatan Pelayanan Publik	SEKRETARIAT DAERAH, 27 KECAMATAN	60	11.930.920.100	-	-	11.930.920.100	
					45	9	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	400.000.000	-	-	400.000.000	
							Pendukung Operasional OPD							
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN KEUANGAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH,	50	28.931.872.253	-	-	28.796.872.253	

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
								SEKRETARIAT DPRD, 27 KECAMATAN						
						2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BADAN KEUANGAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, 27 KECAMATAN	6	29.767.173.100	-	-	29.767.173.100	
						3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN KEUANGAN DAERAH, SEKRETARIAT DPRD	2	100.000.000	-	-	100.000.000	
				10	Kearsipan	10		Kearsipan	22	1.803.400.000	-	-	1.803.400.000	
						46	1	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5	195.000.000	-	-	195.000.000
						47	2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7	285.000.000	-	-	285.000.000
								Pendukung Operasional OPD						
							1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5	948.400.000	-	-	948.400.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total		
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4	350.000.000	-	-	350.000.000	
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1	25.000.000	-	-	25.000.000	
				1	Penelitian dan Pengembangan	1	Penelitian dan Pengembangan		1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	
						48	1	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	1	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
				1	Persandian	1	Persandian		1	430.000.000	-	-	430.000.000	
						49	1	Pogram Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	430.000.000	-	-	430.000.000
				1	Statistik	1	Statistik		4	550.000.000	-	-	550.000.000	
						50	1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	550.000.000	-	-	550.000.000
										124.121.015.453				
				1	Kepegawaian	1	Kepegawaian		23	5.560.702.000	-	-	5.560.702.000	
						51	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	14	3.360.000.000	-	-	3.360.000.000
								Pendukung Operasional OPD						

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
			dan terpercaya (Nawa Cita No. 4)			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5	1.498.752.000	-	1.498.752.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4	701.950.000	-	701.950.000
				1	Pendidikan dan Pelatihan	15	Pendidikan dan Pelatihan		3	3.795.350.000	-	3.795.350.000
					52	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	3	3.795.350.000	-	3.795.350.000
				1	Keuangan	16	Keuangan		61	33.681.726.100	-	33.681.726.100
					53	1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH, 27 KECAMATAN	61	33.681.726.100	-	33.681.726.100
				1	Pengawasan	17	Pengawasan		12	3.780.500.000	-	3.780.500.000
					54	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT	2	2.155.000.000	-	2.155.000.000
					55	2	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	INSPEKTORAT	1	150.000.000	-	150.000.000
							Pendukung Operasional OPD					
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT	5	850.500.000	-	850.500.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	INSPEKTORAT	4	625.000.000	-	-	625.000.000
				18	Perencanaan	18	Perencanaan		22	5.050.000.000	400.000.000	-	5.450.000.000
					56	1	Program Pengembangan data/informasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	1	100.000.000	100.000.000	-	200.000.000
					57	2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	1	250.000.000	-	-	250.000.000
					58	3	Program perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	4	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000
					59	4	Program perencanaan pembangunan ekonomi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	3	700.000.000	50.000.000	-	750.000.000
					60	5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	4	1.150.000.000	-	-	1.150.000.000
					61	6	Program perencanaan sosial budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	6	950.000.000	250.000.000	-	1.200.000.000
					62	7	Program Perencanaan Tata Ruang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	3	800.000.000	-	-	800.000.000
										209.177.578.53			
										235.959.729.53			

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total			
			Total PN 4 =						51.868.278.100						
Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial (Isu Strategis No. 3)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya (Prioritas Kabupaten No. 2 dalam RPJMD)	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar (Prioritas Provinsi No. 3)	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita No. 5)	19	Kesehatan	19									
						63	1	Manajemen dan Kebijakan kesehatan	DINAS KESEHATAN	1	100.000.000	-	-	100.000.000	
			Dengan prioritas nasional :				64	2	Pencegahan Penyakit Tidak Menular	DINAS KESEHATAN	1	300.000.000	-	-	300.000.000
			- Kesehatan (Prioritas Nasional No. 2)				65	3	Pendukung Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	2	150.000.000	-	-	150.000.000
						66	4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	2	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	
						67	5	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS (BLUD)	1	233.400.000.000	-	-	233.400.000.000	
						68	6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DINAS KESEHATAN	2	32.000.000.000	-	-	32.000.000.000	
						69	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINAS KESEHATAN	3	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	
						70	8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	DINAS KESEHATAN	7	21.500.000.000	27.500.000.000	-	-	49.000.000.000
			71	9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	11	39.000.000.000	30.713.752.000	49.597.635.425	-	119.311.387.425			

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
								(BLUD)						
					72	1	0	Program Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN	1	100.000.000	-	-	100.000.000
					73	1	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS KESEHATAN	1	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000
					74	1	2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN	1	400.000.000	-	-	400.000.000
					75	1	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	DINAS KESEHATAN	2	495.000.000	-	-	495.000.000
					76	1	4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	2	300.000.000	-	-	300.000.000
					77	1	5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	91	118.454.000.000	-	121.695.000.000	240.149.000.000
								Pendukung Operasional OPD						
						1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN	4	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000
						2		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS KESEHATAN	3	440.000.000	-	-	440.000.000
						3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS KESEHATAN	1	150.000.000	-	-	150.000.000
				20	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren	20		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		22	3.181.000.000	-	2.500.000.000	5.681.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
				cana									
					78	1	Program Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	4	550.000.000	-	2.500.000.000	3.050.000.000
					79	2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	110.000.000	-	-	110.000.000
					80	3	Program pelayanan kontrasepsi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	310.000.000	-	-	310.000.000
					81	4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	150.000.000	-	-	150.000.000
					82	5	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	47.000.000	-	-	47.000.000
					83	6	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	150.000.000	-	-	150.000.000
					84	7	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	100.000.000	-	-	100.000.000
					85	8	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	150.000.000	-	-	150.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total			
						86	9	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	50.000.000	-	-	50.000.000		
								Pendukung Operasional OPD								
							1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	5	1.114.000.000	-	-	1.114.000.000		
							2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	4	400.000.000	-	-	400.000.000		
							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	1	50.000.000	-	-	50.000.000		
										458.670.000.00						
Masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi Pendidikan (Isu Strategis No. 2)			Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional (Nawa Cita No. 8)	2	Pendidikan	2		Pendidikan		219	78.632.450.000	30.759.700.000	76.271.670.258	185.663.820.258		
						1	87	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	12	15.675.000.000	-	-	15.675.000.000	
							88	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	24	2.140.000.000	-	22.531.800.000	24.671.800.000	
							89	3	Program Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN	29	6.898.400.000	-	150.000.000	7.048.400.000	
							90	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN	10	21.600.000.000	30.759.700.000	53.589.870.258	105.949.570.258	
							91	5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DINAS PENDIDIKAN	108	24.682.200.000	-	-	24.682.200.000	

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						Pendukung Operasional OPD							
					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENDIDIKAN	32	6.811.850.000	-	-	6.811.850.000	
					2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PENDIDIKAN	4	825.000.000	-	-	825.000.000	
				2 2	2 2	Kebudayaan		13	4.490.000.000	-	1.970.320.000	6.460.320.000	
					92	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	2.465.000.000	-	1.970.320.000	4.435.320.000
					93	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000
					94	3	Program Pengembangan Nilai Budaya	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	125.000.000	-	-	125.000.000
				2 3	3 3	Perpustakaan		14	670.000.000	-	-	670.000.000	
					95	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	14	670.000.000	-	-	670.000.000
						Total PN 8 =			83.792.450.000				
				2 4	4 4	Kepemudaan dan Olah Raga		27	9.366.020.000	-	3.902.440.000	13.268.460.000	
						Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor							

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
			strategis ekonomi domestik (Nawa Cita No. 7)		96	1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3	925.000.000	-	-	925.000.000
					97	2	Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3	750.000.000	-	3.902.440.000	4.652.440.000
					98	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	2.175.000.000	-	-	2.175.000.000
					99	4	Program Pengembangan dan Keserasian Pemuda	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	50.000.000	-	-	50.000.000
					100	5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	100.000.000	-	-	100.000.000
					101	6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000
					102	7	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	200.000.000	-	-	200.000.000
					103	8	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	75.000.000	-	-	75.000.000
								Pendukung Operasional OPD					

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5	2.986.020.000	-	-	2.986.020.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	755.000.000	-	-	755.000.000
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	50.000.000	-	-	50.000.000
	Total PK 2=								551.828.470.000				
		Total PP 3=							551.828.470.000				
			Total PN 7=						9.366.020.000				
Belum optimalnya iklim investas I dan investasi (Isu Strategis No. 4)	Memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat. (Prioritas Kabupaten No. 5 dalam RPJMD)	Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan (Prioritas Provinsi No. 4)	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawa Cita No. 3)	25	Penanaman Modal	25	Penanaman Modal		18	1.899.000.000	-	-	1.899.000.000
					104	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	2	150.000.000	-	-	150.000.000
					105	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3	375.000.000	-	-	375.000.000
					106	3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	2	235.000.000	-	-	235.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total			
						107	4	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1	40.000.000	-	-	40.000.000		
								Pendukung Operasional OPD								
							1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	5	694.000.000	-	-	694.000.000		
							2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4	365.000.000	-	-	365.000.000		
							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1	40.000.000	-	-	40.000.000		
Pemenuhan kebutuhan energi belum merata (Isu Strategis No. 11)			Dengan Prioritas Nasional :	2	Energi dan sumber daya mineral	26		Energi dan sumber daya mineral		5	7.600.000.000	-	-	7.600.000.000		
			- Ketahanan Energi (Prioritas Nasional No. 5)			108	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	DINAS PERHUBUNGAN	5	7.600.000.000	-	-	7.600.000.000		
	Total PK 5=													9.499.000.000		
Belum	Meningkatkan			2	Perta	2		Pertanian		43	24.455.000.000	-	60.246.7	84.701.713.500		

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total				
optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas (Isu Strategis No. 7)	pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi (Prioritas Kabupaten No. 3 dalam RPJMD)			7	nian	7					13.500					
				-	Ketahanan Pangan (Prioritas Nasional No. 6)			109	1	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	100.000.000	-	-	100.000.000
								110	2	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	5	145.000.000	-	4.180.000.000	4.325.000.000
								111	3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	125.000.000	-	-	125.000.000
								112	4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	250.000.000	-	-	250.000.000
								113	5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4	6.190.000.000	-	17.694.250.000	23.884.250.000
								114	6	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1	50.000.000	-	-	50.000.000
								115	7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	5	695.000.000	-	2.970.000.000	3.665.000.000
								116	8	Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12	14.613.500.000	-	35.402.463.500	50.015.963.500
								117	9	Program Penyusunan dan Penyebarluasan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	50.000.000	-	-	50.000.000
						Pendukung Operasional OPD										

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.		Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5	1.552.000.000	-	-	1.552.000.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4	634.500.000	-	-	634.500.000
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	50.000.000	-	-	50.000.000
				28	Pangan	28	Pangan		8	2.350.000.000	-	270.000.000	2.620.000.000
						118	1 Program pemberdayaan petani melalui demonstrasi serta pengawalan dan pendampingan penyuluhan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	50.000.000	-	270.000.000	320.000.000
						119	2 Program pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000
						120	3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000
				29	Kelautan dan perikanan	29	Kelautan dan perikanan		25	5.501.800.000	725.000.000	2.000.000.000	8.226.800.000
						121	1 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	7	245.000.000	725.000.000	470.000.000	1.440.000.000
						122	2 Program pengembangan budidaya perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	5	2.145.000.000	-	1.530.000.000	3.675.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
ur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah (Isu Strategis No. 8)	daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan (Prioritas Kab No. 8)	memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan bencana (Prioritas Provinsi No. 5)	Kemaritiman (Prioritas Nasional No. 8)	dan Penataan Ruang										
						127	1	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	100.000.000	-	-	100.000.000
						128	2	Program Inspeksi Kondisi Sumber Daya Air	DINAS PEKERJAAN UMUM	2	200.000.000	-	-	200.000.000
						129	3	Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	375.000.000	-	-	375.000.000
						130	4	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	16	140.805.000.000	86.407.500.000	311.735.000.000	538.947.500.000
						131	6	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	14.222.000.000	-	-	14.222.000.000
						132	7	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	16.325.625.000	-	-	16.325.625.000
						133	8	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Sumber Daya Air	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	100.000.000	-	-	100.000.000
						134	9	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	150.000.000	-	-	150.000.000
						135	10	Program Pembangunan turap/talud/brojong	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	21.675.000.000	-	-	21.675.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total
					136	1 1 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM	3	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000
					137	1 2 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM	9	17.275.000.000	5.000.000.000	41.542.000.000	63.817.000.000
					138	1 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	14.250.000.000	-	16.200.000.000	30.450.000.000
					139	1 4 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM	3	5.600.000.000	8.000.000.000	-	13.600.000.000
					140	1 5 Program pengendalian banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM	2	1.050.000.000	-	-	1.050.000.000
					141	1 6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM	3	350.000.000	-	-	350.000.000
					142	1 7 Program penyediaan dan pengolahan air baku	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	2.450.000.000	-	-	2.450.000.000
					143	1 8 Program Penyediaan Fasilitas Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	7.050.000.000	8.000.000.000	-	15.050.000.000
					144	1 9 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	750.000.000	-	-	750.000.000
					145	2 0 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	6	29.341.760.000	-	-	29.341.760.000
					146	2 1 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	DINAS PEKERJAAN UMUM	2	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
						Pendukung Operasional OPD							
					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	3.210.000.000	-	-	3.210.000.000	
					2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	32.400.000.000	-	-	32.400.000.000	
					3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	330.000.000	-	-	330.000.000	
				3 2	3 2	Perhubungan		47	18.414.988.800	11.900.000.000	6.950.000.000	37.264.988.800	
					147	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	16	6.000.000.000	11.650.000.000	6.950.000.000	24.600.000.000
					148	2	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	4	500.000.000	-	-	500.000.000
					149	3	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN	2	6.100.000.000	-	-	6.100.000.000
					150	4	Program peningkatan pelayanan angkutan	DINAS PERHUBUNGAN	7	1.170.000.000	250.000.000	-	1.420.000.000
					151	5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	4	1.244.988.800	-	-	1.244.988.800
						Pendukung Operasional OPD							

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERHUBUNGAN	9	2.820.800.000	-	-	2.820.800.000	
					2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PERHUBUNGAN	4	479.200.000	-	-	479.200.000	
					3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PERHUBUNGAN	1	100.000.000	-	-	100.000.000	
			- Perumahan dan Pemukiman (Prioritas Nasional No. 3)	3 3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 3		9	5.475.000.000	-	7.500.000.000	12.975.000.000	
					152	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	4.975.000.000	-	-	4.975.000.000
					153	2	Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	500.000.000	-	7.500.000.000	8.000.000.000
									334.549.373.800				
			- Pembangunan Wilayah (Prioritas Nasional No. 9)	3 4	Pertanahan	3 4		3	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	
					154	1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
				3 5	Lingkungan Hidup	3 5		58	31.745.000.000	3.500.000.000	12.149.400.000	47.394.400.000	
Menurunkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam (Isu Strategis No. 9)	meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan (Prioritas Kabupaten No.												
	Total PK 8=												

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
	9 dalam RPJMD)				155	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	16.000.000.000	3.500.000.000	-	19.500.000.000
					156	2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	9.670.000.000	-	12.149.400.000	21.819.400.000
					157	3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	3.400.000.000	-	-	3.400.000.000
					158	4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	775.000.000	-	-	775.000.000
					159	5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	250.000.000	-	-	250.000.000
							Pendukung Operasional OPD						
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	1.081.000.000	-	-	1.081.000.000
						2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	519.000.000	-	-	519.000.000
						3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	50.000.000	-	-	50.000.000
	Total PK 9=									32.745.000.000			
		Total PP 5=								367.294.373.800			
			Total PN 3=							422.707.688.800			
Rendahnya daya saing produk	Memberdayakan dan menguatkan	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang	Meningkatkan produktivitas rakyat dan	3 6	Perdagangan	3 6	Perdagangan		21	17.460.000.000	-	3.000.000.000	20.460.000.000

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.	Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total			
lokal Koperasi, IKM dan UMKM (Isu Strategis No. 6)	UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (Prioritas Kabupaten No. 4 dalam RPJMD)	berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan (Prioritas Provinsi No. 1)	daya saing di pasar internasional (Nawa Cita No. 6)		160	1	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	2.650.000.000	-	-	2.650.000.000		
			Dengan Prioritas Nasional :		161	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri dan Luar Negri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17	14.385.000.000	-	3.000.000.000	17.385.000.000		
			- Pengembangan dunia usaha dan (Prioritas Nasional No. 4)		162	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	425.000.000	-	-	425.000.000		
				37	perindustrian	37		perindustrian		18	5.090.000.000	-	-	5.090.000.000	
							163	1	Program Penataan Struktur Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	250.000.000	-	-	250.000.000
							164	2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	1.350.000.000	-	-	1.350.000.000
							165	3	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	50.000.000	-	-	50.000.000
							166	4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	50.000.000	-	-	50.000.000
									Pendukung Operasional OPD						
								1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	2.700.000.000	-	-	2.700.000.000
					2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	650.000.000	-	-	650.000.000			

ISU STRATEGIS	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2018	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2018	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)	BIDANG	No.			Bidang / Program	OPD Pelaksana	jml keg	Jumlah APBD Kab	Jumlah APBD Prov	Jumlah APBN	Jumlah Total	
							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	40.000.000	-	-	40.000.000	
	Total PK 4=										22.550.000.000				
	membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan system kerakyatan (Prioritas Kabupaten no. 6 dalam RPJMD)			38	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	38		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		11	1.205.000.000	-	-	1.205.000.000	
							167	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	595.000.000	-	-	595.000.000
							168	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	375.000.000	-	-	375.000.000
							169	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	235.000.000	-	-	235.000.000
	Total PK 6=										1.205.000.000				
		Total PP 1=									23.755.000.000				
			Total PN 6=								23.755.000.000				
									TOTAL		1.234.250.888.353	213.505.952.000	730.349.700.183	2.177.971.540.536	

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Banyumas

4.3.1 Gambaran Wilayah Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut :

1. Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah (disebut dengan kawasan Purwokerto dan sekitarnya) dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto (ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/PKW di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Sumpiuh, Wangon dan sebagainya. Penetapan wilayah ini bertitik tolak dari kondisi:
 - a. Fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di bagian barat daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskala nasional seperti perguruan tinggi, kawasan pariwisata Baturraden, dan menjadi titik penting pertumbuhan wilayah serta perhubungan transportasi Jakarta - Surabaya melalui wilayah selatan.
 - b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan industri, serta merupakan wilayah kerjasama strategis Provinsi Jawa Tengah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).

2. Dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsi Jawa Tengah, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah basis pertanian.
 - b. Kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
 - c. Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan.

4.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis wilayah Kabupaten Banyumas.

Pola ruang wilayah Kabupaten Banyumas adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi kawasan lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.

Kawasan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung.
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.
- c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar.

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang.
 - e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan.
 - f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbunan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.
 - g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas: kawasan lindung plasma nutfah di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.
2. Kawasan Budidaya
- Kawasan budidaya terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :
 - Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - b. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas beberapa kawasan yaitu:
 - Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas kurang lebih 32.310 (tiga puluh dua ribu tiga ratus

- sepuluh) hektar dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar;
- Kawasan peruntukan hortikultura yang dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten;
 - Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - Kawasan peruntukan peternakan terdiri atas ternak besar yaitu meliputi ternak Sapi Potong dan Sapi Perah, ternak Kerbau dan ternak Kuda, ternak kecil meliputi ternak Kambing, Domba dan ternak Babi, unggas meliputi ternak Ayam Ras, ternak Ayam Bukan Ras dan ternak Itik, sedangkan aneka ternak meliputi ternak Puyuh dan ternak Kelinci.
- d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar.
- f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajikan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya.
- g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundang-undangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (nodes), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.
- i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701/Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701/ Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Struktur ruang Kabupaten Banyumas adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional di Kabupaten Banyumas. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

1. Sistem Pusat Kegiatan yang meliputi Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan.

Sistem Perdesaan terdiri atas Pusat Kegiatan Perdesaan dan Fungsi Pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sedangkan Sistem Perkotaan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Purwokerto, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, dan perkotaan Wangon dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi 19 perkotaan Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
 - b. Fungsi Pelayanan meliputi PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan, PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas, PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten, PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri, PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri, dan PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi perkeretaapian, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.

- b. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu *River Voyage* dan pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu *River Voyage*.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian terdiri atas:

- a. Pengembangan prasarana kereta api meliputi pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo; pengembangan jalur ganda Cirebon-Kroya; pengembangan jalur ganda Kroya-Kutoarjo; dan penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon-Kroya-Kutoarjo.
- b. Pengembangan sarana kereta api berupa pengembangan stasiun kereta api melalui peningkatan stasiun eksisting di wilayah Kabupaten.
- c. Peningkatan pelayanan kereta api meliputi peningkatan akses terhadap layanan kereta api dan jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

- a. Sistem jaringan prasarana energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi; jaringan transmisi tenaga listrik berupa pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt; serta tenaga listrik yang terdiri dari pembangkit listrik dan gardu listrik. Pembangkit listrik terdiri dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi Kecamatan Baturaden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Karanglewas, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah tidak terjangkau sambungan jaringan listrik meliputi Kecamatan Kebasen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Sumpiuh, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan Gardu induk meliputi Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Purwokerto Selatan.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas pembangunan jaringan telepon kabel diseluruh wilayah Kabupaten dan pembangunan

jaringan telepon nirkabel meliputi pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir, pembangunan menara telekomunikasi bersama dan pengembangan jaringan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten.

c. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

- Sistem wilayah sungai meliputi pengelolaan Wilayah Sungai; peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; serta konservasi situ.
- Sistem jaringan irigasi meliputi mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- Sistem pengelolaan air baku, meliputi pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku; pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum; pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan; peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani

d. Jaringan prasarana wilayah lainnya, terdiri atas :

- Sistem persampahan meliputi pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang), pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah meliputi Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul di Kecamatan Ajibarang, Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis serta peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.
- Sistem jaringan air limbah, meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site* pada

kawasan perkotaan, dan pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri.

- Sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan meliputi inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase, pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten, penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan dan pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan.
- Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi melalui 5 (lima) kecamatan, jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir, jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi, ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi lapangan terbuka, sekolah, kantor-kantor pemerintah dan puskesmas.
- Sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial, dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.

2. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Kembaran, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja.
- Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon, dengan komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan meliputi Padi Sawah, Kacang Panjang, Gula Kelapa, Ayam Kampung, Ayam Pedaging, dan Ikan Gurami di Kecamatan Cilongok; Jamur, Durian, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, Nilam, dan Nila di Kecamatan Ajibarang; Padi, Alpokat, Sawo, Jambu Biji, Kelapa Dalam, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Jatilawang; dan Jamur, Semangka, Sawo, Rambutan, Jambu Biji, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Wangon.
- Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Cilongok.
- Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Tambak.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.

4.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelaraskan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kabupaten Banyumas. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis melalui pilihan satu atau lebih strategi dan pada saat yang sama, suatu strategi yang dipilih dapat menjadi jalur penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lebih dari satu isu strategis. Sedangkan Arah Kebijakan dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai dengan arahan Presiden RI., strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma pembangunan untuk semua (*Development for All*). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi dan arah kebijakan, salah satunya pada sektor infrastruktur, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan pembangunan tidak sama untuk setiap wilayah. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antar wilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antarwilayah.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, pada sektor yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu: Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah.
2. Meningkatkan kualitas penyediaan perumahan dan pemukiman.
3. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan.
4. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni.
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
6. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup.
7. Optimalisasi pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
2. Peningkatan pemerataan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/ jembatan dan jaringan irigasi perkotaan dan pedesaan.
3. Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan.
4. Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman.
5. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.
6. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.
7. Peningkatan fasilitas dan pembangunan sarana prasarana sosial.
8. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif.
9. Pengendalian kelayakan angkutan. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung.
10. Pengembangan dan optimalisasi terminal.
11. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni.
12. Peningkatan pengembangan manajemen persampahan.
13. Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH.

14. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup.
15. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup.
16. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4.3.4 Strategi Pengembangan Sektor Unggulan

Strategi pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Banyumas yaitu melalui :

1. Pembangunan kedaulatan pangan melalui pengembangan pertanian agribisnis dengan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian;
2. Pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya;
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan peran serta sektor agribisnis melalui inovasi terhadap produk-produk pertanian serta upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah/produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain

- serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain;
5. Peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional;
 6. Pengembangan Desa Usaha Mandiri (perikanan, peternakan, perikanan, industri kecil dan lain-lain);
 7. Pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product* (OPOV).

4.3.5 Strategi Pembangunan Pariwisata

Pada tahun 2018 yang merupakan tahun keberlanjutan dengan target wisatawan 1.200.000/tahun dan 1.250.000/tahun pada tahun 2018. Strategi dan kebijakan utama yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pemasaran/promosi pariwisata sebagai daya tarik wisata melalui penyelenggaraan event-event pariwisata di obyek-obyek wisata, partisipasi dalam pameran pariwisata di luar wilayah Jawa Tengah, promosi pariwisata melalui expos kepariwisataan bekerjasama dengan biro perjalanan di luar Kab. Banyumas.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata guna meningkatkan kualitas layanan terhadap wisatawan melalui pembinaan dan kerjasama antara pemerintah dan para pelaku pariwisata/organisasi pariwisata, pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata di Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek-obyek wisata milik pemerintah maupun milik desa penyangga pariwisata melalui penambahan sarana dan prasarana pariwisata dengan bantuan dana dari Provinsi sampai Pusat maupun dari Pihak ke III serta adanya bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat pelaku pariwisata, peningkatan pengamanan dan kebersihan di obyek-obyek wisata pada hari libur dan hari besar.

4.3.6 Strategi Penanggulangan Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Strategi penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim di Kabupaten Banyumas yaitu melalui:

1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana

2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana
4. Penyusunan sistem kebencanaan
5. Penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Strategi penanggulangan perubahan iklim di Kabupaten Banyumas yaitu melalui:

1. Pelaksanaan edukasi pada seluruh stakeholder terhadap pentingnya *Green Economy* sehingga secara sadar dan sukarela dapat berkontribusi mendukung penuh aksi mitigasi yang telah dirumuskan dalam dokumen Perencanaan Tata Guna Lahan Untuk Mendukung Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Banyumas
2. Mengintroduksi dokumen Perencanaan Tata Guna Lahan Untuk Mendukung Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Banyumas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas/OPD
3. Pemberian dukungan pendanaan penuh dari Pemerintah Daerah
4. Pembentukan tim *Green Economy* berbasis lahan untuk monitoring program/kegiatan agar berjalan dengan efektif
5. Memperkuat inisiatif *green economy* melalui Peraturan Daerah yang dibuat secara terpadu dengan kebijakan yang lain sehingga memberikan panduan kepada seluruh pihak dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan arah kebijaksanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan sarana prasarana berbasis kebutuhan
2. Penentuan skala prioritas pemberdayaan masyarakat di wilayah resiko bencana
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sert akuntabel
4. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan dan kearifan lokal
5. Penguatan regulasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana

4.3.7 Strategi Pengurangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pada pasal 1 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Upaya tersebut ditempuh dengan tiga jalur pembangunan yakni:

- a. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (*pro growth*);
- b. Menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif (*pro job*);
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar dan merevitalisasi sektor-sektor yang menjadi sumberdaya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor policy*), dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Prosentase penduduk miskin tahun 2011-2014 di Kabupaten Banyumas, menunjukkan penurunan. Pada tahun 2011, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 21,11% ; tahun 2012 prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 19,44%; tahun 2013 prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas menurun menjadi 18,44%; Tahun 2014 prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas menurun sebesar 17,56 %.

Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin melalui bea siswa miskin;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin melalui Jamkesda;

3. Peningkatan peran serta sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah;
5. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, dengan pengembangan Desa Usaha Mandiri
6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penjunjang kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatnya kualitas sanitasi dan ketersediaan rumah layak huni;
7. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan;

Sedangkan arah kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Peningkatan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan;
7. Peningkatan pertumbuhan UMKM dan koperasi;
8. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;
9. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan;
10. Peningkatan fasilitasi bantuan rumah layak huni;
11. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan;
12. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
13. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
14. Peningkatan fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

4.3.8 Strategi Pengurangan Pengangguran

Tenaga kerja (*man power*) adalah unsur utama dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan masih menghadapi kendala berkaitan dengan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas masih tergolong cukup besar walaupun cenderung menurun secara fluktuatif dari 7,37% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,37% pada tahun 2014. Penanganan masalah pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018.

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pengurangan angka pengangguran adalah :

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja;
4. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
5. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan penggarap);
6. Pengembangan sektor UMKM berbasis potensi unggulan lokal, melalui pengembangan Desa Usaha Mandiri;
7. Pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan.

Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan optimalisasi informasi bursa tenaga kerja (*job fair*);
2. Peningkatan kerjasama dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai;
3. Pengembangan kelembagaan produktivitas;
4. Peningkatan kualitas prasarana dan pengelola Balai Latihan Kerja;
5. Peningkatan pelatihan ketrampilan masyarakat;
6. Pengembangan OVOP;
7. Pengembangan kewirausahaan;
8. Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis kepada UMKM berbasis potensi unggulan lokal;

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataaan;
10. Optimalisasi kelembagan ekonomi pedesaan;
11. Pengembangan Desa Usaha Mandiri.

4.11.1 Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.11.1.1 Strategi Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aset penting dalam pembangunan. Pembangunan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pembangunan daerah. Sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas cukup besar, berdasarkan data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2014 sebesar 1.985.779 jiwa yang terdiri dari 1.001.185 jiwa laki-laki (50,42 %), 984.594 jiwa perempuan (49,58 %).

Strategi pembangunan daerah Tahun 2018 yang dirumuskan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

1. Revolusi mental
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan ;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
5. Peningkatan layanan kebutuhan dasar masyarakat;
6. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha.

Dari ke 6 (enam) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Penanganan anak putus sekolah;
6. Peningkatan kesejahteraan pendidik;
7. Peningkatan jangkauan layanan pendidikan melalui pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak Mampu (Kartu Banyumas Pintar);
8. Peningkatan layanan pendidikan inklusi;

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
10. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
11. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
12. Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesda (Kartu Banyumas Sehat);
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
14. Peningkatan layanan KB gratis bagi masyarakat;
15. Pengembangan informasi bursa kerja;
16. Peningkatan produktivitas masyarakat.

4.11.1.2 Strategi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tata laksana, SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang undangan serta pola pikir. Perubahan memang harus selalu terjadi, karena dinamika suatu perjalanan kehidupan harus berbeda dari satu masa ke masa berikutnya. Perkembangan global, sains dan teknologi, turut memengaruhi perubahan dan perubahan yang diharapkan di sini bukan sekadar berubah, tetapi harus terencana.

Strategi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten di tahun 2017 antara lain :

1. Pengembangan PATEN;
2. Penguatan Kelembagaan TKPKD;
3. Pengembangan Sistem Perijinan untuk mendukung investasi;
4. Pengembangan Penyusunan Perencanaan dengan berbasis IT;
5. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Pengembangan Sistem informasi pelayanan publik;
7. Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
8. Arah kebijakan reformasi birokrasi :
9. Pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan PATEN di Kecamatan;
10. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pembentukan TKPK tingkat desa;
11. Pengembangan Perijinan Online;

12. Pengembangan penyusunan perencanaan OPD dengan menggunakan E - Planning secara online;
13. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara online;
14. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik di OPD;
15. Pengembangan Sumberdaya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan;
16. Peningkatan disiplin PNS;
17. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
18. Pelimpahan kewenangan perijinan kepada kecamatan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja baik program atau kegiatan dalam RKPD tahun 2018, berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan rencana kerja program/kegiatan serta pendanaan dalam RKPD tahun 2018 terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, disusun dengan harapan dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengakomodasi berbagai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa”.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018, untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Selain hal tersebut, perubahan RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

BUDI WIBOWO